

# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

*Welfare Indicators of Daerah Istimewa Yogyakarta*

## 2016



# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

*Welfare Indicators of Daerah Istimewa Yogyakarta*

2016



# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

*Welfare Indicators Of Daerah Istimewa Yogyakarta*

**2016**

No. Katalog - *Catalog Number* : 4102004.34  
No. ISSN - *ISSN Number* : 0215 - 4746  
No. Publikasi - *Publication Number* : 34550.17.06  
Ukuran Buku/*Book Size* : 18,2 cm x 25,7 cm  
Jumlah Halaman/*Number of Pages* : xx + 70 halaman

Naskah/ *Manuscript* :

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik/ *Regional Account And Statistical Analysis Division*  
Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta/ *BPS - Statistics of D.I. Yogyakarta Province*

Gambar Kulit/ *Cover Design*:

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik/ *Regional Account And Statistical Analysis Division*  
Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta/ *BPS - Statistics of D.I. Yogyakarta Province*

Diterbitkan oleh/ *Published* :

© Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta/ *BPS - Statistics of D.I. Yogyakarta Province*

Dicetak oleh/ *Printed*:

CV Magna Raharja Tama (MAHATA)

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta.

*Prohibited to announce, distribute, communicate, and/or copy part or all of this book for commercial purposes without permission from BPS-Statistics of Daerah Istimewa Yogyakarta.*

## Kata Pengantar

Indikator Kesejahteraan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta 2016 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Publikasi ini yang menyajikan perkembangan data mengenai kesejahteraan rakyat dari waktu ke waktu. Data yang digunakan bersumber dari data primer hasil survei BPS, khususnya Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) serta data sekunder terkait dari dinas/instansi lain di luar BPS.

Konten publikasi ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perencanaan maupun evaluasi terhadap upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Indikator statistik yang disajikan mencakup aspek kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan, kemiskinan, serta sosial lainnya. Dengan demikian, Indikator Kesejahteraan Rakyat 2016 diharapkan mampu menjembatani dan memperkecil kesenjangan antara kebutuhan dan penyediaan data.

Kepada semua pihak yang telah secara aktif berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini, disampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saran untuk perbaikan publikasi sangat diharapkan bagi penyajian di masa mendatang.

Yogyakarta, November 2017

BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepala,

Johanes De Britto Priyono

## ***Preface***

*This Welfare Indicators of Daerah Istimewa Yogyakarta 2016 is an annual publication published by BPS-Statistics of Daerah Istimewa Yogyakarta Province. It presents information on welfare status, its trends and variation among regency/city in Daerah Istimewa Yogyakarta. The statistical information presented is calculated from the latest data available at BPS-Statistics of Daerah Istimewa Yogyakarta Province, such as National Socio-Economic Survey, Labor Force Survey, and secondary data from the other institutions.*

*This publication includes the measurable aspects of welfare/quality of life reports. They are population, health and nutrition, education, employment, consumption, housing, poverty and social concern. We hope that the publication qualifies itself to fill the gap between availability and the need of respective information.*

*We sincerely appreciate to whom has kindly made significant contribution to this publication. Finally, we are always appreciate to any comment on this publication for further improvement of the similar publications in the coming years.*

*Yogyakarta, November 2017*

BPS-Statistics of Daerah Istimewa Yogyakarta Province

*Head,*

Johanes De Britto Priyono

## Abstraksi

Indikator Kesejahteraan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta 2016 merupakan publikasi tahunan yang menyajikan gambaran tingkat kesejahteraan rakyat dari waktu ke waktu. Data disajikan dalam bentuk tabel persentase dan grafik. Pada beberapa tabel ulasan, data yang disajikan dibedakan menurut jenis kelamin untuk melihat perbedaan gender pada aspek tertentu. Dalam publikasi ini, kesejahteraan rakyat diamati dari berbagai aspek yang spesifik, yaitu kependudukan, kesehatan, pendidikan, angkatan kerja, taraf dan pola konsumsi, kemiskinan dan ketimpangan, perumahan dan permukiman, serta sosial lainnya.

Peningkatan taraf kesejahteraan rakyat di Daerah Istimewa Yogyakarta di bidang kesehatan antara lain terlihat dari kenaikan Angka Harapan Hidup. Pada tahun 2016, angka harapan hidup penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta pada saat lahir mencapai level 74,71 tahun. Peningkatan kualitas kesejahteraan dari aspek kesehatan yang lainnya terlihat dari penurunan angka kesakitan dan perubahan referensi penduduk dalam berobat dari pengobatan non medis menjadi pengobatan medis. Dari aspek pendidikan, peningkatan kesejahteraan penduduk ditandai oleh peningkatan angka partisipasi sekolah penduduk pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi, peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk, serta semakin rendahnya angka buta huruf. Dari aspek ketenagakerjaan, peningkatan kesejahteraan ditandai oleh berkurangnya angka pengangguran terbuka dan peningkatan kualitas angkatan kerja.

Kondisi dan kualitas rumah yang ditempati juga menggambarkan keadaan sosial ekonomi dan kesejahteraan rumah tangga. Semakin baik kondisi dan kualitas rumah tempat tinggal menggambarkan semakin baik kesejahteraan penduduk. Secara umum, kualitas tempat tinggal semakin membaik. Hal ini ditandai oleh semakin besarnya proporsi rumah tangga yang menempati bangunan yang layak baik dari sisi jenis lantai, luas lantai, jenis dinding, jenis atap, maupun fasilitas pendukung seperti sumber penerangan, sumber air bersih, fasilitas MCK, dan lainnya. Peningkatan kesejahteraan juga ditunjukkan oleh aspek sosial yang lain seperti peningkatan pengeluaran perkapita penduduk, komposisi pengeluaran non makanan, konsumsi energi dan protein, berkurangnya jumlah penduduk miskin, penurunan tingkat kejahatan, pemanfaatan sarana komunikasi dan informasi, serta meningkatnya minat penduduk untuk menunaikan ibadah haji.

## **Abstract**

*The 2016 Welfare Indicators of Daerah Istimewa Yogyakarta Province is an annual publication which presents the information about welfare status of people from time to time. Data of indicators is presented in the form of percentage table and graph. In some review tables, the data are presented by sex to see gender differences in certain aspects. In this publication, the welfare of the people is observed from various specific aspects, namely population, health, education, labor force, level and consumption patterns, poverty and inequality, housing and settlements, and other social aspect.*

*Increasing the level of people's welfare in Yogyakarta Special Region in health sector is seen from the increase of Life Expectancy Rate. In 2016, the life expectancy of the population of Yogyakarta Special Region at the time of birth reached a level of 74.71 years. Improvement of welfare quality from other health aspect is seen from the decrease of morbidity rate and change of reference of resident in treatment from non-medical treatment become medical treatment. From the aspect of education, the improvement of the welfare is marked by the increase of school enrollment rate at the secondary and higher education levels, the increase in the mean years of schooling, and the lower illiteracy rate. From the employment aspect, welfare improvement is characterized by reduced unemployment and improving the quality of the labor force.*

*The condition and quality of the occupied house also illustrates the socio-economic and welfare conditions of the household. The better the condition and quality of the residential house illustrates the better the welfare of the population. In general, the quality of dwellings is getting better. This is marked by the increasing proportion of households occupying a decent building in terms of floor type, floor area, wall type, roof type, and supporting facilities such as lighting source, clean water source, MCK facility, and others. Welfare improvements are also shown by other social aspects such as increased per capita population expenditure, non-food expenditure composition, energy and protein consumption, reduced number of poor, decreasing crime rate, utilization of communication and information facilities, and increasing people's interest to perform the pilgrimage.*

## Daftar Isi / Contents

Kata Pengantar/ <i>Preface</i> .....	iii-iv
Abstraksi/ <i>Abstract</i> .....	v-vi
Daftar Isi/ <i>Contents</i> .....	vii
Daftar Tabel/ <i>List of Table</i> .....	viii-xi
Daftar Gambar/ <i>List of Picture</i> .....	xii-xiv
Singkatan dan Akronim/ <i>Abbreviation and Acronyms</i> .....	xv
Penjelasan Teknis/ <i>Technical Notes</i> .....	xvi-xviii
Pendahuluan/ <i>Introduction</i> .....	xx
1. Kependudukan/ <i>Population</i> .....	1-6
2. Kesehatan/ <i>Health</i> .....	7-15
3. Pendidikan/ <i>Education</i> .....	17-24
4. Angkatan Kerja/ <i>Labour Force</i> .....	25-30
5. Taraf dan Pola Konsumsi/ <i>Consumption Level and Patterns</i> .....	31-36
6. Perumahan dan Permukiman/ <i>Housing and Settlement</i> .....	37-46
7. Kemiskinan dan Ketimpangan/ <i>Poverty and Inequality</i> .....	47-52
8. Sosial Lainnya/ <i>Other Social</i> .....	53-58
Lampiran/ <i>Appendix</i> .....	59-70
Daftar Pustaka/ <i>References</i> .....	71

## Daftar Tabel / List of Table

### KEPENDUDUKAN / POPULATION

1.1	Jumlah dan Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk D.I. Yogyakarta, 2011-2016/ <i>Number of Population and Annual Growth Rate D.I Yogyakarta, 2011-2016</i> .....	1
1.2	Kepadatan Penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012-2016/ <i>Population Density in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012-2016</i> .....	3
1.3	Komposisi Penduduk dan Angka Beban Tanggungan di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2016 (Persen)/ <i>Composition of Population and Dependency Ratio in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2016 (Percent)</i> .....	4
1.4	Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2016/ <i>Percentage of Population 10 Years Old and Over by Sex and Marital Status in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2016</i> .....	5
1.5	Persentase Wanita Pernah Kawin Usia 10 Tahun ke atas menurut Umur Perkawinan Pertama di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2016/ <i>Percentage of Ever Marriage Women Aged 10 Years and Over by Age at First Married in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2016</i> .....	6

### KESEHATAN / HEALTH

2.1	Persentase Balita menurut Penolong Kelahiran Pertama di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2016/ <i>Percentage of Children Under Five by First Birth Attendant in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2016</i> .....	9
2.2	Persentase Anak Usia di Bawah 2 Tahun yang Pernah Diberi ASI di DIY, 2014-2016/ <i>Percentage of Children Under Two Years Who Had Been Given Breast Milk in DIY, 2014-2016</i> .....	10
2.3	Persentase Balita Usia 2-4 tahun menurut Lamanya Disusui di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012-2014/ <i>Percentage of Children Under Five (2-4 years) by The Length of Feeding (Month) in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012-2014</i> .....	10
2.4	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan yang Lalu di D.I Yogyakarta, 2015-2016/ <i>Percentage of Population Who Had Health Complaint During the Previous Month in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2015-2016</i> .....	13
2.5	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Terganggu Aktivasnya Selama Sebulan yang Lalu di D.I Yogyakarta, 2015-2016/ <i>Percentage of Population Who Had Health Complaint and Disturb Activities During the Previous Month in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2015-2016</i> .....	14
2.6	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan menurut Tempat Berobat di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2016/ <i>Percentage of Population Treated Outpatient by Place/Method of Medical in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2016</i> .....	15

## **PENDIDIKAN / EDUCATION**

- 3.1 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2015 dan 2016/ *Percentage of Population of 15 Years and Over by Educational Attainment and Sex in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2015 and 2016* ..... 20
- 3.2 Angka Partisipasi Sekolah menurut Jenis Kelamin dan Usia Sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016/ *School Participation Ratio by Sex and Age Groups in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016* ..... 21
- 3.3 Angka Partisipasi Kasar menurut Jenis Kelamin dan Usia Sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2016/ *Gross Enrollment Ratio by Sex and Age Groups in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2016* ..... 22
- 3.4 Angka Partisipasi Murni menurut Jenis Kelamin dan Usia Sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2016/ *Net Enrollment Ratio by Sex and Age Groups in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2016* ..... 22
- 3.5 Perkembangan Rasio Murid-Guru dan Rasio Murid-Kelas di Daerah Istimewa Yogyakarta 2011/2012 dan 2015/2016/ *Trend of Pupil-Teacher Ratio and Pupil-Classroom Ratio in D.I. Yogyakarta, 2011/2012 and 2015/2016* ..... 24

## **ANGKATAN KERJA / LABOUR FORCE**

- 4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Jenis Kelamin dan Wilayah di D.I Yogyakarta, 2010-2016/ *Labor Force Participation Rate in Daerah Istimewa Yogyakarta by Sex and Region, 2010 - 2016 (Percent)* ..... 25
- 4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Jenis Kelamin dan Wilayah di D.I. Yogyakarta, 2010-2016/ *Unemployment Rate in Daerah Istimewa Yogyakarta by Sex and Region, 2010-2016* ..... 27
- 4.3 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Seminggu yang Lalu menurut Lapangan Usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010-2016/ *Percentage of Population 15 Years Old and Over Who Worked During The Previous Weeks by Main Industry in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010-2016* ... 29
- 4.4 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu menurut Status Pekerjaan Utama di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010-2016/ *Percentage of Population 15 Years Olds and Over Who Worked During The Previous Week by Employment Status in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010-2016* ..... 30

## **TARAF DAN POLA KONSUMSI / CONSUMPTION LEVEL AND PATTERN**

- 5.1 Persentase Pengeluaran Makanan dan non Makanan menurut Golongan Pengeluaran di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016/ *Percentage of Per Capita Expenditure by Group of Expenditure in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016* ..... 33
- 5.2 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Kelompok Makanan di D.I Yogyakarta, 2014-2016/ *Monthly Expenditure per Capita by Food Group in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2014-2016* ..... 33
- 5.3 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Kelompok nonMakanan di D.I Yogyakarta, 2014-2016/ *Monthly Expenditure per Capita by non Food Group in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2014-2016* ..... 34

5.4	Konsumsi Energi dan Protein per Kapita per Hari Menurut Daerah Tempat Tinggal di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012-2016/ <i>Energy and Protein Consumption per Capita per Day by Type of Area in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012-2016</i> .....	34
5.5	Konsumsi Energi dan Protein per Kapita per Hari Menurut Kelompok Makanan di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2015-2016/ <i>Energy and Protein Consumption per Capita per Day by Group of Foods in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012-2016</i> ...	35

#### **PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN / HOUSING DAN SETTLEMEN**

6.1	Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2016/ <i>Percentage of Household by Source of Lighting in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2016</i> .....	38
6.2	Banyaknya Pelanggan Listrik, Listrik yang Diproduksi dan Terjual di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2016/ <i>Number of Consumer of Electricity, Electricity Generated and Sold in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2016</i> .....	39
6.3	Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2016/ <i>Percentage of Household by Source of Drinking Water in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2016</i> .....	40
6.4	Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Lantai Terluas dari Tempat Tinggal di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2016/ <i>Percentage of Household by Primary Construction Material of The Floor of Living Quarter in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2016</i> .....	42
6.5	Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Kloset di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2016/ <i>Percentage of Household by Closet Facility in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2016</i> .....	44
6.6	Persentase Rumah Tangga menurut Jarak Sumber Air Minum ke Tempat Penampungan Kotoran di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2016/ <i>Percentage of Household by Distance Between Source of Drinking Water to Septic Tank or Other Toilet Discharge in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2016</i> .....	45
6.7	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal di Daerah Istimewa Yogyakarta 2013-2016/ <i>Percentage of Household by Housing Ownership Status in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2016</i> .....	46

#### **KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN / POVERTY AND INEQUALITY**

7.1	Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut Wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2006-2016/ <i>Trend of Head Count and Head Count Index of Poverty by Area in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2006-2016</i> .....	49
7.2	Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan menurut Wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2008-2016/ <i>Poverty Gap Index and Poverty Severity Index by Area in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2008-2016</i> .....	49
7.3	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten /Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta 2015-2016/ <i>Poverty Gap Index and Poverty Severity Index by Area in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2015-2016</i> .....	50

## SOSIAL LAINNYA / OTHER SOCIAL

- 8.1 Pertumbuhan Jumlah Wisatawan yang Menginap di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2011-2016 (Persen)/ *Growth of Tourist who Spent The Night in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2011-2016 (Percent)* ..... 54
- 8.2 Persentase Penduduk yang Melakukan Perjalanan Menurut Jenis Kelamin di Daerah Istimewa Yogyakarta 2013-2016/ *Percentage of Population Who Travellod by Sex in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2016* ..... 55
- 8.3 Persentase Penduduk yang mengakses Internet Menurut Jenis Media yang digunakan di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2015-2016/ *Percentage of Household with Access to Internet by Types of Information Tools in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2015-2016* ..... 56
- 8.4 Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Jenis Kelamin di Daerah Istimewa Yogyakarta 2013-2016/ *Percentage of Population Who Ever Became the Victim of Crime by Sex in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2016* ..... 57
- 8.5 Banyaknya Pemeluk Agama Islam, Jemaah Haji, dan Rasio Jemaah Haji per 100.000 Penduduk Pemeluk Agama Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2016/ *Number of Moslem, Pilgrim, and Ratio of Pilgrim per 100,000 Moslem in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2016* ..... 58

## Daftar Gambar / List of Picture

1.1	Tingkat Pertumbuhan Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta, 2011-2016/ <i>Population Growth in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2011-2016</i> .....	2
1.2	Distribusi Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2016/ <i>Distribution of Population in Daerah Istimewa Yogyakarta by Regency/City 2016</i> .....	3
1.3	Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016/ <i>Population 10 Years Old and Over by Sex and Marital Status in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016</i> .....	5
2.1	Perkembangan Angka Kematian Bayi di DIY, 2000-2012/ <i>Trend of Infant Mortality Rate in DIY, 2000-2012</i> .....	8
2.2	Perkembangan Angka Harapan Hidup Penduduk DIY, 2000-2012/ <i>Trend of Life Expectancy in DIY, 2000-2012</i> .....	8
2.3	Persentase Balita menurut Penolong Kelahiran Terakhir, 2010-2016/ <i>Percentage of Children Under Fives by First Birth Attendant, 2010- 2016</i> .....	9
2.4	Persentase Anak Usia 6-24 Bulan Menurut Periode Pemberian ASI Eksklusif di DIY, 2016/ <i>Percentage of Children (6-24 Months) by Period of Exclusive Breast Milk in DIY, 2016</i> .....	11
2.5	Persentase Anak Berusia 12-59 Bulan yang Diberi Imunisasi di DIY, 2016/ <i>Percentage of Children Aged 12-59 Months Had Vaccinated by Area in DIY, 2016</i> .....	12
2.6	Persentase Balita Berusia 12-59 Bulan di DIY yang Diberi Imunisasi menurut Jenis Imunisasi, 2016/ <i>Percentage of Children Aged 12-59 Months Had Vaccinated by Type of Vaccination in DIY, 2016</i> .....	12
2.7	Persentase Balita Berusia 12-59 Bulan (Tidak Memiliki Kartu) di DIY yang Diberi Imunisasi menurut Jenis Imunisasi, 2016/ <i>Percentage of Children Aged 12-59 Months (No Card) Had Vaccinated by Type of Vaccination, 2016</i> .....	13
3.1	Angka Melek Huruf menurut Jenis Kelamin di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013- 2016/ <i>Literacy Rate by Sex in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2016</i> .....	18
3.2	Distribusi Penduduk Berusia 15 Tahu ke Atas di DIY menurut Pendidikan Tertinggi, 2016/ <i>Population Distribution Over the Age of 15 According to The Highest Education, 2016</i> .....	19
3.3	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Berusia 25 Tahun ke Atas di DIY, 2010-2016/ <i>Mean Years of Schooling of Population Aged 25 Years and Over in DIY, 2010- 2016</i> .....	23
4.1	Proporsi Pekerja Tidak Penuh dan Tingkat Setengah Pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2015-2016/ <i>Proportion of Part Time Worker and</i>	

	<i>Underemployment in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2015-2016</i> .....	28
4.2	Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta, Agustus 2016/ <i>Population 15 Years Old and Over Who Worked by Main Industry in Daerah Istimewa Yogyakarta, August 2016</i> .....	29
5.1	Level Pengeluaran Perkapita Penduduk Sebulan menurut Wilayah di D.I. Yogyakarta, 2010-2016 (000Rp)/ <i>The level of Expenditure per Capita per Month by Area in D.I. Yogyakarta, 2010-2016 (000Rp)</i> .....	31
5.2	Komposisi Pengeluaran Perkapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan di D.I Yogyakarta, 2010 – 2016/ <i>Percentage Expenditure per Capita by Food and Non-Food Group in D.I. Yogyakarta, 2010 – 2016</i> .....	32
6.1	Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum dan Memasak di DIY, 2016/ <i>Percentage of Household by Source of Drinking Water and Cooking in DIY, 2016</i> .....	40
6.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016/ <i>Percentage of Household by The Widest Type of Flooring In DIY, 2016</i> .....	41
6.3	Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Dinding Terluas di DIY, 2016/ <i>Percentage of Household by The Widest Type of Wall In DIY, 2016</i> .....	42
6.4	Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Atap Terluas di DIY, 2016/ <i>Percentage of Household by The Widest Type of Roof In DIY, 2016</i> .....	43
6.5	Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Fasilitas Buang Air Besar di DIY, 2016/ <i>Percentage of Household by The Type of Toilet Facilities In DIY, 2016</i> .....	43
6.6	Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja di DIY, 2016/ <i>Percentage of Household by The Type of Septic Tank in DIY, 2016</i> .....	44
6.7	Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Tempat Tinggal di DIY, 2016/ <i>Percentage of Households by Housing Ownership Status in DIY, 2016</i> .....	46
7.1	Perkembangan Garis Kemiskinan menurut Wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2007-2016/ <i>Trend of Poverty Line by Area in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2007-2016</i> .....	48
7.2	Distribusi Pengeluaran Penduduk menurut Golongan Pengeluaran di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2007-2016/ <i>Distribution of Expenditure by Group in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2007-2016</i> .....	51
7.3	Perkembangan Indeks Gini di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional, 2007-2016/ <i>Trend of Gini Index in Daerah Istimewa Yogyakarta and National, 2007-2016</i> .....	51
8.1	Jumlah Wisatawan yang Menginap di Losmen dan Hotel di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010-2016/ <i>Number of Tourist who Spent The Night at Inn and Hotel in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010-2016</i> .....	53

8.2	Persentase Penduduk yang Mengakses Internet Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2015-2016/ <i>Percentage of Population with Access to Internet by Regency in DIY, 2015-2016</i> .....	55
8.3	Proporsi Penduduk yang pernah Menjadi Korban Kejahatan di DIY menurut Jenis Kejahatan, 2016/ <i>Proportion of Population Who Ever Became the Victim of Criminal Acts in DIY by Type of Victim, 2016</i> .....	57

<https://yogyakarta.bps.go.id>

## Singkatan dan Akronim/ *Abbreviation and Acronyms*

KB	Keluarga Berencana/ <i>Family Planning</i>
AKB/IMR	Angka Kematian Bayi/ <i>Infant Mortality Rate</i>
AHH/e <sub>0</sub>	Angka Harapan Hidup/ <i>Expectancy of Life</i>
ASI	Air Susu Ibu/ <i>Breast Feeding</i>
AMH	Angka Melek Huruf/ <i>Literacy Rate</i>
S D/PS	Sekolah Dasar/ <i>Primary School</i>
S L T P/ JHS	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/ <i>Junior High School</i>
S L T A/ SHS	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ <i>Senior High School</i>
APS	Angka Partisipasi Sekolah/ <i>School Participation Ratio</i>
APK	Angka Partisipasi Kasar/ <i>Gross Enrollment Ratio</i>
APM	Angka Partisipasi Murni/ <i>Net Enrollment Ratio</i>
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/ <i>Labour Force Participation Rate</i>
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka/ <i>Open Unemployment Rate</i>
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional/ <i>National Socio Economic Survey</i>
SPI/ PC	Sensus Penduduk/ <i>Population Census</i>
SDKI	Survei Demografi Kesehatan Indonesia/ <i>Demographic Health Survey</i>

## Penjelasan Teknis / *Technical Notes*

1. **Penduduk menurut kelompok umur** adalah pengelompokan penduduk berdasarkan umur, dan biasanya dikelompokkan ke dalam kelompok interval 5 tahunan yang dimulai dari usia 0 tahun.
2. **Kepadatan Penduduk/km<sup>2</sup>** adalah rata-rata jumlah penduduk per km<sup>2</sup>.
3. **Laju Pertumbuhan Penduduk** adalah ukuran rata-rata kecepatan penambahan penduduk per tahun.
4. **Angka Beban Tanggungan** adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya orang pada usia yang tidak produktif (umur di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan banyaknya orang yang termasuk usia produktif (umur 15-64 tahun).
5. **Umur Perkawinan Pertama** menunjukkan umur saat seseorang melangsungkan upacara perkawinan yang pertama.
6. **Rumah Sakit** adalah tempat pemeriksaan dan perawatan kesehatan yang biasanya di bawah pengawasan dokter/tenaga medis.
7. **Puskesmas** adalah kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat di samping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.
8. **Seseorang dikatakan dapat membaca dan menulis** apabila ia dapat membaca dan menulis surat/kalimat sederhana dengan suatu huruf.
9. **AMH (Angka Melek Huruf)**  
*Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas (dalam persentase).*
10. **Angka Partisipasi Kasar**  
*Proporsi antara jumlah murid SD/SLTP/SLTA dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun/13-15 tahun/16-18 tahun (dalam persentase).*
11. **Angka Partisipasi Murni**  
*Proporsi antara murid SD/SLTP/SLTA usia 7-12 tahun/13-15 tahun/16-18 tahun dengan penduduk usia 7-12 tahun/13-15 tahun/16-18 tahun (dalam persentase).*
12. **Angka Putus Sekolah**  
Persentase antara jumlah penduduk usia 7 tahun/13 tahun/16 tahun ke atas yang putus sekolah di SD/SLTP/SLTA dengan jumlah penduduk usia 7 tahun/13 tahun/16 tahun ke atas (dalam persentase).
13. **Masih Bersekolah** adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal (Paket A/B/C), yang berada di bawah pengawasan Kemdiknas, Kementerian Agama (Kemenag), instansi negeri lain maupun instansi swasta.

14. Rasio murid terhadap guru SD/SLTP/ SLTA :

$$\frac{\text{Jumlah murid SD/SLTP/SLTA}}{\text{Jumlah guru SD/SLTP/SLTA}}$$

15. Rasio murid per kelas SD/SLTP/ SLTA :

$$\frac{\text{Jumlah murid SD/SLTP/SLTA}}{\text{Jumlah kelas SD/SLTP/SLTA}}$$

16. **Angkatan Kerja** adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

17. **Bekerja** adalah mereka yang selama seminggu yang lalu melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan dan bekerja paling sedikit 1 (satu) jam berturut-turut dalam seminggu yang lalu.

18. **Pengangguran** adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (*discouraged workers*), atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja/mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (*future starts*).

19. **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT):**

$$\frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

20. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK):**

$$\frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas}} \times 100\%$$

21. **Bagan Ketenagakerjaan:**



22. **Mencari pekerjaan** adalah kegiatan seseorang yang tidak bekerja dan pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan, baik mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan atau mereka yang sudah pernah bekerja,

karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan.

23. **Bukan Angkatan Kerja** adalah bagian dari tenaga kerja (*manpower*) yang tidak bekerja ataupun bukan pengangguran, seperti sekolah, mengurus rumah tangga atau tua dan cacat.
24. **Sekolah** adalah kegiatan bersekolah di sekolah formal baik pendidikan dasar, pendidikan menengah atau pendidikan tinggi. Tidak termasuk yang sedang libur (mulai tahun 2010 termasuk non formal).
25. **Mengurus Rumah Tangga** adalah penduduk 15 tahun ke atas yang selama seminggu yang lalu mengurus rumah tangga atau membantu mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah/gaji.
26. **Status Pekerjaan** adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan.
27. **Lapangan Usaha** adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/ perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja, atau yang dihasilkan oleh perusahaan/kantor tempat responden bekerja.
28. **Konsumsi Rumah Tangga** adalah pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan makanan dan non makanan. Kelompok makanan mencakup pengeluaran konsumsi bahan makanan, makanan jadi, minuman, tembakau dan sirih. Sedangkan kelompok bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.
29. **Indeks Gini** adalah ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Nilai Koefisien Gini terletak antara nol yang mencerminkan pemerataan sempurna dan satu yang menggambarkan ketidakmerataan sempurna.
30. **Pengeluaran rata rata perkapita sebulan** adalah rata rata biaya yang dikeluarkan rumah tangga untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga.

## Pendahuluan / Introduction

---

### Tujuan

Indikator Kesejahteraan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta 2015 merupakan publikasi yang diterbitkan setiap tahun oleh BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Informasi statistik yang disajikan memberi gambaran mengenai kesejahteraan masyarakat dan perubahan sosial yang terjadi selama tahun 2012-2015.

### Ruang Lingkup

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) menyajikan gambaran mengenai taraf kesejahteraan rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, perkembangannya antar waktu serta perbandingan antar kabupaten/kota. Publikasi ini menyajikan indikator-indikator input, proses, dan output untuk memberikan gambaran tentang investasi dari berbagai program peningkatan kesejahteraan rakyat serta proses dan manfaat dari program tersebut.

Dimensi Kesejahteraan Rakyat disadari sangat luas dan kompleks, sehingga suatu taraf kesejahteraan rakyat tidak hanya dapat terlihat (*visible*) dari suatu aspek tertentu. Dalam publikasi ini kesejahteraan rakyat diamati dari beberapa aspek yang spesifik, yaitu aspek Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, serta Sosial Lainnya.

Dalam pengertian yang luas sangat tidak mungkin untuk menyajikan statistik atau indikator yang mampu untuk mengukur kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Oleh karena itu, indikator yang disajikan dalam terbitan ini hanya menyangkut segi-segi kesejahteraan yang dapat diukur (*measurable welfare*).

### Sumber Data

Sumber data utama Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) 2015 ini merupakan data primer, dalam arti dikumpulkan dan diolah sendiri oleh Badan Pusat Statistik, baik BPS Pusat maupun BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti Sensus Penduduk (SP), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan lain-lain. Data primer tersebut mempunyai keterbatasan sebagai sumber informasi publikasi tahunan.

Upaya untuk menyediakan sumber data yang tetap bagi publikasi Inkesra telah dilakukan melalui perluasan cakupan pertanyaan pokok (data kor) Susenas yang diadakan setiap

tahun. Dengan demikian publikasi Inkesra mempunyai sumber data yang pasti dan berkesinambungan sehingga selalu dapat menyajikan data yang relatif *up to date*. Selain menggunakan data primer, publikasi ini juga mengolah data sekunder yang berasal dari instansi-instansi pemerintah yang terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kanwil Kemenag dan sebagainya.

<https://yogyakarta.bps.go.id>



# Komposisi Penduduk DTY Tahun 2016 Didominasi oleh Usia Muda dan Perempuan



1,84 Juta L



1,88 Juta P

" Terdapat 101 penduduk perempuan untuk setiap 100 penduduk laki-laki "



Sex Ratio  
101,08

9,19%  
berusia >65 Th

21,48%  
berusia <15 Th



Rasio Beban  
Ketergantungan  
sebesar

**44,24 %**

" Setiap 100 penduduk berusia produktif menanggung 44 penduduk yang belum dan tidak produktif secara ekonomi "



69,33%  
berusia 15-64 Th

# Bab 1 Kependudukan Population

Pembangunan suatu wilayah merupakan sebuah proses perbaikan yang berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses pencapaian masyarakat yang sejahtera membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, di samping juga aset atau sumber daya lainnya. Penduduk mempunyai peranan yang sangat strategis dalam proses pembangunan suatu wilayah, baik sebagai subyek pelaksana maupun sebagai obyek penerima manfaat. Dengan berbagai aspek penduduk seperti jumlah dan pertumbuhan penduduk, penyebaran dan kepadatan penduduk, komposisi dalam usia, jenis kelamin, pendidikan, dan kesehatan maka penduduk dapat mempengaruhi pembangunan, baik sebagai pendukung maupun penghambat pembangunan.

Dinamika kependudukan yang selalu berkembang sangat berpengaruh terhadap proses pembangunan yang dilakukan pemerintah. Jumlah penduduk yang besar yang diikuti oleh sumber daya manusia yang berkualitas akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jumlah penduduk besar dengan kualitas yang rendah hanya akan menjadi beban pembangunan.

Keberhasilan pembangunan diukur dari seberapa besar dampak pembangunan terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk secara umum. Dengan kata lain, hasil pembangunan harus bisa dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Keberhasilan pembangunan juga ditunjang dengan penanganan permasalahan penduduk, seperti kebijakan pembangunan kependudukan yang terarah dan terencana sebagai upaya pengendalian jumlah dan perkembangan penduduk, peningkatan kualitas sumber daya manusia,

dan pengarahannya mobilitas penduduk. Dengan demikian diharapkan tercipta penduduk yang berkualitas dan tersebar secara merata di seluruh wilayah sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat secara adil dan merata.

## Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2016 berdasarkan hasil proyeksi penduduk 2010-2020 diperkirakan mencapai 3,72 juta jiwa. Jumlah penduduk ini menyumbang sebesar 1,44 persen terhadap total populasi penduduk secara nasional. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2015 yang mencapai 3,68 juta, jumlah penduduk 2016 bertambah sebanyak 41,7 ribu jiwa.

Tabel 1.1 Jumlah dan Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk D.I. Yogyakarta, 2011-2016

Table 1.1 Number of Population and Annual Growth Rate D.I Yogyakarta, 2011-2016

Tahun	Jumlah Penduduk Number of Population	Laju Pertumbuhan Annual Growth Rate (%)
(1)	(2)	(3)
2011	3 509 997	1,23
2012	3 552 462	1,21
2013	3 594 854	1,19
2014	3 637 116	1,18
2015	3 679 176	1,16
2016	3 720 912	1,13

Sumber: Proyeksi Penduduk 2010-2020  
Source: Population Projection 2010-2020

Sementara, bila dibandingkan dengan jumlah penduduk hasil proyeksi penduduk pada tahun 2010 yang tercatat 3,46 juta, maka setiap tahun jumlah penduduk rata-rata

bertambah sebanyak 42,24 ribu penduduk. Tabel 1.1 menunjukkan selama periode 2011-2016 laju pertumbuhan penduduk DIY memiliki kecenderungan yang semakin melambat.

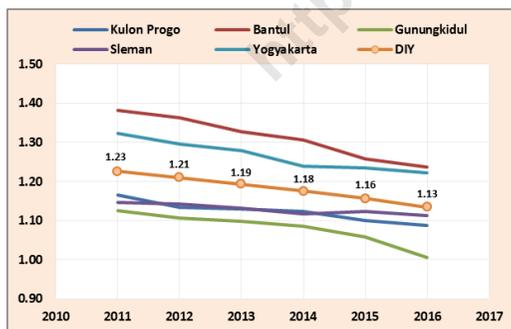
Laju pertumbuhan penduduk per tahun Daerah Istimewa Yogyakarta hasil Sensus Penduduk 2000-2010 sebesar 1,04 persen.

Rasio jenis kelamin (sex ratio) hasil SP2010 tercatat sebesar 97,7 persen atau perempuan lebih dominan dari laki-laki.

Berdasarkan kabupaten/kota, jumlah penduduk yang terbesar pada tahun 2016 terdapat di Kabupaten Sleman sebesar 1,18 juta jiwa. Berikutnya secara-berturut-turut adalah Kabupaten Bantul sebanyak 0,98 juta jiwa dan Kabupaten Gunungkidul sebanyak 0,72 juta jiwa.

Gambar 1.1: Tingkat Pertumbuhan Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta, 2011-2016

Figure 1.1: Population Growth in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2011-2016



Sumber: Proyeksi Penduduk 2010-2020, BPS  
Source: Population Projection 2010-2020, BPS

Laju pertumbuhan penduduk tahun 2016 menurut kabupaten/kota terlihat cukup bervariasi. Laju pertumbuhan penduduk yang tertinggi terjadi di Kabupaten Bantul sebesar 1,24 persen dan Kota Yogyakarta sebesar 1,22 persen. Kedua daerah memiliki laju pertumbuhan penduduk di atas laju pertumbuhan penduduk DIY (1,13 persen). Daerah dengan laju pertumbuhan penduduk

terendah adalah Kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo dengan laju masing-masing sebesar 1,01 persen dan 1,09 persen. Secara umum, pertumbuhan penduduk kabupaten/kota di DIY berdasarkan data proyeksi selama enam tahun terakhir memiliki kecenderungan yang semakin menurun.

## Kepadatan dan Persebaran Penduduk

Kepadatan penduduk (*population density*) merupakan salah satu indikator kependudukan yang umum digunakan karena mampu mencerminkan tingkat pemerataan penduduk dalam suatu wilayah. Tinggi rendahnya tingkat kepadatan penduduk dapat membawa dampak positif maupun negatif. Kepadatan yang sudah pada titik jenuh, mungkin akan lebih banyak memberi dampak negatif lebih besar, akibat terjadinya ketimpangan sumber daya manusia. Permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketimpangan pendapatan, pengangguran, kriminalitas, berkurangnya lahan pertanian, kerusakan lingkungan akan semakin meningkat jika tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan penduduk seperti fasilitas sosial dan ekonomi serta penciptaan kesempatan bekerja.

Pemerataan dan keseimbangan dapat dilakukan dengan kebijakan relokasi penduduk dalam bentuk migrasi, sehingga terjadi kondisi ideal dan seimbang antara penduduk dan ketersediaan sumber daya. Selain itu, kebijakan pembangunan berbasis pinggiran atau perdesaan juga harus lebih ditingkatkan untuk mengurangi laju migrasi penduduk ke wilayah perkotaan dan mengurangi konsentrasi penduduk di kawasan pusat-pusat perekonomian. Kondisi umum yang terjadi adalah bahwa kepadatan penduduk cenderung tinggi di daerah-daerah perkotaan. Ketersediaan fasilitas kehidupan yang lebih lengkap dan beragam serta bervariasinya lapangan pekerjaan merupakan daya tarik tersendiri yang menggiring penduduk untuk melakukan perpindahan/migrasi ke pusat-pusat kota.

Persebaran penduduk yang tidak merata perlu mendapat perhatian berkaitan dengan daya dukung lingkungan yang tidak seimbang antar kabupaten/kota. Oleh karena itu diharapkan adanya persebaran penduduk yang lebih merata dari wilayah yang padat penduduknya ke wilayah yang jarang penduduknya atau rendah tingkat kepadatannya.

Tabel 1.2 Kepadatan Penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012-2016

*Tabel 1.2 Population Density in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012-2016*

Kabupaten/ Kota Regency/ City	Kepadatan Penduduk/km <sup>2</sup> Population Density				
	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulon Progo	680	688	696	703	711
Bantul	1 844	1 868	1 892	1 916	1 940
Gunungkidul	466	471	476	481	486
Sleman	1 963	1 986	2 008	2 030	2 053
Yogyakarta	12 425	12 584	12 740	12 897	13 055
<b>DIY</b>	<b>1 115</b>	<b>1 128</b>	<b>1 142</b>	<b>1 155</b>	<b>1 168</b>

Sumber: Proyeksi Penduduk 2010-2020, BPS  
Source: Population Projection 2010-2020, BPS

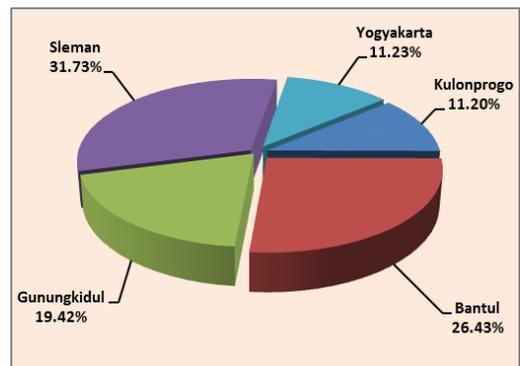
Perkembangan angka kepadatan penduduk DIY dalam beberapa tahun terakhir memiliki kecenderungan yang semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh penambahan jumlah penduduk, sementara dari sisi luas wilayah administrasi tidak bertambah. Pada tahun 2016, kepadatan penduduk DIY tercatat mencapai 1.168 jiwa per km<sup>2</sup>. Artinya, setiap 1 km<sup>2</sup> wilayah DIY dihuni oleh 1.168 jiwa penduduk. Perkembangan angka kepadatan penduduk di semua kabupaten/kota juga menunjukkan peningkatan. Wilayah dengan kepadatan tertinggi sampai tahun 2016 tercatat di Kota Yogyakarta. Setiap 1 km<sup>2</sup> wilayah Kota Yogyakarta dihuni oleh 12.055 jiwa penduduk. Berikutnya secara berturut-turut adalah Kabupaten Sleman (2.053 jiwa per km<sup>2</sup>) dan Bantul (1.940 jiwa per km<sup>2</sup>). Sementara, Kabupaten Gunungkidul tercatat sebagai wilayah dengan kepadatan

penduduk terendah yaitu 486 jiwa per km<sup>2</sup>. Hal ini disebabkan oleh wilayah administrasi Gunungkidul yang cukup luas, yakni mencakup 46,6 persen wilayah DIY.

Persebaran atau konsentrasi penduduk menurut kabupaten/kota juga menunjukkan pola yang tidak merata. Hal ini diilustrasikan oleh distribusi penduduk dalam Gambar 1.2. Sekitar 32 persen penduduk DIY pada tahun 2016 tinggal di wilayah Kabupaten Sleman. Berikutnya adalah Kabupaten Bantul dan Gunungkidul dengan andil penduduk masing-masing 26,4 persen dan 19,4 persen. Sementara, penduduk yang tinggal di Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta hanya sekitar 11 persen.

Gambar 1.2. Distribusi Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2016

*Figure 1.2. Distribution of Population in Daerah Istimewa Yogyakarta by Regency/City, 2016*



Sumber: Proyeksi Penduduk 2010-2020, BPS  
Source: Population Projection 2010-2020, BPS

### Angka Ketergantungan

Salah satu indikator demografi yang cukup penting adalah angka ketergantungan. Angka beban ketergantungan diukur dari proporsi penduduk yang tidak produktif secara ekonomi yaitu penduduk berumur muda (di bawah 15 tahun) dan penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas) terhadap penduduk yang produktif secara ekonomi (15-64 tahun). Pada umumnya, penduduk berusia di bawah 15 tahun secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang

lain yang menanggungnya. Sementara, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi.

Dengan angka ketergantungan ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Semakin tinggi angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sebaliknya, semakin rendah angka beban ketergantungan menunjukkan semakin rendah pula beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum/tidak produktif.

Tabel 1.3. Komposisi Penduduk dan Angka Beban Tanggungan di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2016 (Persen)

Table 1.3. *Composition of Population and Dependency Ratio in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2016 (Percent)*

Tahun Year	Umur / Age			Jumlah Total	Angka Beban Tanggungan Dependency Ratio
	0-14	15-64	65+		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2013	21,63	69,15	9,22	100	45
2014	21,68	69,47	8,85	100	44
2015	21,64	69,14	9,22	100	45
2016	21,48	69,33	9,19	100	44

Sumber : BPS, Susenas 2013-2016  
Source : BPS, National Socio Economic Survey 2013-2016

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa Angka Beban Ketergantungan / *Dependency Ratio* di Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2013-2016 cukup stabil pada kisaran 44-45 persen. Hal ini berarti bahwa secara rata-rata setiap 100 penduduk berusia produktif pada memiliki beban untuk menanggung sekitar 44-45 penduduk yang belum produktif dan sudah tidak produktif. Besarnya komposisi penduduk berusia produktif

menjadi peluang dari bonus demografi yang bisa dioptimalkan untuk mengejar akselerasi pertumbuhan. Tentu saja hal ini terjadi dengan asumsi bahwa setiap usia produktif betul-betul produktif. Jika tidak, tentu akan lebih berat lagi karena beban tanggungan usia produktif yang juga harus menanggung usia produktif menjadi bertambah karena harus menanggung usia produktif lainnya. Bahkan, usia produktif yang secara nyata tidak dapat diberdayakan secara ekonomi (pengangguran) akan menimbulkan masalah yang cukup serius dalam kehidupan sosial.

Pada tahun 2016, setiap 100 penduduk berusia produktif di DIY menanggung sebanyak 44 penduduk yang tidak produktif.

Level angka beban ketergantungan DIY lebih rendah dari rata-rata nasional.

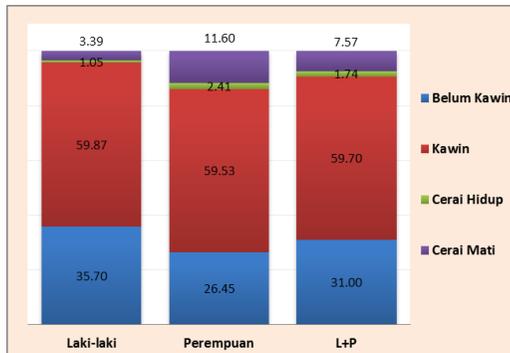
### Status Perkawinan

Status perkawinan secara demografi menjadi faktor antara dalam analisis fertilitas, khususnya status perkawinan penduduk perempuan. Status kawin menggambarkan kestabilan status penduduk dalam membentuk dan membina rumah tangga. Untuk melihat stabil tidaknya ketahanan rumah tangga, dapat dicermati dari komposisi penduduk yang berstatus cerai hidup. Makin tinggi proporsi yang berstatus cerai hidup, maka kualitas ketahanan rumah tangga relatif makin rendah.

Komposisi penduduk DIY berusia 10 tahun ke atas berdasarkan status perkawinan pada tahun 2016 didominasi oleh penduduk yang berstatus kawin. Secara persentase, jumlahnya mencapai 59,7 persen. Sementara, sisanya terdiri dari penduduk yang berstatus belum kawin sebanyak 31 persen, cerai hidup 1,74 persen, dan cerai mati 7,57 persen. Proporsi penduduk yang berstatus cerai hidup selama tahun 2016 tercatat meningkat sebesar 0,12 poin persen dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 1,62 persen.

Gambar 1.3. Penduduk 10 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan di DIY, 2016

Figure 1.3. Population of 10 Years Old and Over by Sex and Marital Status in DIY, 2016



Sumber: BPS, Susenas 2016

Source: BPS, National Socio Economic Survey 2016

Berdasarkan jenis kelamin, penduduk perempuan yang berstatus cerai hidup atau cerai mati tercatat selalu lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Hal ini terlihat dari perkembangan data selama empat tahun terakhir (2013-2016). Secara umum perbandingan tersebut mencerminkan bahwa penduduk perempuan lebih dapat bertahan untuk tidak kawin/menikah lagi setelah ditinggal mati oleh pasangannya (janda cerai mati) atau setelah cerai hidup.

Penduduk laki-laki ketika ditinggal mati oleh pasangannya memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk menikah atau mencari pasangan lagi dibandingkan perempuan. Demikian pula ketika bercerai hidup dengan pasangannya, laki-laki juga memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk menikah lagi dibanding perempuan. Fenomena ini secara tidak langsung juga ditunjukkan oleh persentase laki-laki dengan status kawin yang tercatat lebih tinggi dibanding perempuan selama empat tahun terakhir. Lebih tingginya proporsi perempuan yang berstatus cerai mati atau cerai hidup dibandingkan dengan laki-laki juga bisa dipengaruhi oleh usia harapan hidup penduduk perempuan yang lebih panjang dari penduduk laki-laki.

Tabel 1.4. Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2016

Table 1.4. Percentage of Population of 10 Years Old and Over by Sex and Marital Status in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2016

Jenis Kelamin/ Sex	Status Perkawinan / Marital Status				Jumlah Total
	Belum kawin/ Single	Kawin/ Married	Cerai Hidup/ Divorced	Cerai Mati/ Widowed	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>2013</b>					
L/Male	35,93	60,50	0,74	2,83	100
P/Female	26,54	59,82	2,17	11,47	100
L+P	31,15	60,16	1,47	7,23	100
<b>2014</b>					
L/Male	35,88	60,18	0,70	3,25	100
P/Female	26,90	59,24	2,06	11,80	100
L+P	31,31	59,70	1,39	7,60	100
<b>2015</b>					
L/Male	35,87	60,10	1,01	3,02	100
P/Female	26,57	59,29	2,21	11,93	100
L+P	31,14	59,69	1,62	7,55	100
<b>2016</b>					
L/Male	35,70	59,87	1,05	3,39	100
P/Female	26,45	59,53	2,41	11,60	100
L+P	31,00	59,70	1,74	7,57	100

Sumber: BPS, Susenas 2013-2016

Source: BPS, National Socio Economic Survey 2013-2016

## Usia Perkawinan Pertama

Usia perkawinan pertama wanita sangat mempengaruhi tingkat fertilitas dan perkembangan jumlah penduduk. Makin muda usia perkawinan semakin panjang masa reproduksi sehingga akan menjadikan tingkat kelahiran semakin tinggi. Di sisi yang lain, usia perkawinan yang terlalu dini memiliki pengaruh terhadap tingkat resiko ketika masa kehamilan dan persalinan bagi bayi dan ibu. Semakin tinggi usia perkawinan pertama akan mempersingkat masa reproduksi wanita dan itu berarti peluang tingkat kelahiran akan rendah.

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1), syarat menikah untuk perempuan harus

sudah berusia minimal 16 tahun, sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak usia minimal untuk menikah yaitu sudah berumur 18 tahun. Sementara, menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama bagi seseorang yang ideal adalah 21-25 tahun.

Tabel 1.5. Persentase Wanita Pernah Kawin 10 Tahun ke atas di DIY menurut Umur Perkawinan Pertama, 2013-2016

*Table 1.5. Percentage of Ever Marriage Women Aged 10 Years and over by Age at First Married in DIY, 2013 – 2016*

Tahun Year	Umur Perkawinan Pertama/ Age at First Married				Jumlah Total
	≤16	17-18	19-24	25+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2013	7,26	18,30	51,99	22,44	100
2014	7,61	17,66	53,06	21,67	100
2015	2,09	6,76	75,85	15,30	100
2016	7,34	14,28	54,16	24,23	100

Sumber : BPS, Susenas 2013- 2016

Source : BPS, 2013-2016 National Socio Economic Survey

Distribusi persentase wanita berusia 10 tahun ke atas yang berstatus pernah kawin menurut usia perkawinan pertama disajikan dalam Tabel 1.5. Secara umum, mayoritas wanita yang berstatus pernah kawin melakukan perkawinan pada usia 19-24 tahun. Berdasarkan Susenas pada tahun 2016 proporsinya sebesar 54,16 persen.

Angka ini menggambarkan kesadaran wanita untuk melakukan perkawinan pada usia ideal yang semakin meningkat. Komposisi terbesar berikutnya adalah mereka yang kawin pada usia 25 tahun ke atas dengan proporsi 24,23 persen. Sementara, proporsi wanita yang pernah kawin dengan usia 18 tahun ke bawah masih cukup besar yakni 21,61 persen. Jika lebih dirinci, maka masih terdapat 7,34 persen yang kawin pada usia 16 tahun ke bawah. Proporsi ini masih cukup besar dan membutuhkan perhatian yang lebih serius. Sebagian besar kasus perkawinan dengan usia 16 tahun ke bawah memang terjadi pada masa beberapa dekade yang lalu. Namun, pada masa sekarang juga terjadi banyak kasus, terutama pada usia pelajar yang salah dalam bergaul sehingga terpaksa menikah pada usia yang sangat dini.

Secara prinsip, pada usia kurang dari 18 tahun seorang wanita belum siap untuk membina sebuah rumah tangga dan seharusnya mereka masih bersekolah di jenjang pendidikan menengah. Dengan memberi kesempatan pada wanita untuk bersekolah lebih tinggi, memberikan penyuluhan, seminar tentang kesehatan reproduksi, pendidikan seks usia dini di sekolah-sekolah, dan memperluas kesempatan kerja, diharapkan dapat membantu wanita untuk menunda usia perkawinan pertama dan pada akhirnya dapat menekan tingkat kelahiran.

# Bab 2 Kesehatan Health

---

Selain pendidikan, investasi sektor kesehatan mempunyai *multiplier effect* yang cukup tinggi terhadap pembangunan di sektor lainnya. Pada tingkat mikro, kesehatan adalah dasar bagi produktivitas kerja dan kapasitas untuk belajar di sekolah. Tenaga kerja yang sehat secara fisik dan mental akan lebih produktif, dan mendapatkan penghasilan yang tinggi. Pada tingkat makro, penduduk dengan tingkat kesehatan yang baik merupakan masukan (*input*) penting untuk menurunkan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan ekonomi jangka panjang.

Oleh sebab itu kesehatan menjadi salah satu aspek kesejahteraan dan menjadi salah satu fokus utama pembangunan manusia. Komitmen global untuk meningkatkan status kesehatan secara jelas dicantumkan dalam Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals-MDGs*). Tujuan pembangunan milenium tersebut antara lain: (1) menurunkan angka kematian anak sebesar dua pertiganya pada tahun 2015 dari keadaan tahun 1990; (2) menurunkan angka kematian ibu melahirkan sebesar tiga perempatnya pada tahun 2015 dari keadaan 1990; dan (3) menahan peningkatan prevalensi penyakit HIV/AIDS dan penyakit utama lainnya pada tahun 2015. Tujuan Pembangunan Milenium difokuskan pada pengurangan kemiskinan pada umumnya dan beberapa tujuan kesehatan pada khususnya, sehingga terdapat keterkaitan antara upaya keseluruhan penurunan kemiskinan dengan investasi di bidang kesehatan

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah sudah menggalakkan berbagai program untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang sasaran utamanya meningkatkan angka harapan

hidup, menurunkan angka kematian bayi dan angka kematian ibu serta menurunkan prevalensi gizi kurang.

Upaya yang telah dilakukan di antaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin; penyediaan sumber daya kesehatan yang kompeten; peningkatan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, posyandu, dan rumah sakit; penyediaan obat yang terjangkau oleh masyarakat, dan pendistribusian tenaga kesehatan secara merata.

Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kesakitan, Prevalensi Balita Kurang Gizi, dan indikator lain yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan seperti persentase balita yang persalinannya ditolong oleh tenaga medis, persentase penduduk yang berobat jalan ke rumah sakit, dokter/klinik, puskesmas, dan lainnya, serta rasio tenaga kesehatan per penduduk.

## Derajat Kesehatan Masyarakat

Derajat kesehatan penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta secara umum semakin meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini ditandai dengan semakin menurunnya angka kematian bayi dan meningkatnya angka harapan hidup penduduk pada saat lahir.

Berdasarkan data hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) dan hasil Sensus Penduduk, Angka Kematian Bayi di DIY menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi. Angka

kematian bayi pada tahun 2000 tercatat sebesar 24, artinya ada 24 kasus kematian bayi untuk 1000 kelahiran hidup. Angka ini mengalami sedikit penurunan secara bertahap menjadi 20 (hasil SDKI 2002) dan 19 (hasil SDKI 2007) dan 16 (hasil SP 2010). Namun demikian, hasil SDKI 2012 menunjukkan jumlah kasus kematian bayi meningkat menjadi 25 kasus per 1000 kelahiran hidup. Secara umum, kasus kematian bayi sebagian besar terjadi pada bulan pertama setelah kelahiran bayi (kematian neonatal). Hal ini membawa implikasi terkait pentingnya penanganan persalinan dan perawatan bayi oleh tenaga penolong terdidik dan pentingnya upaya peningkatan pengetahuan ibu tentang perawatan bayi pasca kelahiran maupun selama masa kehamilan.

Gambar 2.1. Perkembangan Angka Kematian Bayi di DIY, 2000-2012

Figure 2.1. Trend of Infant Mortality Rate in DIY, 2000-2012



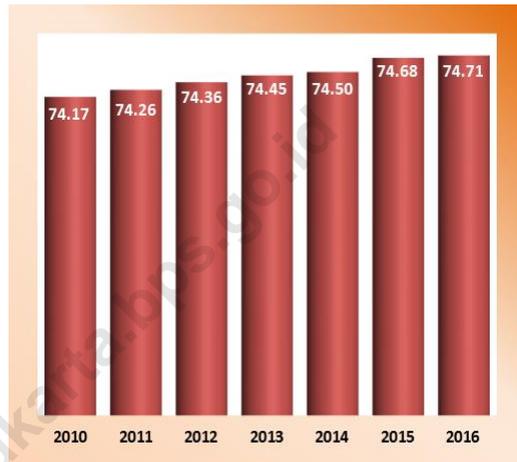
Sumber : BPS DIY, Beberapa Terbitan  
Source : BPS DIY, Some Publications

Meningkatnya derajat kesehatan juga akan ditandai oleh bertambahnya usia harapan hidup penduduk pada saat lahir. Angka harapan hidup penduduk DIY menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Pada tahun 2010, angka harapan hidup tercatat sebesar 74,17. Angka ini menggambarkan perkiraan rata-rata usia

yang akan dijalani oleh seorang bayi yang dilahirkan hidup pada tahun 2010 hingga akhir hayatnya.

Gambar 2.2. Perkembangan Angka Harapan Hidup Penduduk DIY, 2000-2012

Figure 2.2. Trend of Life Expectancy in DIY, 2000-2012



Sumber : BPS DIY, Beberapa Terbitan  
Source : BPS DIY, Some Publications

Secara bertahap usia harapan hidup semakin meningkat hingga mencapai level 74,71 tahun pada tahun 2016. Dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia, angka harapan hidup penduduk DIY tercatat berada pada level yang tertinggi. Tingginya usia harapan hidup DIY didorong oleh gaya hidup yang *low profile* dan perbaikan kualitas kesehatan penduduk secara umum. Perbaikan kualitas kesehatan ini ditandai oleh kemudahan dalam mengakses sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan kualitas asupan gizi, dan berkurangnya angka kesakitan.

### Penolong Persalinan

Kesehatan balita tidak hanya dipengaruhi oleh kesehatan ibu semasa kehamilan. Kesehatan balita juga dipengaruhi pula oleh faktor lain, seperti dipengaruhi pula oleh faktor lain, seperti proses kelahiran/persalinan serta kondisi lingkungan tempat tinggal. Data penolong kelahiran bayi dapat dijadikan salah satu

indikator kesehatan, terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum.

Gambar 2.3. Persentase Balita menurut Penolong Kelahiran Terakhir, 2010 – 2016

Figure 2.3. Percentage of Children Under Fives by First Birth Attendant, 2010-2016



Sumber : BPS, Susenas 2010-2016  
Source : BPS, 2010-2016 National Socio Economic Survey

Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, seperti dokter atau bidan, dianggap lebih baik dan lebih aman dibandingkan dengan yang ditolong dukun atau lainnya. Hal ini juga dapat menggambarkan tingkat kemajuan pelayanan kesehatan terutama pada saat kelahiran. Perkembangan data proporsi balita menurut penolong persalinan terakhir dalam tujuh tahun terakhir menunjukkan bahwa mayoritas persalinan telah ditangani oleh tenaga kesehatan. Proporsinya sudah mendekati 100 persen. Kondisi tahun 2016, 98,43 persen persalinan telah ditolong atau ditangani oleh tenaga medis.

Tabel 2.1 memperlihatkan bahwa pada 2016 proses persalinan di DIY yang ditolong oleh dokter mencapai 52,97 persen. Proporsi terbesar berikutnya adalah persalinan yang ditangani oleh bidang sebesar 44,78 persen dan 0,67 persen

persalinan dilangani oleh oleh tenaga medis lainnya. Artinya, persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan mencapai 98,43 persen dari jumlah seluruh persalinan. Sedangkan persalinan yang ditolong dengan tenaga non kesehatan (dukun dan lainnya) sekitar 1,57 persen.

Tabel 2.1. Persentase Balita menurut Penolong Kelahiran Terakhir di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2016

Table 2.1. Percentage of Children Under Five by First Birth Attendant in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2016

Tahun Year	Penolong Kelahiran /Birth Attendant				
	Dokter Doctor	Bidan/ Midwife	Tenaga Medis lain/ Others Medical Personnel	Dukun/ Traditional Birth Attendant	Lainnya/ Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2013	42,74	56,35	0,49	0,35	0,08
2014	40,07	59,70	0,07	0,10	0,06
2015	57,00	41,06	1,43	0,51	0,00
2016	52,97	44,78	0,67	1,57	0,00

Sumber : BPS, Susenas 2013-2016  
Source : BPS, 2013-2016 National Socio Economic Survey

Berdasarkan data Susenas bulan Maret 2016, sebagian besar proses persalinan dilakukan di RS/RS bersali. Proporsi terbesar berikutnya adalah persalinan di klinik/bidan/praktek dokter dan diikuti oleh Puskesmas/Polindes/Pustu. Fenomena ini menggambarkan sebagian besar rumah tangga sudah memiliki kemudahan dalam mengakses sarana kesehatan yang tersedia, terutama sarana persalinan.

Peningkatan derajat dan status kesehatan tidak terlepas dari ketersediaan dan keterjangkauan sarana dan prasarana kesehatan seperti fasilitas tempat berobat dan tenaga kesehatan yang tersedia. Pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses terhadap tenaga kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah maupun kualitasnya.

## Air Susu Ibu

Peran ibu dalam menunjang kesehatan balita dapat dikaji menggunakan indikator lamanya menyusui anak berusia 2-4 tahun. Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan yang paling penting bagi pertumbuhan dan kesehatan bayi, karena mengandung gizi yang tinggi dan zat pembentuk kekebalan tubuh dari berbagai macam penyakit. Manfaat lain yang diperoleh dari pemberian ASI antara lain dapat menumbuhkan ikatan batin dan kasih sayang antara ibu dan anak. Semakin lama pemberian ASI cenderung membuat daya tahan tubuh anak balitanya semakin baik.

Tabel 2.2. Persentase Anak Usia di Bawah 2 Tahun yang Pernah Diberi ASI di DIY, 2014 – 2016

Table 2.2. *Percentage of Children Under Two Years Who Had Been Given Breast Milk in DIY, 2014-2016*

Tahun/ Year	Wilayah /Area		K+D/ Urban+Rural
	Perkotaan/ Urban	Perdesaan/ Rural	
(1)	(2)	(3)	(4)
2014	98,83	98,34	98,67
2015	97,28	100	98,07
2016	99,10	96,99	98,52

Sumber : BPS, Susenas , 2012-2014  
Source : BPS, 2012-2014 National Socio Economic Survey

Tabel 2.2 menyajikan data proporsi anak berusia di bawah dua tahun yang pernah diberi asupan ASI. Secara umum, mayoritas anak berusia di bawah dua tahun telah menerima asupan ASI. Proporsi selama tiga tahun terakhir sudah berada di atas 98 persen. Artinya, masih ada sekitar 1-2 persen anak yang belum pernah menerima pemberian ASI. Proporsi ini yang seharusnya mendapat perhatian lebih besar untuk sosialisasi pentingnya ASI dan perlu digali lebih dalam alasan tidak memberi asupan ASI kepada bayi dan balitanya. Sementara, proporsi anak di bawah dua tahun yang

masih menerima asupan ASI pada saat periode pendataan jumlahnya lebih dari 85 persen.

Tabel 2.3 menunjukkan distribusi balita berumur 2-4 tahun menurut lamanya disusui dalam satuan bulan selama periode 2012-2014. Secara Rata-rata, lama pemberian ASI kepada balita di DIY sudah cukup tinggi. Balita berusia 2-4 tahun yang disusui lebih dari 24 bulan persentasenya mengalami peningkatan dari 61,84 persen di tahun 2013 menjadi 68,73 persen di tahun 2014. Secara rata-rata, lamanya periode pemberian ASI mencapai 18 bulan. Hal ini menjadi gambaran yang cukup baik yang merepresentasikan peningkatan pemahaman ibu terkait manfaat pemberian ASI.

Tabel 2.3. Persentase Balita Usia 2-4 tahun menurut Lamanya Disusui di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012 – 2014

Table 2.3. *Percentage of Children Under Fives (2-4 years) by the Length of Feeding (Month) in DIY, 2012-2014*

Tahun/ Year	Lamanya Disusui (bulan) / The Length of Feeding ( month )				
	≤5	6-11	12-17	18-23	≥24
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2012	7,08	5,19	12,32	20,51	54,90
2013	5,33	4,92	7,62	20,30	61,84
2014	6,04	3,24	7,69	14,30	68,73

Sumber : BPS, Susenas , 2012-2014  
Source : BPS, 2012-2014 National Socio Economic Survey

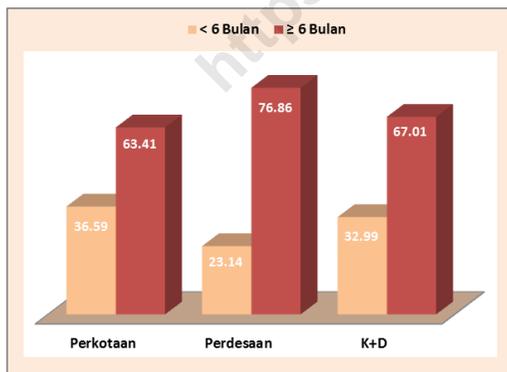
Periode pemberian ASI bagi bayi dapat dibagi menjadi dua, yakni ASI saja tanpa makanan tambahan (ASI Eksklusif) dan ASI dengan makanan tambahan. Berdasarkan ketentuan dari Kementerian Kesehatan lama pemberian ASI eksklusif adalah enam bulan pertama pasca kelahiran. Semakin besar proporsi bayi yang memperoleh ASI eksklusif menggambarkan pengetahuan ibu tentang gizi dan kesehatan bayi yang semakin meningkat. Pada akhirnya

pengetahuan ini akan memberi pengaruh terhadap kekebalan bayi terhadap penyakit dan mengurangi kasus kematian bayi.

Berdasarkan data Susenas Maret 2016, anak berusia 6-24 bulan sebagian besar telah menerima asupan ASI eksklusif dengan periode yang bervariasi. Secara rata-rata, periode pemberian ASI eksklusif tercatat sebesar 5,38 bulan. Artinya sudah mendekati ketentuan Kementerian Kesehatan yakni enam bulan. Rata-rata di daerah perdesaan (5,75 bulan) tercatat lebih tinggi dari daerah perkotaan (5,25 bulan). Perbedaan ini disebabkan oleh faktor perempuan yang aktif dalam pasar tenaga kerja formal sebagai pekerja penuh di perkotaan yang cenderung lebih besar dari daerah perdesaan. Mereka memiliki waktu lebih pendek untuk merawat bayi dibandingkan dengan penduduk perdesaan.

Gambar 2.4. Persentase Anak Usia 6-24 Bulan Menurut Periode Pemberian ASI Eksklusif di DIY, 2016

Figure 2.4. *Percentage of Children (6-24 Months) by Period of Exclusive Breast Milk in DIY, 2016*



Sumber : BPS, Susenas, 2016  
 Source : BPS, 2016 National Socio Economic Survey

Proporsi anak berusia 6-24 bulan di DIY yang diberi ASI eksklusif lebih selama enam bulan atau lebih mencapai 67,01 persen. Sisanya, sebanyak 32,99 persen diberi ASI eksklusif dengan periode pemberian kurang dari 6 bulan. Proporsi anak yang diberi ASI eksklusif selama 6

bulan atau lebih di daerah perdesaan terlihat jauh lebih besar dibandingkan dengan daerah perkotaan.

### Imunisasi

Selain pemberian ASI, imunisasi juga berperan dalam membentuk ketahanan tubuh anak dari serangan penyakit. Kementerian Kesehatan menganjurkan agar semua anak-anak dapat memperoleh imunisasi secara lengkap. Anak yang mendapat imunisasi dasar lengkap akan terlindungi dari beberapa penyakit berbahaya dan akan mencegah penularan kepada orang di sekitarnya. Jenis imunisasi yang wajib diberikan pada balita adalah BCG, DTP, Polio, Campak/Morbili, dan Hepatitis B.

Dalam Susenas pertanyaan mengenai imunisasi ditanyakan kepada anggota rumah tangga berusia 0-59 bulan. Mekanisme penggalan data ditanyakan kepada orang tua atau anggota rumah tangga yang mengetahui riwayat imunisasi berdasarkan catatan dalam kartu imunisasi atau wawancara jika tidak memiliki/tidak dapat menunjukkan kartu imunisasi. Namun demikian, data yang disajikan dalam publikasi ini dipilih dari anggota rumah tangga yang berusia 12-59 bulan. Pertimbangannya adalah imunisasi dasar tersebut diberikan dalam jangka waktu kurang dari satu tahun, sehingga proses pemberian imunisasi kepada balita yang berusia kurang dari satu tahun belum bisa dievaluasi.

Berdasarkan hasil Susenas bulan Maret 2016, proporsi balita berusia 12-59 bulan yang diimunisasi tercatat mencapai 97,55 persen. Sedangkan sisanya, sebanyak 2,0 persen berstatus belum/tidak diimunisasi dan 0,45 persen responden menjawab tidak tahu mengenai riwayat imunisasi balita yang ada dalam rumah tangganya. Secara umum, tidak ada perbedaan yang mencolok terkait proporsi balita yang diberi imunisasi di wilayah perkotaan dan perdesaan. Levelnya 97,02 persen untuk wilayah perkotaan dan

98,93 persen untuk wilayah perdesaan. Sayangnya, belum ada informasi tambahan dalam Susenas mengenai alasan balita yang tidak diimunisasi.

Gambar 2.5. Persentase Anak Berusia 12-59 Bulan yang Diberi Imunisasi di DIY, 2016

Figure 2.5. Percentage of Children Aged 12-59 Months Had Vaccinated by Area in DIY, 2016



Sumber : BPS, Susenas , 2016  
Source : BPS, 2016 National Socio Economic Survey

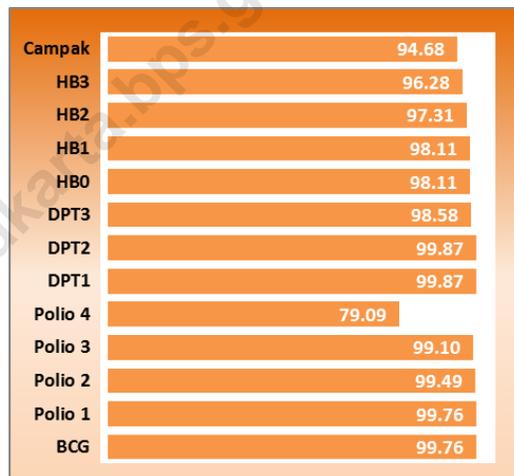
Proporsi balita usia 12-59 bulan yang memiliki kartu imunisasi dan mampu menunjukkannya tercatat sebesar 73,36 persen. Sisanya, sebanyak 22,76 persen mengaku memiliki kartu tetapi tidak bisa menunjukkan dan 3,88 tidak memiliki kartu imunisasi. Berdasarkan data dari balita yang memiliki kartu imunisasi, tercatat sebanyak 76,23 persen balita sudah menerima imunisasi dasar secara lengkap (13 jenis imunisasi). Sementara, 23,77 persen sisanya belum menerima imunisasi dasar secara lengkap. Imunisasi dasar dianggap tidak lengkap jika ada salah satu dari 13 jenis imunisasi yang belum diberikan.

Secara umum, proporsi pemberian imunisasi kepada balita usia 12-59 bulan yang memiliki kartu imunisasi menurut jenis imunisasi diringkas dalam Gambar 2.6. Jenis imunisasi yang paling banyak terlewat adalah Polio 4. Proporsi balita yang diberi imunisasi Polio 4 hanya mencapai 79,09 persen.

Berikutnya adalah imunisasi campak/MMR dengan proporsi 94,68 persen. Diperlukan upaya sosialisasi secara lebih masif terutama imunisasi Polio 4 dan campak. Sementara, jenis imunisasi dasar lain yang diberikan sudah relatif tinggi dengan proporsi mendekati angka 100 persen.

Gambar 2.6. Persentase Balita Berusia 12-59 Bulan di DIY yang Diberi Imunisasi menurut Jenis Imunisasi, 2016

Figure 2.6. Percentage of Children Aged 12-59 Months Had Vaccinated by Type of Vaccination in DIY, 2016

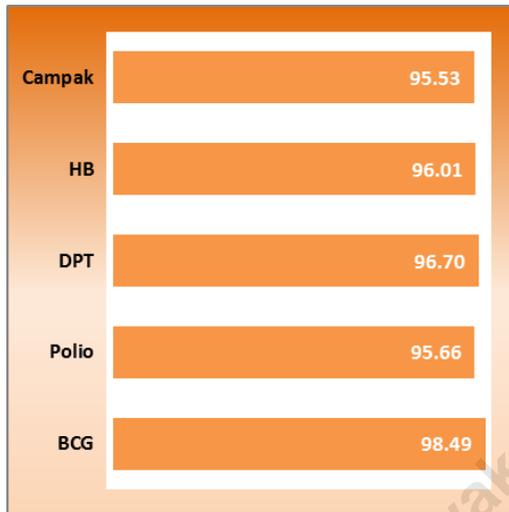


Sumber : BPS, Susenas , 2016  
Source : BPS, 2016 National Socio Economic Survey

Proporsi balita usia 12-59 bulan yang tidak memiliki kartu imunisasi tetapi mendapat imunisasi tercatat sebesar 90,8 persen. Sisanya, sebanyak 7,5 persen tidak/belum mendapat imunisasi dan 1,69 persen menjawab tidak tahu. Secara umum, komposisi pemberian imunisasi menurut jenis imunisasi disajikan dalam Gambar 2.7. Semua jenis imunisasi yang diberikan memiliki proporsi di atas 95 persen. Proporsi terendah adalah campak/MMR sebesar 95,53 persen dan tertinggi BCG 98,49 persen. Namun demikian, belum dapat disimpulkan seberapa banyak yang memperoleh imunisasi dasar secara lengkap karena rincian menurut 13 jenis imunisasi tidak dapat digali secara lebih detail.

Gambar 2.7. Persentase Balita Berusia 12-59 Bulan (Tidak Memiliki Kartu) di DIY yang Diberi Imunisasi menurut Jenis Imunisasi, 2016

Figure 2.7. Percentage of Children Aged 12-59 Months (No Card) Had Vaccinated by Type of Vaccination , 2016



Sumber : BPS, Susenas, 2016  
 Source : BPS, 2016 National Socio Economic Survey

### Keluhan Kesehatan

Derajat kesehatan penduduk dapat dilihat dari tingkat *morbiditas* (angka kesakitan) yang menunjukkan ada tidaknya keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Keluhan dimaksud mengindikasikan adanya suatu penyakit tertentu.

*Morbiditas* atau angka kesakitan diukur menggunakan proporsi penduduk yang mengeluh sakit pada selang waktu tertentu. Dalam Susenas yang dilaksanakan oleh BPS, keluhan kesehatan yang dimaksud mencakup: panas, batuk, pilek, asma/sesak nafas, diare/buang-buang air, sakit kepala, sakit gigi, campak, dan lain-lain. Referensi yang digunakan dalam Susenas adalah sebulan sebelum pencacahan. Semakin tinggi angka morbiditas menunjukkan semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan.

Tabel 2.4 menyajikan besarnya persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir referensi pencacahan menurut wilayah dan jenis kelamin. Jenis keluhan kesehatan yang paling banyak dirasakan oleh penduduk adalah batuk, pilek dan panas. Besarnya proporsi penduduk DIY yang mengalami keluhan kesehatan selama sebulan terakhir referensi pencacahan bulan Maret 2016 mencapai 45,98 persen. Dibandingkan dengan kondisi Maret 2015 (39,58 persen), keluhan kesehatan yang dialami penduduk sedikit menurun. Artinya, ada penurunan morbiditas atau terjadi peningkatan kualitas kesehatan penduduk secara umum.

Berdasarkan wilayah, angka keluhan kesehatan penduduk perkotaan selama 2015 dan 2016 tercatat lebih rendah dari penduduk perdesaan. Artinya, kualitas kesehatan penduduk perkotaan secara umum relatif lebih baik dibandingkan dengan penduduk perdesaan. Namun demikian, angka keluhan kesehatan di kedua wilayah baik perkotaan maupun perdesaan selama 2016 tercatat semakin menurun dibandingkan dengan kondisi 2015.

Tabel 2.4. Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan yang Lalu di D.I Yogyakarta, 2015-2016

Table 2.4. Percentage of Population Who Had Health Complaint During the Previous Month in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2015-2016

Rincian/ Details		Tahun/ Year	
		2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Wilayah/ Area	Perkotaan/ Urban	38,48	35,32
	Perdesaan/ Rural	41,77	37,38
	K+D/ Urban+Rural	39,58	35,98
Jenis Kelamin/ Sex	Laki-laki/ Male	38,93	34,50
	Perempuan/ Female	40,22	37,42
	L+P/ Male+Female	39,58	35,98

Sumber : BPS, Susenas Maret 2015-2016  
 Source : BPS, 2015-2016 National Socio Economic Survey

Berdasarkan jenis kelamin, proporsi penduduk perempuan yang mengalami keluhan kesehatan tercatat lebih tinggi dari proporsi penduduk laki-laki selama 2015 dan 2016. Hal ini menggambarkan fenomena penduduk perempuan yang lebih rentan mengalami gangguan kesehatan.

Proporsi penduduk yang mengalami keluhan kesehatan sampai terganggu aktivitas sehari-harinya (pekerjaan, sekolah, dan lainnya) pada kondisi Maret 2016 tercatat sebesar 47,77 persen. Proporsi ini sedikit menurun dibandingkan dengan kondisi Maret 2015 (48,16%). Namun demikian, lamanya hari terganggu justru meningkat dari 5,36 hari menjadi 5,44 hari. Sementara, proporsi penduduk yang mengalami keluhan kesehatan sampai kondisi parah tercatat sebesar 22,43 persen. Angka ini lebih meningkat dibandingkan kondisi tahun 2015 (18,71 persen).

Tabel 2.5. Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Terganggu Aktivasinya Selama Sebulan yang Lalu di D.I Yogyakarta, 2015-2016

Table 2.5. Percentage of Population Who Had Health Complaint and Disturb Activities During the Previous Month in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2015-2016

Rincian/ Details		2015		2016	
		Aktivitas Terganggu/ Disturb Activity (%)	Lama Hari/ Long Days	Aktivitas Terganggu/ Disturb Activity (%)	Lama Hari/ Long Days
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)
Wilayah/ Area	K/ Urban	45,92	5,34	45,75	5,52
	D/ Rural	52,25	5,40	51,83	5,31
	K+D	48,16	5,36	47,77	5,44
Jenis Kelamin/ Sex	L/ Male	50,28	5,41	47,84	5,22
	P/ Female	46,16	5,31	47,70	5,64
	L+P	48,16	5,36	47,77	5,44

Sumber : BPS, Susenas Maret 2015-2016  
 Source : BPS, 2015-2016 National Socio Economic Survey

Perbandingan menurut wilayah menunjukkan bahwa proporsi penduduk yang mengalami keluhan kesehatan sampai terganggu aktivitasnya di daerah perdesaan cenderung lebih tinggi dari perkotaan. Tetapi, rata-rata lama hari terganggu di daerah perkotaan tercatat lebih lama dibandingkan penduduk perdesaan. Sementara, perbandingan menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa proporsi laki-laki yang mengalami keluhan kesehatan sampai terganggu aktivitasnya tercatat lebih tinggi dari perempuan.

### Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan

Untuk meningkatkan kualitas kesehatan penduduk, pemerintah telah berupaya menyediakan sarana dan prasarana kesehatan dasar yang representatif, murah, dan mudah dijangkau. Upaya ini juga didukung oleh peran pihak swasta. Penyediaan fasilitas kesehatan juga disertai dengan distribusi tenaga kesehatan yang memadai, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas

Penduduk DIY yang mengalami gangguan kesehatan pada umumnya melakukan upaya pengobatan. Pada kondisi Maret 2016, sebanyak 54,40 persen penduduk yang mengalami keluhan kesehatan tercatat berobat secara rawat jalan. Sisanya, sebanyak 45,60 persen penduduk yang tidak melakukan upaya pengobatan rawat jalan. Alasan mereka yang tidak berobat jalan adalah melakukan mengobati sendiri (62,42 persen) dan merasa tidak perlu berobat (33,88 persen). Alasan lainnya adalah tidak punya biaya berobat, tidak ada biaya transportasi, tidak ada sarana transportasi dan dikarenakan waktu tunggu pelayanan yang lama. Tetapi, proporsinya sangat kecil (dibawah satu persen).

Penduduk yang berobat jalan pada umumnya memanfaatkan fasilitas berobat ke praktek dokter/bidan/klinik. Proporsi pada tahun 2016 tercatat sebesar 49,75 persen dan

relatif menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Proporsi terbesar berikutnya adalah berobat ke puskesmas dan rumah sakit baik pemerintah maupun swasta. Proporsi penduduk yang berobat ke puskesmas dan rumah sakit tercatat semakin meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara, proporsi penduduk yang berobat ke praktek Batra dan lainnya relatif kecil dan tercatat semakin menurun. Secara umum, ada perubahan orientasi tempat berobat secara jalan dari praktek dokter/klinik menuju puskesmas dan rumah sakit. Implementasi sistem jaminan kesehatan melalui BPJS yang semakin masif menjadi salah satu penyebab perpindahan orientasi penduduk DIY dalam berobat jalan.

Tabel 2.6. Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2016

*Table 2.6 Percentage of Population Treated Outpatient by Place/Method of Medical in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2016*

Tempat Berobat/ (1)	Tahun/Year			
	2013 (2)	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)
Rumah Sakit/ <i>Hospital</i>	19,24	18,29	21,03	23,49
Praktek Dokter-Petugas Kesehatan/ <i>Medical Doctor-Paramedical</i>	54,7	57,35	55,55	49,75
Puskesmas/ <i>Health Centre</i>	32,12	28,39	27,18	30,75
Praktek Batra/ <i>Medical Traditional</i>	2,45	1,33	2,00	1,70
Lainnya/ <i>Others</i>	2,74	1,76	0,82	0,68

Sumber : BPS, Susenas , 2013-2016

Source : BPS, 2013-2016 *National Socio Economic Survey*

Berdasarkan hasil Susenas 2016, tercatat sebanyak 44 persen penduduk yang

berobat jalan telah memanfaatkan fasilitas kartu jaminan kesehatan yang dimiliki. Angka ini meningkat cukup nyata dibandingkan dengan proporsi tahun 2015 yang mencapai 36,48 persen. Jenis jaminan kesehatan yang dimiliki oleh sebagian besar penduduk adalah jamkesmas dan diikuti oleh jamkesda, Askes/Asabri, BPJS kesehatan, dan lainnya. Sementara, masih terdapat 27,07 penduduk DIY yang tercatat belum memiliki kartu jaminan kesehatan. Proporsi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah melalui BPJS agar visi untuk menjamin kesehatan penduduk secara berkualitas, mudah, dan murah bisa benar-benar terlaksana dengan baik.

Selain melakukan pengobatan jalan, upaya yang dilakukan oleh penduduk yang mengalami keluhan kesehatan adalah melakukan pengobatan secara rawat inap. Berdasarkan hasil Susenas Maret 2016, proporsi penduduk yang melakukan rawat inap selama setahun terakhir referensi pencacahan tercatat mencapai 5,81 persen. Angka ini sedikit meningkat dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar 5,36 persen. Secara demografis, proporsi penduduk yang berobat rawat inap didominasi oleh penduduk yang tinggal di daerah perkotaan dan penduduk perempuan. Secara rata-rata, lama perawatan secara inap tercatat selama 5-6 hari dan sedikit lebih lama dibandingkan dengan tahun 2015.

Fasilitas rawat inap yang paling banyak digunakan penduduk DIY adalah rumah sakit dengan proporsi pengguna mencapai mencapai 90,11 persen. Jika dirinci maka RS pemerintah mencapai 31,13 persen dan RS swasta mencapai 58,98 persen. Fasilitas berikutnya adalah rawat inap di puskesmas dan klinik/dokter.

# Kesejahteraan yang Meningkat akan Ditandai oleh Peningkatan Kualitas Kesehatan Penduduk

Angka kesakitan diukur menggunakan proporsi penduduk yang mengalami keluhan kesehatan (panas, batuk, pilek, diare, pusing, dsb) selama sebulan terakhir dari referensi pendataan



35,98 %

Penduduk mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir



Penduduk yang mengalami keluhan kesehatan terganggu aktivitasnya

47,77 %



23,5% berobat di rumah sakit



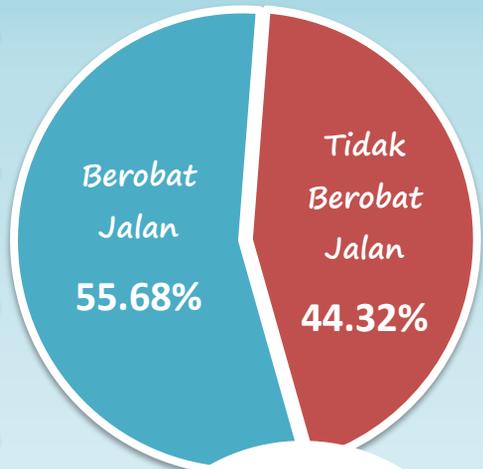
49,8% berobat di rumah sakit



30,8% berobat di rumah sakit



2,4% berobat di rumah sakit



“Alasan penduduk yang tidak berobat adalah mengobati sendiri dan merasa tidak perlu berobat. Alasan penduduk tidak berobat karena kesulitan akses kurang dari 1 % “

Angka keluhan kesehatan penduduk DIY tahun 2016 lebih menurun dibandingkan dengan tahun 2015 (39,6%)

# Bab 3 *Pendidikan* Education

---

Salah satu tujuan negara yang diamanahkan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Langkah yang ditempuh untuk mewujudkannya melalui jalur pendidikan, baik formal maupun non formal. Pendidikan merupakan bentuk investasi sumber daya manusia yang sama pentingnya dengan investasi modal fisik untuk mencapai tujuan ekonomi jangka panjang suatu negara (Mankiw, 2007). Output dari proses pendidikan adalah untuk menambah dan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, kemandirian dan kepribadian yang merupakan modal dasar yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan. Menurut Todaro (2004), pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar dan pendidikan adalah hal pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga. Pendidikan bukan hanya sekedar hak azasi manusia, tetapi juga sebagai alat strategis untuk membangun masyarakat dan meningkatkan kesejahteraannya.

Pendidikan merupakan penyediaan barang publik sehingga membutuhkan campur tangan pemerintah. Kebijakan fiskal diyakini merupakan intervensi pemerintah melalui pengeluaran pemerintah untuk pemenuhan pelayanan publik. Pelayanan publik seperti pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar harus disediakan oleh pemerintah baik infrastruktur, pengajar, kegiatan belajar mengajar, maupun pembiayaannya. Meskipun demikian, seiring dengan perkembangan pihak swasta juga bisa turut berpartisipasi dalam pengelolaan pendidikan mulai pra sekolah sampai pendidikan tinggi. Pengeluaran pemerintah dalam pelayanan kebutuhan dasar yang di antaranya untuk pendidikan, merupakan bentuk investasi terhadap sumber daya manusia karena dapat meningkatkan

produktivitas masyarakat. Harapannya dengan produktivitas yang semakin tinggi maka pendapatan yang diterima masyarakat meningkat dan kesejahteraannya juga akan terangkat.

Dalam beberapa tahun mendatang pembangunan pendidikan nasional di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan serius. Dalam upaya meningkatkan kinerja pendidikan, tantangan tersebut mencakup: (a) pemerataan dan perluasan akses; (b) peningkatan mutu, relevansi dan daya saing; (c) penataan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik; dan (d) peningkatan pembiayaan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 ada beberapa sasaran pembangunan bidang pendidikan yang ingin dicapai melalui Program Indonesia Pintar dengan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. Sasaran tersebut antara lain ditandai oleh meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah; meningkatnya angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya angka melanjutkan; meningkatnya kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Sasaran yang lain adalah meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan, tersedianya kurikulum yang andal, dan tersedianya sistem penilaian pendidikan yang komprehensif; serta meningkatnya dan meratanya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Beberapa indikator output yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan kualitas pendidikan SDM antara lain adalah Angka Melek Huruf (AMH),

tingkat pendidikan tertinggi penduduk, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Sementara, indikator input pendidikan salah satunya adalah fasilitas pendidikan.

### Angka Melek Huruf (AMH)

Kegiatan membaca merupakan proses awal memasuki dunia pengetahuan yang begitu luas menuju masyarakat maju. Membaca akan mempermudah seseorang untuk memahami informasi terkait bidang kerja dan berbagai aspek yang menyangkut peningkatan kualitas hidup. Kemampuan baca-tulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang untuk dapat mencapai tujuan hidupnya. Hal ini berkaitan langsung dengan bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali potensinya dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Salah satu indikator mendasar yang digunakan untuk melihat tingkat kemampuan membaca dan menulis adalah Angka Melek Huruf (*Literacy Rate*). Kata “melek huruf” dapat diartikan sebagai kemampuan untuk dapat membaca dan menulis huruf latin/lainnya pada tingkat yang baik untuk berkomunikasi dengan orang lain atau dapat menyampaikan idenya dalam masyarakat yang mampu baca tulis (BPS, 2011). Angka Melek Huruf (AMH) adalah tolok ukur penting dalam mempertimbangkan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. AMH merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan bidang pendidikan.

Dalam Susenas, kemampuan baca tulis dibedakan menjadi huruf latin dan lainnya. Dalam masyarakat Indonesia, huruf latin masih merupakan satu-satunya huruf yang dominan digunakan, sehingga dalam uraian ini dititikberatkan pada kemampuan baca tulis huruf latin.

Penduduk usia 15 tahun ke atas merupakan masyarakat dewasa yang sudah seharusnya dapat membaca dan menulis.

Dalam kenyataannya, sampai dengan tahun 2016 masih ada sekitar 5,41 persen penduduk usia 15 tahun ke atas di DIY yang tidak dapat membaca dan atau menulis. Ini berarti angka melek hurufnya adalah sebesar 94,59 persen atau dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas sekitar 94-95 orang sudah mampu membaca dan menulis. Sedangkan sisanya 5-6 orang berstatus buta huruf atau tidak dapat membaca dan menulis huruf latin. Perkembangan AMH dalam beberapa tahun terakhir terlihat semakin meningkat secara bertahap.

Gambar 3.1. Angka Melek Huruf menurut Jenis Kelamin di DIY, 2013-2016

Figure 3.1. Literacy Rate by Sex in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2016



Sumber : BPS, Susenas 2013- 2016  
Source : BPS, 2013-2015 National Socio Economic Survey

Secara umum, angka melek huruf penduduk laki-laki relatif lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Level AMH penduduk laki-laki di tahun 2016 sebesar 97,21 persen. Sementara, level AMH penduduk perempuan sebesar 92,07 persen. Dalam beberapa tahun terakhir gap atau selisih AMH antara penduduk laki-laki dan perempuan terlihat semakin berkurang.

Perbandingan AMH menurut wilayah menunjukkan bahwa AMH penduduk perkotaan cenderung lebih tinggi dari AMH penduduk perkotaan. Sementara, jika dilihat menurut kelompok usia maka akan terlihat lebih jelas penyebab relatif rendahnya AMH di DIY disebabkan oleh persoalan rendahnya AMH pada kelompok usia tua (45 tahun ke

atas). Pada tahun 2016, proporsinya mencapai 87,37 persen. Sementara, AMH pada kelompok usia muda (15-44 tahun) sudah mendekati 100 persen, tepatnya 99,87 persen. Besarnya komposisi penduduk berusia tua akibat tingginya angka harapan hidup di satu sisi merupakan sebuah kelebihan. Namun, di sisi yang lain memberi persoalan pada tingginya angka buta huruf.

### Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

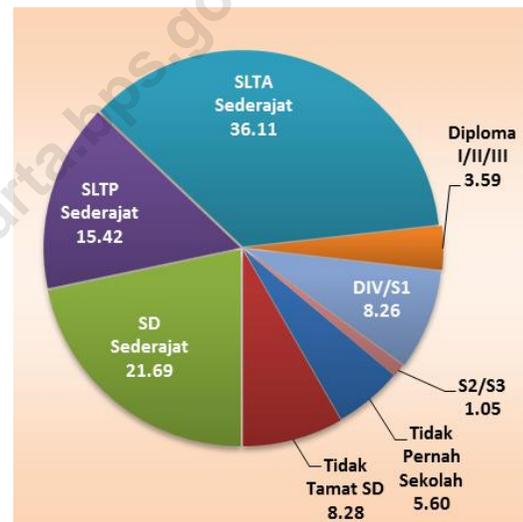
Daya saing suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dari kualitas SDM yang dimiliki sebagai salah satu modal dasar pembangunan bangsa. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin luas pengetahuan serta ketrampilan/keahlian yang tinggi. Semakin meningkat keterampilan/keahlian, maka semakin berkualitas modal yang dimiliki penduduk untuk bersaing dalam konstelasi tenaga kerja. Namun demikian, ijazah yang dimiliki terkadang bukan menjadi jaminan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Keterampilan dan keahlian yang dimiliki seseorang selalu perlu dilatih dan dipraktekkan dalam dunia kerja.

Gambar 3.2 mengilustrasikan komposisi jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas di DIY menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan berdasarkan hasil Susenas bulan Maret 2016. Secara umum, sebagian besar penduduk berusia kerja telah mengenyam pendidikan pada jenjang SLTA. Proporsi penduduk yang berpendidikan SLTA sederajat mencapai 36,11 persen. Komposisi terbesar berikutnya adalah penduduk yang berpendidikan SD sederajat dan SLTP dengan proporsi masing-masing mencapai 26,69 persen dan 15,42 persen. Penduduk yang berpendidikan diploma, sarjana, dan pasca sarjana tercatat sebesar 12,9 persen. Namun demikian, masih terdapat proporsi penduduk yang cukup besar yang berstatus tidak/belum tamat SD dan tidak/belum pernah sekolah. Proporsi

masing-masing mencapai 8,28 persen dan 5,60 persen. Secara umum, penduduk yang termasuk dalam kelompok ini didominasi oleh penduduk berusia tua dan sebagian besar tinggal di daerah perdesaan. Seiring dengan perkembangan waktu komposisi kelompok ini cenderung berkurang secara bertahap.

Gambar 3.2. Distribusi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas di DIY menurut Pendidikan Tertinggi, 2016 (%)

Figure 3.2. Population Distribution Over the Age of 15 According to The Highest Education, 2016 (%)



Sumber : BPS, Susenas Maret 2016  
Source : BPS, National Socio Economic Survey on March 2016

Komposisi penduduk berusia kerja berdasarkan pendidikan tertinggi dan jenis kelamin menunjukkan pola yang hampir sama. Baik laki-laki maupun perempuan didominasi oleh mereka yang berpendidikan SLTA ke atas. Proporsinya adalah 51,73 persen untuk laki-laki dan 46,41 persen untuk perempuan. Komposisi terbesar berikutnya adalah mereka yang berpendidikan SD sederajat dengan proporsi 22,42 persen untuk laki-laki dan 20,99 persen untuk perempuan.

Dibandingkan dengan tahun 2015, komposisi yang berpendidikan SLTA ke atas tercatat semakin meningkat dan proporsi yang berpendidikan SLTP sederajat semakin

menurun. Hal ini menggambarkan adanya kenaikan level pendidikan penduduk akibat meningkatnya partisipasi sekolah terutama pada tingkat menengah dan tinggi. Sementara, proporsi penduduk yang tidak/belum pernah sekolah dan belum/tidak tamat SD juga semakin berkurang, sementara penduduk yang tamat SD sederajat semakin meningkat. Hal ini juga menggambarkan adanya proses kenaikan level pendidikan penduduk akibat meningkatnya angka partisipasi pada jenjang pendidikan dasar.

Tabel 3.1. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di DIY, 2015 dan 2016

Table 3.1. Percentage of Population of 15 Years and Over by Educational Attainment and Sex in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2015 and 2016

Tingkat Pendidikan/ Education Attainment	Laki-laki/ Male		Perempuan, Female		L + P / M + F	
	2015	2016	2014	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tidak/belum pernah sekolah/ Not Yet Attending School	3,41	2,77	9,80	8,31	6,68	5,60
Tidak tamat SD/ Not Completed Primary School	6,97	7,19	8,98	9,32	8,00	8,28
SD/ Primary School	18,58	22,42	19,21	20,99	18,90	21,69
SLTP/Junior High School	20,79	15,89	17,93	14,97	19,32	15,42
SLTA ke atas/ Senior High School +	50,25	51,73	44,08	46,41	47,09	49,01

Sumber: BPS, Susenas 2014 - 2015  
Source: BPS, 2014- 2015, National Socio Economic Survey

### Angka Partisipasi Sekolah

Salah satu tujuan yang tertuang dalam *Millenium Development Goals (MDGs)* adalah menjamin bahwa sampai dengan tahun 2015 semua anak, di mana

pun, baik laki-laki maupun perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasar (*primary schooling*). Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai pencapaian MDG's. APS digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Berdasarkan hasil Susenas bulan Maret 2016, APS penduduk DIY memiliki pola semakin menurun seiring dengan peningkatan kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan (Tabel 3.3). Artinya, APS penduduk berusia 7-12 tahun > APS penduduk berusia 13-15 tahun > APS penduduk berusia 16-18 tahun > APS penduduk berusia 19-24 tahun. APS penduduk berusia 7-12 tahun dan 12-15 tahun sudah mendekati level 100 persen, tepatnya pada level 99,84 persen dan 99,62 persen. Angka tersebut menggambarkan besarnya proporsi penduduk berusia 7-12 dan 13-15 tahun yang berstatus sedang menempuh pendidikan pada berbagai tingkatan. Artinya masih ada sekitar 0,16 persen penduduk berusia 7-12 tahun dan 0,38 persen penduduk berusia 13-15 tahun yang statusnya belum bersekolah atau sudah tidak bersekolah lagi karena berbagai alasan. Alasan tersebut bisa berupa alasan ekonomi seperti persoalan mahal biaya dan membantu ekonomi keluarga maupun alasan non ekonomi seperti kesulitan mengakses sekolah atau tidak mampu mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah.

APS pada kelompok usia 16-18 tahun tercatat sebesar 87,2 persen, sementara APS kelompok usia 19-24 tahun tercatat sebesar 49,95 persen. Relatif rendahnya APS pada kedua kelompok umur disebabkan oleh banyak faktor. Faktor yang

paling berpengaruh adalah persoalan ekonomi, karena tidak semua biaya pendidikan di tingkat menengah dan tinggi dicover oleh pemerintah. Di samping itu, banyak juga penduduk pada kelompok usia tersebut yang sudah mulai masuk dalam pasar tenaga kerja (sebagai angkatan kerja) untuk membantu menopang ekonomi keluarga. Sementara, alasan non ekonomis sangat terkait dengan kesulitan untuk mengakses sarana pendidikan tingkat menengah dan tinggi, merasa tidak mampu mengikuti kegiatan belajar mengajar, serta cara pandang penduduk mengenai biaya dan manfaat yang diperoleh dari pendidikan yang dianggap belum setimpal.

Tabel 3.2 Angka Partisipasi Sekolah menurut Jenis Kelamin dan Usia Sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016

*Table 3.2 School Participation Ratio by Sex and Age Groups in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016*

Kelompok Umur/ Age group	Laki-laki/ Male	Perempuan/ Female	L + P / M + F
(1)	(2)	(3)	(4)
7-12	100	99,66	99,84
13-15	99,78	99,46	99,62
16-18	86,04	88,40	87,20
19-24	51,66	48,22	49,95

Sumber : BPS, Susenas Maret 2016

Source : BPS, National Socio Economic Survey on March 2016

Perbandingan APS menurut jenis kelamin tidak menunjukkan perbedaan yang nyata pada kelompok usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun. Perbedaan terlihat pada kelompok usia 16-18 atau pendidikan menengah, dimana partisipasi sekolah penduduk perempuan sudah melebihi partisipasi sekolah penduduk laki-laki. Artinya, ketimpangan gender dalam memperoleh akses pendidikan sampai level menengah sudah tidak terjadi. Pada kelompok usia 19-24 tahun, partisipasi sekolah penduduk laki-laki tercatat sedikit lebih tinggi dari penduduk perempuan.

Sementara, perbandingan APS menurut wilayah menunjukkan bahwa APS pada semua kelompok umur di daerah perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perdesaan.

### Angka Partisipasi Kasar

Indikator partisipasi sekolah yang lain adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapa pun usianya) terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Nilai APK suatu jenjang pendidikan bisa lebih dari 100 persen karena masih terdapat siswa yang berusia di luar batasan usia sekolah baik yang lebih tua maupun yang lebih muda. Hasil Susenas 2013-2016, menunjukkan bahwa APK di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tingkat pendidikan SD selalu berada di atas 100 persen. Hal ini berarti penduduk yang bersekolah pada jenjang SD tidak hanya penduduk yang berusia pendidikan SD (7-12 tahun), tetapi juga penduduk berusia di atas 12 tahun akibat terlambat masuk sekolah dan kasus tinggal kelas atau berusia di bawah 7 tahun karena masuk sekolah pada jenjang SD terlalu awal. Tetapi, hal ini tidak berarti bahwa penduduk usia 7-12 tahun sudah bersekolah semua, karena APK tidak dapat mencerminkan besaran anak usia 7-12 tahun yang belum pernah bersekolah.

APK SLTP pada kondisi Maret 2016 tercatat sebesar 93,15 persen. Hal ini berarti jumlah penduduk yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang SLTP proporsinya

hanya 93,15 persen dari jumlah penduduk pada kelompok usia SLTP. Kemungkinan terdapat penduduk berusia SLTP yang masih menempuh pendidikan di jenjang SD karena kasus terlambat sekolah dan tinggal kelas atau sudah bersekolah pada jenjang SLTA karena masuk sekolah terlalu muda.

Tabel 3.3 Angka Partisipasi Kasar menurut Jenis Kelamin dan Usia Sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2016

*Table 3.3 Gross Enrollment Ratio by Sex and Age Groups in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2016*

Tingkat Pendidikan/ Education Attainment	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD/Primary School	108,31	109,11	106,69	106,75
SLTP/Junior High School	83,54	90,66	97,88	93,15
SLTA /Senior High School	89,74	94,62	82,64	91,87

Sumber: BPS, Susenas 2013-2016  
Source: BPS, 2013-2016 National Socio Economic Survey

### Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) dihitung menggunakan persentase jumlah anak yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan atau mengakses fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Jika seluruh penduduk yang berusia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari nilai APK karena nilai APK juga

mencakup penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

Hasil Susenas 2016, menunjukkan bahwa nilai APM semakin menurun sejalan dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Artinya, APM SD < SLTP < SLTA. APM SD penduduk DIY pada tahun 2016 mencapai 99,21 persen. Angka ini menggambarkan besarnya proporsi penduduk berusia 7-12 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang SD. Artinya, masih ada 0,79 persen penduduk berusia 7-12 tahun yang tidak bersekolah pada jenjang SD. Jika lebih dirinci maka sebanyak 0,16 persen tercatat belum bersekolah di tingkat SD (terlambat masuk sekolah) dan 0,63 persen yang lain sudah bersekolah di jenjang SLTP karena terlalu dini masuk sekolah. Perkembangan APM SD selama empat tahun terakhir sudah berada pada level mendekati 100 persen, artinya sudah mendekati kondisi ideal.

Tabel 3.4. Angka Partisipasi Murni menurut Jenis Kelamin dan Usia Sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2016

*Table 3.4. Net Enrollment Ratio by Sex and Age Groups in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2016*

Tingkat Pendidikan/ Education Attainment	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD/Primary School	99,10	98,98	99,23	99,21
SLTP/Junior High School	81,81	82,20	82,86	83,05
SLTA /Senior High School	68,30	68,46	68,60	68,96

Sumber: BPS, Susenas 2013-2016  
Source: BPS, 2013-2016 National Socio Economic Survey

APM SLTP pada tahun 2016 tercatat sebesar 83,05 persen. Angka ini menggambarkan proporsi penduduk berusia 13-15 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang SLTP. Artinya, masih ada 16,95 persen penduduk berusia 13-15 tahun yang statusnya tidak bersekolah pada jenjang

SLTP. Jika dikaji lebih mendalam, maka tercatat sebanyak 7 persen penduduk berusia 13-15 tahun masih bersekolah pada jenjang SD karena kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah, 9,6 persen sedang bersekolah pada jenjang SLTA karena terlalu cepat masuk sekolah. Sementara, sisanya sebanyak 0,36 persen berstatus belum pernah bersekolah dan sudah tidak bersekolah lagi atau putus sekolah. Perkembangan APM SLTP selama empat tahun terakhir terlihat semakin meningkat yang mengindikasikan adanya proses perbaikan kualitas kegiatan belajar mengajar.

APM SLTA tercatat pada level 68,96 persen dan angka ini relatif stabil dalam empat tahun terakhir. Angka 68,96 persen ini menggambarkan proporsi penduduk berusia 16-18 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang SLTA. Artinya, masih ada 31,04 persen penduduk berusia 16-18 tahun yang sedang tidak bersekolah pada jenjang SLTA. Rinciannya adalah 9,98 persen masih bersekolah pada jenjang SLTP dan 9,54 persen sudah bersekolah pada jenjang perguruan tinggi. Sementara, 11,52 persen lainnya berstatus putus sekolah atau tidak mampu melanjutkan sekolah karena berbagai alasan baik motif ekonomi maupun non ekonomi. Perlu dikaji lebih mendalam terkait dengan penyebab tingginya angka putus sekolah pada kelompok usia 16-18 tahun agar proporsinya bisa dikurangi dari waktu ke waktu.

### Rata-rata Lama Sekolah

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan kualitas pendidikan dari sisi capaian adalah rata-rata lama sekolah penduduk. Indikator ini dihitung menggunakan referensi penduduk berusia 25 tahun ke atas. Asumsinya adalah kelompok penduduk ini telah menuntaskan masa pendidikan. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah penduduk menggambarkan stok modal manusia yang semakin meningkat. Harapannya adalah akan mampu meningkatkan produktivitas penduduk dan

pada akhirnya akan mengangkat kesejahteraan penduduk.

Perkembangan angka rata-rata lama sekolah penduduk DIY selama periode 2010-2016 terlihat semakin meningkat secara bertahap. Capaian pada tahun 2016 berada pada level 9,12 tahun. Artinya, rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas adalah 9 tahun atau setara dengan tamat SLTP. Secara umum, hal ini menggambarkan adanya peningkatan kualitas manusia dari sisi pendidikan.

Gambar 3.3. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Berusia 25 Tahun ke Atas di DIY, 2010-2016 (Tahun)

Figure 3.3. Mean Years of Schooling of Population Aged 25 Years and Over in DIY, 2010-2016 (Year)



Sumber : BPS, 2010-2016  
Source : BPS, 2010-2016

### Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan sebagai salah satu indikator input merupakan kekuatan awal dalam membangun kualitas SDM di bidang pendidikan. Ketersediaan sarana dan prasarana yang representatif akan mempengaruhi kualitas proses belajar mengajar dan pada akhirnya juga akan mempengaruhi output pendidikan. Ketersediaan guru atau kelas yang ideal untuk menangani sejumlah siswa tentu akan memacu kualitas keluaran yang maksimal. Sebaliknya, ketersediaan yang tidak

mencukupi akan memberikan kualitas hasil didik yang mungkin di bawah standar. Indikator untuk mengukur pemerataan dan perluasan akses pendidikan adalah rasio sekolah yang mencakup rasio murid guru dan rasio murid kelas. Fasilitas yang mencukupi akan mendorong peningkatan APS dan APM.

Tabel 3.5 menyajikan rasio beban kerja guru serta rata-rata kepadatan kelas pada suatu jenjang pendidikan. Secara umum, rasio murid-guru pada jenjang pendidikan SD, SLTP, maupun SLTA di wilayah DIY masih berada dalam taraf ideal. Artinya, masih memenuhi persyaratan bagi seorang guru untuk bisa mengawasi dan memberi perhatian kepada murid, mutu pengajaran tetap berjalan dengan baik. Demikian pula dengan kapasitas kelas, masih memenuhi taraf ideal untuk menampung jumlah peserta didik atau tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung secara optimal.

Pada tahun ajaran 2015/2016 rasio murid-guru pada tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK masing-masing tercatat sebesar 14, 13, 10, dan 9. Angka sebesar 14 pada level SD memiliki makna rata-rata seorang guru pada tingkat SD memiliki beban untuk mengawasi dan memberi pengajaran kepada 14 orang peserta didik. Angka rasio murid-guru semakin menurun seiring dengan peningkatan jenjang pendidikan. Dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya, rasio-murid-guru relatif stabil atau tidak mengalami perubahan secara nyata.

Tabel 3.5 Perkembangan Rasio Murid-Guru dan Rasio Murid-Kelas di D.I. Yogyakarta, 2011/2012-2015/2016

*Table 3.5 Trend of Pupil-Teacher Ratio and Pupil-Classroom Ratio in D.I. Yogyakarta, 2011/2012-2015/2016*

Rasio/ Ratio	Jenjang Pendidikan/ Education Attainment			
	Tahun/ Year	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Rasio Murid-Kelas/ Pupil-Classroom</b>				
2015/2016	21	28	25	30
2014/2015	21	29	29	26
2013/2014	21	27	26	26
2012/2013	21	29	26	27
2011/2012	18	28	27	29
<b>Rasio Murid-Guru/ Pupil-Teacher</b>				
2015/2016	14	13	10	9
2014/2015	14	12	9	9
2013/2014	13	12	9	9
2012/2013	13	12	9	10
2011/2012	13	11	9	10

Sumber: Dinas Pendidikan, Daerah Istimewa Yogyakarta  
Source: Education Services, Daerah Istimewa Yogyakarta Province

Sementara, rasio murid-kelas pada tiap jenjang pendidikan juga masih berada dalam taraf ideal. Pada tahun ajaran 2015/2016, angkanya sebesar 21, 28, 25, dan 30 murid per kelas untuk masing-masing jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, rasio murid kelas ini tidak mengalami perubahan secara nyata.

Tenaga kerja menjadi salah satu faktor produksi yang memiliki peran sentral dalam menggerakkan aktivitas perekonomian suatu wilayah. Tenaga kerja yang berkualitas atau terampil mampu menopang kelangsungan proses produksi barang dan jasa. Sementara, jiwa kewirausahaan yang dimiliki oleh penduduk usia kerja yang ditopang dengan kegiatan investasi akan mampu menciptakan kesempatan kerja baru yang dapat mendorong tumbuhnya perekonomian suatu wilayah.

Konsep ketenagakerjaan yang digunakan oleh BPS merujuk pada rekomendasi dari *International Labor Organization* (ILO) yang membagi penduduk berusia produktif (15 tahun ke atas) berdasarkan aktivitas utamanya menjadi dua kelompok yakni angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja mencakup penduduk berusia kerja yang berstatus bekerja dan pengangguran. Sementara, bukan angkatan kerja mencakup penduduk yang statusnya bersekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya.

Pertumbuhan angkatan kerja secara alamiah memiliki arah yang sama dengan pertumbuhan penduduk. Namun demikian, pertumbuhan penciptaan kesempatan kerja baru berjalan lebih lambat. Hal ini menyebabkan tidak semua angkatan kerja yang tersedia mampu diserap oleh pasar tenaga kerja. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja dan ketidakseimbangan ini memicu persoalan ketenagakerjaan yang serius seperti pengangguran, persoalan sektor informal, setengah pengangguran, tingkat upah, kualitas hidup pekerja, dan lainnya. Tingginya tingkat pengangguran dan setengah pengangguran merupakan

pemborosan sumber daya manusia yang menjadi beban keluarga dan masyarakat, menjadi sumber utama kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan tingkat kriminal, serta dapat menghambat kinerja pembangunan dalam jangka panjang.

Sasaran utama pembangunan di bidang ketenagakerjaan meliputi penciptaan lapangan kerja baru dengan jumlah dan kualitas yang memadai sehingga dapat menyerap angkatan kerja yang dapat memasuki pasar kerja. Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai indikator angkatan kerja di DIY. Beberapa indikator yang disajikan mencakup Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), serta karakteristik penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha, jumlah jam kerja, maupun status dalam pekerjaan utama.

#### Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur menggunakan proporsi jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas (penduduk usia kerja) yang masuk dalam pasar kerja, baik berstatus bekerja maupun penganggur. Indikator ini disebut Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK memperlihatkan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi serta menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk produksi barang-barang dan jasa dalam suatu kegiatan perekonomian.

TPAK DIY bulan Agustus 2016 tercatat sebesar 71,96 persen dan naik 3,57 poin persen dibandingkan dengan kondisi Agustus 2015



TPAK dihitung dan disajikan secara berkala pada dua titik, yakni bulan Februari dan Agustus setiap tahun. TPAK DIY pada kondisi bulan Agustus cenderung lebih rendah dibandingkan dengan bulan Februari. Hal ini disebabkan oleh siklus musiman budidaya tanaman pangan terutama padi yang mencapai puncak selama subround I (Januari-April) setiap tahun. Selama masa tersebut kesempatan kerja di sektor pertanian akan mengalami peningkatan.

Perkembangan TPAK DIY selama periode 2010-2016 berfluktuasi pada level 68-73 persen. TPAK DIY pada bulan Agustus 2016 tercatat sebesar 71,96 persen. Angka ini menggambarkan besarnya penduduk berusia kerja yang terlibat aktif dalam pasar tenaga kerja, baik berstatus bekerja maupun penganggur. TPAK DIY bulan Agustus 2016 ini tercatat sedikit meningkat dibandingkan dengan kondisi bulan Agustus 2015 yang mencapai 68,38 persen. Peningkatan ini didorong oleh peningkatan TPAK penduduk laki-laki maupun perempuan. Namun demikian, penurunan dan atau peningkatan TPAK tidak secara langsung menggambarkan kondisi baik/buruknya ketenagakerjaan suatu

wilayah. Penurunan TPAK, seperti yang digambarkan oleh tabel 4.1, perlu ditelusuri lebih jauh lagi, apakah dipengaruhi oleh tingkat pengangguran atau oleh tingkat penyerapan tenaga kerja (penduduk yang bekerja) untuk kurun waktu tersebut.

Pola perkembangan TPAK DIY menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa TPAK laki-laki cenderung lebih tinggi dari perempuan. TPAK laki-laki selama periode 2010-2016 berfluktuasi pada kisaran 77-84 persen, sementara TPAK perempuan berada pada kisaran 57-64 persen. Fenomena ini mengindikasikan keterlibatan penduduk laki-laki dalam aktivitas perekonomian lebih tinggi atau lebih dominan dibandingkan dengan penduduk perempuan. Hal ini terjadi karena pengaruh faktor budaya yang berkembang dalam masyarakat. Sebagian besar aktivitas mengurus rumah tangga pada umumnya dilakukan oleh perempuan. Di sisi yang lain, masih terdapat pandangan yang berkembang dalam masyarakat bahwa mencari nafkah adalah kewajiban dan tanggung jawab laki-laki. Dampaknya, secara proporsional perempuan yang masuk dalam angkatan kerja cenderung lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Tabel 4.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Jenis Kelamin dan Wilayah di D.I Yogyakarta, 2010 - 2016 (Persen)

Table 4.1. Labor Force Participation Rate in Daerah Istimewa Yogyakarta by Sex and Region, 2010 - 2016 (Percent)

Karakteristik	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		
	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Jenis Kelamin/ Sex	L/Male	80,18	78,62	81,17	81,67	80,84	80,84	79,72	77,95	77,70	80,93	83,95	79,95	81,33	82,24
	P/Female	62,65	61,35	65,08	59,62	62,17	62,62	60,73	61,01	66,24	61,60	62,72	57,30	63,45	62,10
	L+P	71,41	69,76	72,93	70,39	71,29	71,52	70,01	69,29	71,84	71,05	73,10	68,38	72,21	71,96
Wilayah/ Region	K/Urban	67,01	66,96	71,50	67,98	68,72	68,01	67,09	66,03	69,06	67,65	71,95	66,95	68,55	70,12
	D/Rural	77,99	73,84	75,78	75,19	76,42	78,52	75,85	75,80	77,39	77,85	76,20	71,77	81,09	76,44
	K+D	71,41	69,76	72,93	70,39	71,29	71,52	70,01	69,29	71,84	71,05	73,10	68,38	72,21	71,96

Sumber: Diolah dari data Sakernas  
Source: Based on National Labour Force Surveys

Perkembangan TPAK menurut wilayah menunjukkan kecenderungan TPAK perdesaan selalu lebih tinggi dari TPAK perkotaan. TPAK perdesaan berfluktuasi pada level 71-81 persen, sementara TPAK perkotaan berfluktuasi pada level 66-72 persen.

Lebih rendahnya TPAK perkotaan berkaitan dengan adanya kecenderungan penduduk perkotaan yang lebih memilih untuk menyelesaikan masa pendidikan sampai jenjang yang setinggi-tingginya sebelum memasuki pasar tenaga kerja. Mereka juga lebih selektif dalam memilih bidang pekerjaan yang sesuai keterampilan dan pendidikan yang dimiliki. Sementara, penduduk perdesaan memiliki lama bersekolah yang relatif lebih pendek. Mereka merasa sudah cukup untuk menyelesaikan jenjang pendidikan dasar atau menengah kemudian masuk pasar tenaga kerja untuk membantu ekonomi keluarga meski statusnya hanya sebagai pekerja keluarga atau bekerja di sektor informal dengan jumlah jam kerja yang relatif pendek. Lebih rendahnya TPAK perkotaan juga dipengaruhi oleh partisipasi perempuan. Keterlibatan perempuan di daerah perdesaan pada kegiatan perekonomian khususnya di sektor pertanian juga cukup masif, sementara perempuan di daerah perkotaan cenderung memilih untuk mengelola rumah tangga.

TPAK DIY menurut kelompok umur memiliki pola menyerupai huruf “U Terbalik”. TPAK rendah pada kelompok usia 15-24 tahun karena partisipasi sekolah masih tinggi, meningkat sampai level tertinggi pada kelompok usia 35-54 tahun, dan kembali menurun pada kelompok usia 55 tahun ke atas

### Tingkat Pengangguran Terbuka

Menganggur adalah kondisi seseorang yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan

suatu usaha. Termasuk dalam kategori menganggur adalah penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau putus asa (*discouraged workers*) atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja/mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (*future starts*).

Indikator yang digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT dihitung dari perbandingan antara banyaknya penganggur dengan jumlah angkatan kerja atau proporsi penganggur terhadap angkatan kerja. Peningkatan TPT menggambarkan adanya penurunan daya serap tenaga kerja atau menggambarkan kecepatan laju pertumbuhan kesempatan kerja tidak dapat mengimbangi kecepatan laju pertumbuhan angkatan kerja.

Perkembangan TPT DIY selama periode 2010-2016 memiliki kecenderungan yang semakin menurun dengan level yang berfluktuasi antara 2,72 persen sampai 6,02 persen. TPT DIY pada bulan Agustus 2016 tercatat sebesar 2,72 persen dan menjadi level TPT terendah sejak tahun 2010. Secara umum, angka tersebut memberi gambaran dari 100 orang angkatan kerja terdapat 3 orang yang statusnya menganggur. Dibandingkan dengan kondisi bulan Agustus 2015, TPT DIY bulan Agustus 2016 turun sebesar 1,35 poin persen. Fluktuasi perubahan TPT antar periode sangat terkait dengan kondisi perekonomian secara makro terutama laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Ketika perekonomian melambat atau mengalami resesi dan daya beli menurun, maka TPT cenderung meningkat. Sebaliknya, ketika perekonomian mengalami ekspansi dan daya beli meningkat, maka TPT cenderung menurun.

Perkembangan TPT menurut wilayah baik perkotaan dan perdesaan menunjukkan pola yang hampir sama. Namun, terdapat kecenderungan TPT di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan TPT

perdesaan. Meskipun demikian, gap atau selisih antara kedua wilayah terlihat semakin mengecil dari tahun ke tahun.

Secara kasar, fenomena relatif rendahnya TPT perdesaan menunjukkan bahwa angkatan kerja di daerah perdesaan lebih mudah masuk dalam pasar kerja. Hal ini terjadi karena pada umumnya mereka kurang selektif dalam menentukan jenis pekerjaan dibanding angkatan kerja perkotaan. Artinya, mereka akan menerima jenis pekerjaan apa saja termasuk bekerja di sektor informal, bekerja pada lapangan usaha di sektor pertanian, bahkan meski statusnya hanya sebagai pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar. Fenomena migrasi angkatan kerja baru pada kelompok terdidik dari daerah perdesaan menuju daerah perkotaan dengan tujuan untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan upah yang diharapkan juga memberi pengaruh terhadap perbedaan level TPT di kedua wilayah. Sementara, angkatan kerja baru di daerah perkotaan lebih selektif dalam memilih lapangan usaha dan jenis pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan maupun tingkat upah yang diharapkan. Lamanya waktu dalam mencocokkan jenis pekerjaan inilah yang mendorong TPT daerah

perkotaan menjadi lebih tinggi, khususnya jenis pengangguran yang bersifat friksional.

Perbandingan TPT menurut jenis kelamin selama periode 2010-2016 menunjukkan pola yang lebih dinamis dan lebih berfluktuasi. Secara umum, TPT laki-laki maupun perempuan memiliki kecenderungan yang semakin menurun selama periode 2010-2016. Pada bulan Agustus 2016, level TPT penduduk perempuan tercatat sebesar 2,55 persen dan lebih rendah dari level TPT laki-laki yang sebesar 2,79 persen.

TPT DIY pada kelompok umur muda (15-24 tahun) tercatat paling tinggi, karena umumnya merupakan angkatan kerja baru yang lebih selektif dalam mencari jenis pekerjaan.

Demikian pula, level TPT tertinggi terdapat pada kelompok penduduk yang berpendidikan menengah dan tinggi karena mereka membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melakukan penyesuaian jenis pekerjaan.

Tabel 4.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Jenis Kelamin dan Wilayah di D.I. Yogyakarta, 2010 – 2016 (Persen)

Table 4.2. Unemployment Rate in Daerah Istimewa Yogyakarta by Sex and Region, 2010 – 2016 (Percent)

Karakteristik	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		
	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Jenis Kelamin/ Sex	L/Male	7,42	6,97	5,86	5,13	4,84	4,73	4,45	3,93	2,68	4,00	5,30	4,55	3,54	2,79
	P/Female	4,21	4,01	4,90	2,86	2,36	2,37	2,47	2,04	1,24	2,17	0,95	3,02	1,32	2,55
	L+P	6,02	5,69	5,53	4,32	3,95	3,86	3,73	3,24	2,16	3,33	4,07	4,07	2,81	2,72
Wilayah/ Region	K/Urban	7,10	6,19	6,27	4,14	4,91	3,96	3,22	3,59	2,67	3,88	5,23	3,72	3,56	3,68
	D/Rural	4,63	5,08	4,64	4,55	2,76	3,74	4,37	2,81	1,60	2,65	2,59	4,54	1,90	1,50
	K+D	6,02	5,69	5,53	4,32	3,95	3,86	3,73	3,24	2,16	3,33	4,07	4,07	2,81	2,72

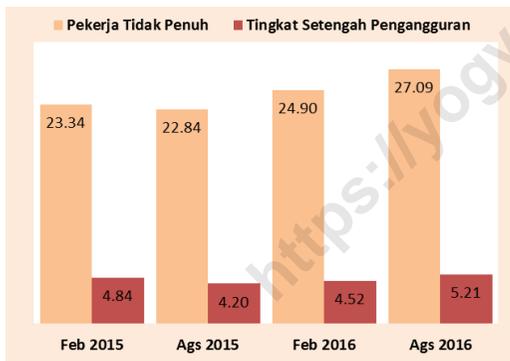
Sumber: Diolah dari data Sakernas  
Source: Based on National Labour Force Surveys

## Tingkat Setengah Pengangguran

Penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam dalam seminggu) dikategorikan sebagai pekerja tak penuh. Jika statusnya bekerja dengan jumlah jam kerja di bawah ambang batas jam kerja normal dan masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan dikategorikan sebagai setengah penganggur (*underemployment*). Sementara, jika bekerja kurang dari jam kerja normal tapi tidak mencari atau menerima pekerjaan tambahan maka dikategorikan sebagai pekerja paruh waktu.

Gambar 4.1. Proporsi Pekerja Tidak Penuh dan Tingkat Setengah Pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2015-2016

Figure 4.1. Proportion of Part Time Worker and Underemployment in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2015-2016



Sumber: Diolah dari data Sakernas  
Source: Based on National Labour Force Surveys

Proporsi pekerja tidak penuh terhadap total penduduk bekerja berdasarkan hasil Sakernas bulan Agustus 2016 di DIY mencapai 27,09 persen. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan kondisi Agustus 2015 dan Februari 2016. Sementara, pekerja yang termasuk dalam kategori setengah penganggur proporsinya mencapai 5,21 persen. Tingkat setengah pengangguran ini sedikit meningkat dibandingkan dengan kondisi Agustus 2015 dan Februari 2016. Pada umumnya, tingkat setengah penganggur di perkotaan lebih tinggi dari perdesaan dan setengah penganggur

perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki.

## Penduduk Bekerja menurut Lapangan Usaha

Distribusi penduduk bekerja menurut lapangan usaha merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Ukuran ini memberikan gambaran lapangan usaha mana saja yang dominan dalam menyerap tenaga kerja.

Pasar tenaga kerja di DIY sampai dengan tahun 2016 didominasi oleh lapangan usaha pada empat sektor, yakni pertanian; perdagangan, hotel, dan restoran; sektor jasa-jasa; dan industri pengolahan. Lapangan usaha sektor pertanian pada awal masa pembangunan memiliki peranan paling dominan dalam menyerap angkatan kerja, terutama di daerah perdesaan. Namun, seiring dengan proses pembangunan peran tersebut secara berangsur-angsur mulai mengalami penurunan dan tergantikan oleh lapangan usaha sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Hal ini terlihat dari persentase penduduk yang bekerja pada lapangan usaha pertanian yang semakin menurun dari 30,4 persen pada tahun 2010 menjadi 23,27 persen di tahun 2016.

Secara umum, penurunan penduduk bekerja di sektor pertanian dipengaruhi oleh faktor laju pertumbuhan nilai tambah sektor pertanian yang cenderung lebih lambat dibandingkan dengan sektor lainnya. Kondisi ini juga diperparah oleh derasnya laju konversi lahan pertanian menjadi pemukiman, kawasan industri, maupun infrastruktur lainnya. Rendahnya tingkat upah pekerja dan tingkat pengembalian usaha yang rendah juga berpengaruh terhadap rendahnya minat angkatan kerja baru untuk masuk ke sektor pertanian.

Sektor perdagangan, hotel dan restoran sejak tahun 2014 sudah mulai menggantikan peranan sektor pertanian dalam menyerap angkatan kerja di DIY. Kontribusi lapangan

Tabel 4.3. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Lapangan Usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010 - 2016

Table 4.3. Percentage of Population 15 Years Old and Over Who Worked During The Previous Weeks by Main Industry in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010-2016

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pertanian	30,40	26,17	27,82	28,18	25,41	23,08	23,27
Pertambangan dan Penggalian	0,79	0,68	0,72	0,48	0,71	0,83	1,04
Industri Pengolahan	13,92	14,68	14,97	13,36	13,97	14,61	12,83
LGA	0,10	0,25	0,14	0,29	0,15	0,13	0,21
Konstruksi	6,19	7,30	6,92	5,54	7,48	8,19	6,55
Perdagangan, Hotel dan Restoran	24,69	25,76	24,52	25,87	25,86	25,67	28,89
Transportasi dan Komunikasi	3,80	3,70	3,27	3,48	3,52	3,23	3,68
Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan	2,18	2,74	3,06	2,87	3,75	3,00	2,78
Jasa-jasa	17,93	18,73	18,58	19,93	19,14	21,25	20,75
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>						

Sumber: Diolah dari Sakernas bulan Agustus  
 Source: Based on August National Labour Force Surveys

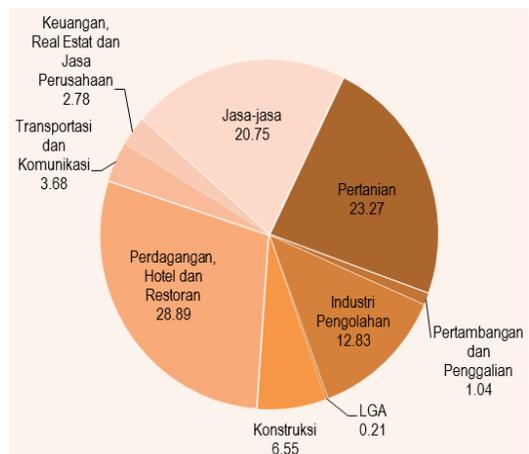
usaha ini terus meningkat secara nyata. Pada bulan Agustus 2010, sektor ini mampu menyerap 24,69 persen angkatan kerja dan meningkat menjadi 28,89 persen pada tahun 2016. Kondisi yang hampir sama juga terjadi pada lapangan usaha di sektor jasa-jasa. Kontribusi dalam menyerap angkatan kerja yang dimiliki oleh lapangan usaha ini secara nyata terus mengalami peningkatan. Pada bulan Agustus 2010 kontribusi lapangan usaha ini sebesar 17,93 persen dan meningkat menjadi 20,75 persen pada Agustus 2016. Secara umum, peningkatan daya serap kedua sektor ini dipengaruhi oleh laju pertumbuhan ekonomi kedua sektor yang cenderung lebih cepat.

Lapangan usaha industri pengolahan memiliki kontribusi menyerap angkatan kerja yang berfluktuasi antara 12-15 persen selama periode 2010-2016. Pada tahun 2016, kontribusi sektor industri pengolahan tercatat sebesar 12,83 persen dan terlihat sedikit menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 14,61 persen. Penurunan ini dipengaruhi kinerja ekspor komoditas industri yang masih lesu. Sementara, lima lapangan usaha yang lainnya, yakni pertambangan; listrik, gas dan

air bersih; konstruksi; angkutan dan komunikasi; dan keuangan memiliki kontribusi menyerap angkatan kerja yang berfluktuasi di bawah 10 persen.

Gambar 4.2. Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta, Agustus 2016

Figure 4.2. Population 15 Years Old and Over Who Worked by Main Industry in Daerah Istimewa Yogyakarta, August 2016



Sumber: Diolah dari Sakernas bulan Agustus 2016  
 Source: Based on August National Labour Force Surveys 2015

## Status Pekerjaan

Indikator untuk melihat gambaran tentang status/kedudukan pekerja dalam aktivitas pekerjaan yang dijalani adalah distribusi pekerja menurut status pekerjaan utama. Berdasarkan status dalam pekerjaan utama dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar penduduk bekerja di DIY berstatus sebagai buruh/karyawan. Pada bulan Agustus 2016, proporsi pekerja yang berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai mencapai 41,58 persen. Proporsi ini tercatat sedikit menurun dibandingkan dengan kondisi tahun Agustus 2015 yang mencapai 45,31 persen.

Komposisi terbesar berikutnya adalah penduduk yang berstatus berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar dan berstatus berusaha sendiri. Pada kondisi Agustus 2016, proporsi yang berstatus berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar mencapai 18,83 persen dan sedikit meningkat dibandingkan dengan tahun 2015. Proporsi pekerja yang berstatus berusaha sendiri mencapai 15,35 persen dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Sementara, proporsi penduduk yang bersatus berusaha dibantu buruh tetap pada tahun 2016 hanya sebesar 3,51 persen dan

cenderung menurun dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Fenomena ini menggambarkan jiwa kewirausahaan yang dimiliki oleh angkatan kerja yang cenderung menurun dan mereka lebih tertarik untuk masuk pasar tenaga kerja sebagai buruh/pekerja/karawan.

Proporsi penduduk bekerja yang berstatus sebagai pekerja bebas/lepas di sektor pertanian dan non pertanian pada tahun 2016 mencapai 8,19 persen. Kelompok ini didominasi oleh pekerja bebas non pertanian, terutama di sektor konstruksi. Sementara, proporsi pekerja bebas di sektor pertanian proporsinya semakin menurun. Secara kasar, penurunan proporsi pekerja bebas di sektor pertanian menggambarkan kondisi sektor pertanian yang semakin jenuh untuk menampung kelebihan angkatan kerja karena lambatnya peningkatan produktivitas dan derasnya arus konversi lahan pertanian. Akibatnya, terjadi perpindahan status dari pekerja bebas di sektor pertanian menjadi pekerja lepas di sektor lainnya atau berubah menjadi pekerja tetap/buruh/pegawai. Komposisi pekerja tak dibayar dalam beberapa tahun terakhir tercatat semakin menurun hingga level 12,53 persen di tahun 2016.

Tabel 4.4. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu menurut Status Pekerjaan Utama di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010-2016

*Table 4.4. Percentage of Population 15 Years Olds and Over Who Worked During The Previous Weeks by Employment Status in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010-2016*

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Berusaha Sendiri	13,75	13,47	12,52	12,92	13,92	15,54	15,35
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Tidak Dibayar	24,35	20,67	19,51	19,83	16,59	14,04	18,83
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	3,90	4,16	4,35	4,57	3,90	3,48	3,51
Buruh/ Karyawan	30,57	39,10	38,79	39,46	43,22	45,31	41,58
Pekerja Bebas Pertanian dan non Pertanian	8,56	8,32	8,47	7,12	7,62	9,72	8,19
Pekerja Tak Dibayar	18,87	14,28	16,36	16,10	14,75	11,92	12,53
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>						

Sumber: Diolah dari Sakernas Bulan Agustus 2010 –2016  
 Source: Based on August National Labour Force Surveys

# Bab 5 *Jaraf dan Pola Konsumsi*

## Consumption Level & Pattern

Kondisi sosial ekonomi penduduk akan lebih menggambarkan kondisi yang nyata jika diukur menggunakan pendekatan pendapatan rumah tangga. Namun, dalam operasional di lapangan untuk mendapatkan data pendapatan rumah tangga bukanlah hal yang mudah. Kesadaran dan keterbukaan rumah tangga selaku responden/nara sumber untuk memberikan informasi yang sebenarnya masih kurang. Oleh karena itu, digunakan pendekatan pengeluaran atau konsumsi (*consumption approach*) untuk mengukur taraf pendapatan rumah tangga.

Konsumsi penduduk menjadi salah satu indikator sosial ekonomi yang sangat penting. Perbandingan level konsumsi perkapita antarwilayah bisa menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk antarwilayah. Demikian pula pertumbuhan konsumsi perkapita antarwaktu, akan menggambarkan adanya peningkatan atau penurunan kesejahteraan penduduk secara umum. Pola konsumsi penduduk sangat rentan dipengaruhi oleh faktor perubahan harga (inflasi/deflasi) komoditas yang dikonsumsi, faktor budaya, dan perilaku lingkungan. Budaya setempat dan perilaku lingkungan akan membentuk pola kebiasaan tertentu pada sekelompok masyarakat. Indikator pola konsumsi dapat diukur menggunakan proporsi pengeluaran rumah tangga untuk komoditas kelompok makanan dan non makanan. Berdasarkan komposisi tersebut, dapat dinilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk.

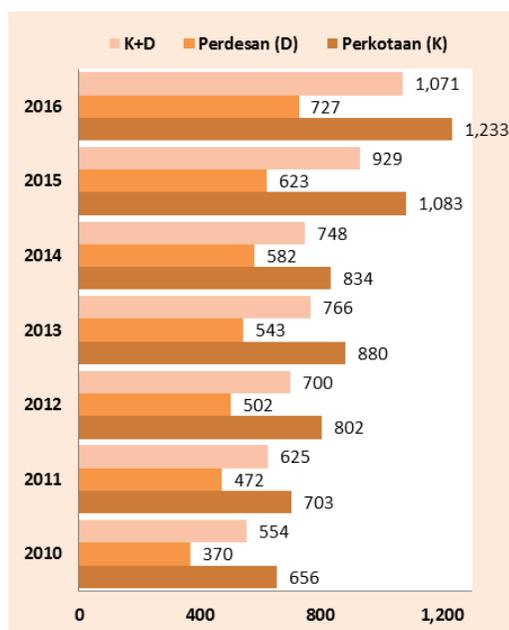
### Pengeluaran Perkapita Penduduk

Pengeluaran perkapita penduduk merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai keadaan kesejahteraan penduduk. Berdasarkan hasil Susenas Bulan Maret 2010-2016, nilai

nominal pengeluaran perkapita tercatat semakin meningkat. Pengeluaran dicatat dalam bentuk nominal dan belum riil karena belum dikoreksi dengan unsur perubahan harga. Pada tahun 2010, pengeluaran perkapita nominal berada pada level Rp656,-ribu. Angka ini terus meningkat hingga ke level Rp1.071,- ribu di tahun 2016. Peningkatan pendapatan perkapita nominal ini secara kasar menggambarkan kesejahteraan penduduk yang semakin membaik dengan catatan peningkatan dinikmati oleh semua penduduk secara merata.

Gambar 5.1. Level Pengeluaran Perkapita Penduduk Sebulan menurut Wilayah di D.I. Yogyakarta, 2010-2016 (000Rp)

Figure 5.1. The level of Expenditure per Capita per Month by Area in D.I. Yogyakarta, 2010-2016 (000Rp)



Sumber : Diolah dari Susenas Maret 2010-2016  
Source : Base on National Socio Economic Survey on March 2010-2016

Perbandingan menurut wilayah menunjukkan level pengeluaran perkapita di daerah perkotaan tercatat selalu lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perdesaan. Pada kondisi Maret 2016, pengeluaran perkapita perkotaan tercatat mencapai Rp1.233,- ribu dan perdesaan mencapai Rp727,- ribu. Perbedaan level ini menggambarkan kesejahteraan penduduk perkotaan yang secara rata-rata lebih baik dibandingkan dengan penduduk perdesaan. Kondisi ini menuntut peran pemerintah untuk lebih fokus dalam upaya peningkatan kesejahteraan penduduk di perdesaan melalui kebijakan pembangunan yang lebih berorientasi ke daerah pinggiran dan perdesaan.

### Pola Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yakni makanan dan bukan makanan. Hukum Engel menyatakan semakin tinggi level pendapatan yang diterima oleh penduduk/rumah tangga maka akan semakin besar proporsi pengeluaran untuk kelompok non makanan. Sebaliknya, proporsi pengeluaran untuk kelompok makanan akan semakin menurun.

Gambar 5.2 mengilustrasikan komposisi pengeluaran penduduk DIY menurut kelompok makanan dan non makanan. Secara umum, selama tujuh tahun terakhir komposisi pengeluaran penduduk didominasi oleh pengeluaran untuk komoditas non makanan. Komposisi pengeluaran untuk komoditas non makanan pada tahun 2016 mencapai 59,5 persen. Komposisi ini cenderung meningkat seiring dengan perkembangan waktu. Sementara, proporsi pengeluaran untuk komoditas makanan hanya tercatat sebesar 40,5 persen dan menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun dari waktu ke waktu. Fenomena ini secara kasar menggambarkan kesejahteraan penduduk DIY yang semakin membaik. Berdasarkan wilayah, pengeluaran untuk kelompok non makanan di perkotaan sudah lebih mendominasi dibandingkan

kelompok makanan. Sementara, di daerah perdesaan masih relatif berfluktuasi. Kadang-kadang kelompok makanan lebih dominan, namun di saat yang lain konsumsi kelompok makanan lebih dominan.

Gambar 5.2. Komposisi Pengeluaran Perkapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan di D.I Yogyakarta, 2010 - 2016

Figure 5.2. Percentage Expenditure per Capita by Food and Non-Food Group in D.I. Yogyakarta, 2010 - 2016



Sumber : Susenas 2010-2016  
Source : 2010-2016 National Socio Economic Survey

Berdasarkan golongan pengeluaran penduduk yang dikelompokkan menurut desil (kelompok 10 persen populasi yang telah diurutkan pengeluarannya) terlihat pola bahwa rata-rata pengeluaran dan komposisi pengeluaran kelompok makanan cenderung menurun seiring dengan meningkatnya kelompok pengeluaran atau desil. Sebaliknya, rata-rata pengeluaran perkapita dan komposisi pengeluaran non makanan semakin meningkat seiring dengan peningkatan kelompok pengeluaran penduduk. Tabel 5.1 juga mengilustrasikan

bahwa tingginya rata-rata pengeluaran perkapita penduduk DIY didorong oleh tingginya pengeluaran perkapita pada kelompok 20 persen penduduk berpendapatan tertinggi.

Tabel 5.1. Persentase Pengeluaran Makanan dan non Makanan menurut Golongan Pengeluaran di D.I Yogyakarta, 2016

Table 5.1. Percentage of per Capita Expenditure by Desil and Group of Expenditure in DIY, 2016

Desil	Makanan		Non Makanan		Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	163 508	(59.78)	110 002	(40.22)	273 510
2	206 636	(56.09)	161 789	(43.91)	368 425
3	246 790	(55.56)	197 434	(44.44)	444 224
4	290 353	(54.90)	238 510	(45.10)	528 863
5	344 359	(51.71)	321 596	(48.29)	665 956
6	437 766	(52.10)	402 451	(47.90)	840 217
7	517 602	(46.77)	589 175	(53.23)	1 106 777
8	597 429	(43.82)	765 907	(56.18)	1 363 336
9	689 731	(38.00)	1 125 579	(62.00)	1 815 310
10	846 279	(25.62)	2 456 938	(74.38)	3 303 216
<b>Jumlah</b>	<b>434 004</b>	<b>(40.52)</b>	<b>636 958</b>	<b>(59.48)</b>	<b>1 070 962</b>

Sumber : Susenas, 2016  
Source : 2016 National Socio Economic Survey

Pengeluaran konsumsi perkapita penduduk sebulan menurut jenis komoditas pada kelompok makanan selama periode 2014-2016 mempunyai pola yang hampir serupa. Meskipun demikian, besaran/proporsi setiap kelompok komoditas memiliki proporsi yang berfluktuasi antar tahun dan memiliki kecenderungan semakin menurun.

Pengeluaran perkapita kelompok makanan yang terbesar digunakan untuk konsumsi komoditas makanan dan minuman jadi. Proporsi selama tahun 2016 mencapai 15,31 persen dari seluruh pengeluaran penduduk. Proporsi terbesar berikutnya digunakan untuk konsumsi kelompok padi-padian; telur dan susu; serta tembakau dan sirih dengan proporsi antara 3 sampai 5 persen. Sementara, proporsi untuk konsumsi kelompok komoditas lainnya bervariasi

dengan level di bawah 3 persen dari total konsumsi penduduk DIY.

Tabel 5.2. Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Kelompok Makanan di D.I Yogyakarta, 2014 - 2016

Table 5.2. Monthly Expenditure per Capita by Food Group in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2014 - 2016

Komposisi/Composition	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Padi-padian/Cereals	6,04	5,01	4,43
Umbi - umbian/Tubers	0,33	0,26	0,33
Ikan/Fish	1,60	1,49	1,56
Daging/Meat	2,06	1,82	2,02
Telur dan Susu/Egg and milk	3,31	3,08	3,14
Sayur-sayuran/Vegetables	3,23	2,28	2,63
Kacang-Kacangan/Legumes	1,62	1,2	1,18
Buah-buahan/Fruit	2,78	2,26	2,02
Minyak/Lemak/Oil and fats	1,43	1,13	1,04
Bahan minuman/Beverage flavour stuffs	1,94	1,52	1,60
Bumbu-Bumbuan/Spices	0,66	0,57	0,61
Konsumsi Lainnya/Miscellaneous food items	0,94	0,82	0,76
Makanan & Minuman Jadi/Prepared food	17,75	14,28	15,31
Tembakau dan sirih/ Tobacco and betel	3,82	3,58	3,90
<b>Jumlah Makanan/Total of Food</b>	<b>47,51</b>	<b>39,30</b>	<b>40,52</b>

Sumber : Susenas, 2014-2016  
Source : National Socio Economic Survey, 2014-2016

Komposisi pengeluaran perkapita kelompok bukan makanan cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2016 proporsinya mencapai 59,48 persen. Selama tiga tahun terakhir, pengeluaran non makanan didominasi oleh pengeluaran untuk komoditas perumahan. Besarnya proporsi kelompok ini mencapai 27,17 persen pada tahun 2016 dan cenderung meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Komposisi pengeluaran terbesar berikutnya adalah pengeluaran untuk kelompok barang dan jasa dengan proporsi 17,44 persen dan kelompok barang tahan lama dengan proporsi 6,52 persen. Pengeluaran untuk kelompok yang lainnya bervariasi dengan proporsi di bawah 2 persen.

Tabel 5.3. Komposisi Pengeluaran Perkapita Sebulan menurut Kelompok non Makanan di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2014-2016

Table 5.3. *Montly Expenditure per Capita by non Food Group in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2014-2016*

Komposisi/Composition	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Perumahan/ Housing	19,61	26,69	27,17
Barang dan Jasa/ Miscellaneous Good and service	22,25	17,80	17,44
Pakaian, Alas kaki & tutup kepala/ Clothing, footwear & headger	2,67	2,84	2,88
Barang Tahan lama/ Durable Goods	3,89	8,18	6,52
Pajak dan Asuransi/ Taxes and Insurances	1,68	3,19	3,08
Keperluan Pesta dan upacara/ Parties and ceremonies	2,38	2,00	2,39
<b>Jumlah bukan makanan/ Total of Non Food</b>	<b>52,49</b>	<b>60,69</b>	<b>59,48</b>

Sumber : Susenas, 2014-2016

Source : National Socio Economic Survey, 2014-2016

### Konsumsi Energi dan Protein

Tingkat kecukupan gizi yang mencakup konsumsi kalori dan protein merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 (Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI tahun 2012), rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2150 kkal dan 57 gram protein.

Rata-rata energi atau kalori yang dikonsumsi oleh penduduk DIY selama periode 2012-2016 berfluktuasi antara 1.854 kkal sampai 2.063 kkal per kapita per hari. Jika mengacu pada standar kecukupan kebutuhan minimum energi yang sebesar 2.150 kkal per kapita per hari, maka rata-rata konsumsi energi penduduk DIY selama periode tersebut masih di berada di bawah standar yang ditentukan. Rata-rata energi yang dikonsumsi penduduk pada tahun 2016 sebesar 2.063 kkal sehari dan sedikit meningkat dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar 1.934 kkal sehari.

Tabel 5.4. Konsumsi Energi dan Protein per Kapita per Hari Menurut Wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012-2016

Table 5.4. *Energy and Protein Consumption per Capita per Day by Area in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012-2016*

Tahun/Year	Kota/Urban	Desa/Rural	Kota+Desa/Urban+Rural
(1)	(2)	(3)	(4)
Energi (kkal)			
2012	1 860,76	1 841,98	1 854,44
2013	2 000,31	1 992,15	1 997,55
2014	2 029,41	1 986,68	2 014,85
2015	1 939,13	1 940,33	1 939,54
2016	2 069,77	2 049,84	2 063,40
Protein (gram)			
2012	56,71	50,70	54,69
2013	64,66	55,83	61,67
2014	65,56	54,95	61,94
2015	60,08	52,33	57,48
2016	64,54	55,68	67,71

Sumber : Susenas, 2012-2016

Source : National Socio Economic Survey, 2012-2016

Secara umum, konsumsi energi perkapita sehari penduduk di daerah perdesaan DIY sampai dengan tahun 2016 selalu lebih rendah dari konsumsi energi penduduk perkotaan, kecuali di tahun 2015.

Konsumsi energi perkapita penduduk perkotaan selama 2016 tercatat sebesar 2.070 kkal sehari. Sementara, konsumsi energi penduduk perdesaan sebesar 2.050 kkal sehari. Perbedaan ini dipengaruhi oleh kuantitas komoditas makanan yang dikonsumsi penduduk perkotaan yang lebih tinggi. Selain itu, jenis komoditas makanan yang dikonsumsi penduduk perkotaan juga lebih bervariasi dibandingkan dengan penduduk perdesaan.

Tabel 5.5. Konsumsi Energi dan Protein per Kapita per Hari Menurut Kelompok Makanan di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2015-2016

*Table 5.5. Energy and Protein Consumption per Capita per Day by Group of Foods in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012- 2016*

Kelompok Makanan/ Group of Foods	Energi/Energy (Kkal)		Protein (Gram)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Padi-padian/Cereals		740 (35.86)	17.43	(28.25)	
Umbi - umbian/Tubers		37 (1.78)	0.34	(0.55)	
Ikan/Fish		22 (1.04)	3.52	(5.70)	
Daging/Meat		59 (2.86)	3.57	(5.78)	
Telur dan Susu/Egg and milk		78 (3.79)	4.19	(6.79)	
Sayur-sayuran/Vegetables		39 (1.87)	2.61	(4.23)	
Kacang-Kacangan/Legumes		65 (3.13)	6.32	(10.24)	
Buah-buahan/Fruit		41 (1.98)	0.41	(0.66)	
Minyak/Lemak/Oil and fats		229 (11.12)	0.32	(0.53)	
Bahan minuman/Beverage flavour stuffs		125 (6.05)	0.89	(1.44)	
Bumbu-Bumbuan/Spices		10 (0.49)	0.41	(0.67)	
Konsumsi Lainnya/Miscellaneous food items		53 (2.56)	1.10	(1.78)	
Makanan & Minuman Jadi/Prepared food		567 (27.47)	20.60	(33.38)	
<b>Jumlah Makanan/Total of Food</b>		<b>2 063 (100)</b>	<b>61.71</b>	<b>(100)</b>	

Sumber : Susenas, 2016  
Source : National Socio Economic Survey, 2016

Sumber utama energi yang dikonsumsi oleh penduduk DIY sebagian besar berasal dari kelompok padi-padian. Rata-rata energi perkapita sehari dari kelompok komoditas

padi-padian mencapai 740 Kkal. Konsumsi energi kelompok padi-padian memberi andil sebesar 35,86 persen terhadap total konsumsi kalori. Jenis komoditas yang paling besar menyumbang adalah beras. Sumber energi terbesar berikutnya berasal dari kelompok makanan dan minuman jadi dengan andil sebesar 27,47 persen serta kelompok minyak dan kelapa dengan andil 11,12 persen. Kelompok komoditas yang lainnya memberi andil energi dengan besaran yang bervariasi kurang dari 7 persen. Secara umum, konsumsi energi pada semua kelompok makanan mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2015, kecuali kelompok buah-buahan yang sedikit menurun.

Konsumsi protein penduduk DIY selama periode 2012-2016 terlihat berfluktuasi dan memiliki kecenderungan yang semakin meningkat. Konsumsi protein perkapita penduduk DIY sejak tahun 2012 sudah melebihi standar minimum yang ditentukan oleh Permenkes RI yakni 57 gram sehari. Bahkan, pada tahun 2016 konsumsi protein sudah berada di level 67,71 gram sehari.

Berdasarkan wilayah, konsumsi protein perkapita penduduk perkotaan selama lima tahun terakhir tercatat selalu lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perdesaan. Hal ini terjadi karena konsumsi kelompok makanan yang menjadi sumber protein penduduk perkotaan sudah lebih bervariasi dibandingkan dengan kelompok makanan yang dikonsumsi oleh penduduk perdesaan. Konsumsi protein perkapita penduduk perkotaan pada tahun 2016 mencapai 64,5 gram sehari, sementara konsumsi penduduk perdesaan mencapai 56,7 gram sehari. Angka ini memberi gambaran bahwa konsumsi protein di perkotaan sudah melebihi angka kecukupan minimum yang ditentukan yakni 57 gram sehari. Sementara, konsumsi protein perkapita penduduk perdesaan masih berada di bawah angka kecukupan minimum protein yang ditentukan.

Sumber utama protein yang dikonsumsi penduduk DIY berasal dari kelompok makanan dan minuman jadi dan kelompok padi-padian. Rata-rata konsumsi protein perkapita kelompok makanan dan minuman jadi sebesar 20,6 gram sehari atau memberi andil sebesar 33,38 persen terhadap total konsumsi. Sementara, rata-rata konsumsi protein perkapita dari kelompok padi-padian tercatat sebesar 17,4 gram atau memberi andil 28,25 persen terhadap total konsumsi protein. Sumber terbesar berikutnya berasal dari konsumsi kelompok kacang-kacangan dengan nilai konsumsi 6,32 gram atau memberi andil

10,24 persen dan kelompok telur dan susu sebesar 4,19 gram atau 6,8 persen. Andil konsumsi protein perkapita dari kelompok makanan yang lainnya bervariasi di bawah 6 persen. Selama tahun 2016, konsumsi perkapita semua kelompok makanan mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2015. Kenaikan konsumsi protein tertinggi terjadi pada kelompok umbi-umbian dan bumbu-bumbuan. Sementara, konsumsi protein dari kelompok buah-buahan, minyak dan kelapa, dan bahan minuman tercatat mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015.

<https://lyogyakarta.bps.go.id>

Perumahan dan permukiman menjadi kebutuhan manusia yang paling mendasar, selain kebutuhan pangan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Perumahan dalam arti hunian tempat tinggal mempunyai fungsi dan peranan yang sangat strategis sebagai pusat pendidikan keluarga dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Terwujudnya kesejahteraan penduduk akan ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan tempat tinggal dan lingkungan yang sehat, tenang, dan nyaman. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman menjadi salah satu dimensi pembangunan manusia yang termuat dalam strategi pembangunan nasional tahun 2015-2019.

Rumah selain sebagai tempat tinggal atau hunian, juga memiliki fungsi sebagai sarana pembinaan dan pengembangan keluarga.

Perumahan dalam konteks yang lebih luas disebut permukiman, yaitu kumpulan rumah baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil dari upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Prasarana, sarana, dan fasilitas umum tersebut diantaranya meliputi penyediaan air minum, pembuangan sampah, tersedianya listrik, telepon, jalan, dan infrastruktur lainnya.

Dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019 disebutkan pula bahwa arah dan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman meliputi penyediaan perumahan, serta air minum dan sanitasi yang layak dan terjangkau dan diprioritaskan

dalam rangka meningkatkan standar hidup penduduk pada kelompok 40 persen berpendapatan terendah. Sasaran pembangunan perumahan dan permukiman tersebut di antaranya adalah terfasilitasinya penyediaan hunian layak dan terjangkau untuk 2,2 juta rumah tangga dari anggaran pemerintah dalam menurunkan akumulasi kekurangan tempat tinggal, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah menjadi 5 juta rumah tangga di tahun 2019.

Rumah selain sebagai tempat tinggal atau hunian, juga berfungsi sebagai sarana pembinaan keluarga. Dalam fungsinya sebagai tempat tinggal, fungsi rumah telah berkembang menjadi bagian dari gaya hidup dan status sosial pemiliknya. Sementara itu sebagai sarana pembinaan keluarga, rumah diharapkan mampu menghasilkan sesuatu yang maksimal, yaitu tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pembangunan perumahan dan permukiman memerlukan perencanaan, monitoring, dan evaluasi secara periodik. Ketersediaan data terkait perumahan yang berkesinambungan sangat diperlukan, guna menunjang pelaksanaan pembangunan perumahan tersebut, sehingga pembangunan perumahan dapat berjalan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan pemenuhan pengadaan perumahan bagi seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan. Secara berkala, BPS telah melakukan pengumpulan data terkait dengan kondisi tempat tinggal atau rumah melalui Susenas Kor.

### Sumber Penerangan

Sumber penerangan yang digunakan rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga. Secara garis besar, penerangan yang digunakan rumah tangga berasal dari

beberapa sumber seperti listrik PLN, listrik non PLN, dan sumber penerangan lainnya seperti petromak, sentir, dan sebagainya. Secara umum, listrik merupakan sumber penerangan yang lebih baik dibandingkan dengan sumber penerangan lainnya atau non listrik. Hal ini karena listrik lebih praktis dalam penggunaan, murah, efisien, modern, dan ramah lingkungan. Rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan dari listrik dianggap mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan dengan rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan non listrik.

Potret sumber penerangan rumah tangga bisa dikaji menggunakan dua pendekatan. Pendekatan pertama menggunakan data hasil survei rumah tangga Susenas. Pendekatan kedua menggunakan data jumlah sambungan dan konsumsi listrik rumah tangga menggunakan data sekunder dari PLN. Kedua pendekatan menghasilkan indikator yang berbeda. Hasil Susenas menggunakan pendekatan rumah tangga hanya mampu mengidentifikasi jenis sumber penerangan berdasarkan penggunaan oleh rumah tanpa bisa melihat apakah jaringan atau instalasi listrik yang digunakan adalah meteran sendiri atau menggunakan meteran milik rumah tangga lain. Efeknya adalah penggunaan sumber penerangan dari listrik angkanya akan mendekati angka 100 persen.

Sementara, data dari sumber PLN lebih menekankan ke aspek jaringan atau instalasi menurut jenis bangunan apakah tempat tinggal, tempat usaha, fasilitas sosial, kantor pemerintah, atau yang lainnya. Ukuran yang dihasilkan disebut rasio elektrifikasi yaitu rasio antara jumlah instalasi atau sambungan listrik ke konsumen rumah tangga dibagi dengan banyaknya bangunan yang ditempati oleh rumah tangga atau jumlah rumah tangga. Angka yang dihasilkan akan cenderung lebih rendah, karena rumah tangga yang tidak memiliki meteran atau instalasi sendiri akan dianggap belum memiliki jaringan listrik.

Tabel 6.1. Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2016

*Table 6.1. Percentage of Household by Source of Lighting in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2016*

Tahun, Year	Sumber Penerangan/Source of Lighting				Jumlah/ Total
	Listrik PLN/ State Electricity	Listrik Non PLN/ Non State Electricity	Bukan Listrik/ Non Electricity	Lain nya/ Others	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2013	99,62	na	0,28	0,15	100
2014	99,58	na	0,08	0,28	100
2015	99,70	0,12	0,18	na	100
2016	99,61	0,32	0,07	na	100

Sumber : Susenas 2013-2015  
 Source : 2013-2016 National Socio Economi Survey  
 Ket. : na (data tidak tersedia)

Tabel 6.1 menggambarkan bahwa persentase rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan utama selama empat tahun terakhir berdasarkan hasil Susenas sudah mendekati level 100 persen. Proporsi rumah tangga yang menggunakan listrik dari sumber PLN maupun lainnya pada tahun 2016 tercatat sebanyak 99,93 persen. Sementara, sisanya sebanyak 0,07 persen menggunakan penerangan dari sumber yang lainnya.

Berdasarkan data sekunder dari PLN, konsumen rumah tangga masih mendominasi jumlah pelanggan PT PLN Yogyakarta. Jumlah konsumen rumah tangga pada tahun 2016 tercatat sebanyak 989.127 unit pelanggan atau sebesar 91,33 persen dari total seluruh konsumen. Berikutnya adalah konsumen untuk tempat usaha, bangunan fasilitas umum, dan industri. Jumlah konsumen rumah tangga menunjukkan peningkatan setiap tahun. Tahun 2016 jumlah pengguna listrik rumah tangga tumbuh 3,95 persen dibandingkan tahun 2015. Pemanfaatan listrik oleh rumah tangga pada umumnya umumnya digunakan

untuk sumber penerangan dan sumber energi untuk alat-alat elektronik. Total konsumsi listrik oleh pelanggan rumah tangga selama tahun 2016 mencapai 1.465,44 juta kwh dan memiliki pangsa 54,31 persen terhadap total listrik yang terjual. Rata-rata konsumsi listrik per konsumen rumah tangga mencapai 1.481,55 kwh setahun.

Tabel 6.2. Banyaknya Pelanggan Listrik, Listrik yang Diproduksi dan Terjual di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2016

Table 6.2. Number of Consumer of Electricity, Electricity Generated and Sold in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2016

Tahun/ Year	Pengguna Listrik RT Consumer of Electricity (Pelanggan)	Listrik yang diproduksi/ Electricity Generated (KWH)	Listrik yang dijual/ Electricity by Sold (KWH)
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	864 833	2 391 821 388	2 205 797 164
2014	897 001	2 551 650 008	2 369 612 713
2015	951 582	2 655 966 471	2 484 153 383
2016	989 127	2 893 788 882	2 698 238 827

Sumber : PLN Wil. XIII, Cabang DIY

Source : Government Electricity Company for Area XIII Distribution of Yogyakarta Subdivision

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan penggunaan listrik, pemerintah melalui PT PLN terus meningkatkan produksinya. Tabel 6.2 menggambarkan perkembangan jumlah listrik yang diproduksi dan terjual selama empat tahun terakhir yang cenderung meningkat.

### Sumber Air Minum

Kualitas kesejahteraan penduduk di suatu wilayah juga bisa dilihat berdasarkan ukuran kesehatan dan sanitasi. Salah satu ukuran yang dapat digunakan adalah kemudahan untuk mengakses air bersih maupun cara mengaksesnya. Air bersih yang digunakan rumah tangga sebagai

sumber air minum maupun memasak menjadi aspek yang sangat penting dalam menopang kualitas kesehatan penduduk.

Air yang digunakan oleh rumah tangga untuk minum dan memasak bisa berasal dari beberapa sumber. Air minum dan air untuk memasak yang termasuk dalam kategori bersih dan sehat bersumber dari air kemasan bermerek, air isi ulang, air leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung. Khusus untuk sumber bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung harus memenuhi syarat jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja minimal 10 meter. Sementara, sumber yang lainnya seperti sumur tak terlindung, mata air tak terlindung apir permukaan (sungai, danau, waduk, rawa, kolam, irigasi), air hujan dan lainnya termasuk dalam kategori sumber air yang kurang memenuhi kaidah bersih dan sehat.

Persentase rumah tangga hasil Susenas Maret 2016 yang menggunakan sumber air minum bersih mencapai 90,57 dan air bersih untuk memasak mencapai 88,78 persen persen

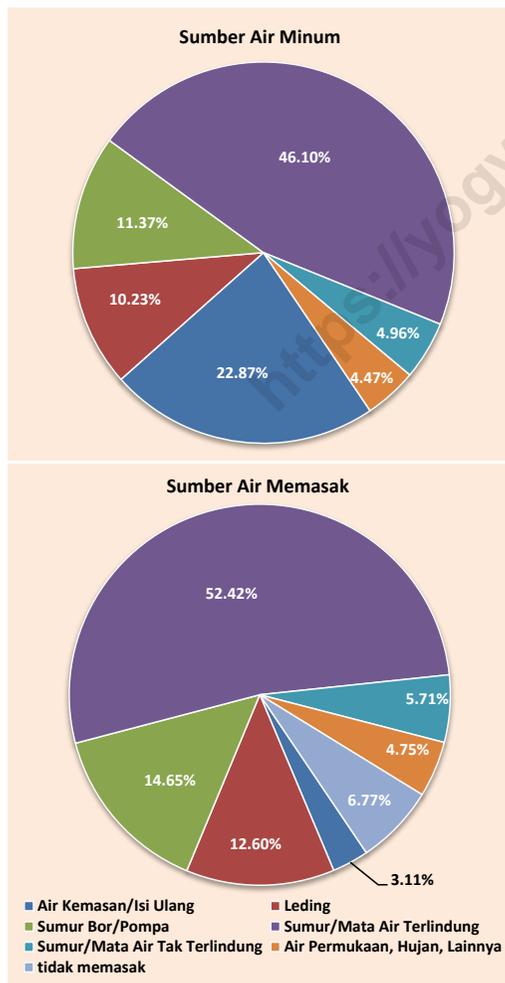
Penggunaan sumber air bersih untuk minum dan memasak oleh rumah tangga DIY selama beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang semakin membaik. Pada tahun 2016, tercatat sebanyak 90,57 persen rumah tangga telah menggunakan air dari sumber yang bersih dan sehat untuk minum. Sementara, 88,78 persen rumah tangga telah menggunakan air bersih untuk memasak dan 89,02 persen menggunakan air bersih untuk mandi, mencuci, dan lainnya (MCK).

Sumber air yang paling banyak digunakan oleh rumah tangga untuk kegiatan minum berasal dari sumur dan mata air terlindung. Proporsinya mencapai 46,10 persen dan diikuti oleh sumber air kemasan atau isi ulang dan sumur bor/pompa. Sementara untuk kegiatan

memasak, sumber utama air berasal dari sumur/mata air terlindung (52,42%) dan diikuti oleh sumber dari sumur pompa/bor dan leding. Rumah tangga yang menggunakan air dari sumber mata air/sumur tak terlindung, air permukaan (danau, rawa, sungai, kolam, irigasi), air hujan, dan lainnya untuk minum, memasak, dan MCK jumlahnya juga masih cukup besar. Proporsi dalam beberapa tahun terakhir berada pada kisaran 8 persen.

Gambar 6.1. Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum dan Memasak di DIY, 2016

Figure 6.1. Percentage of Household by Source of Drinking Water and Cooking in DIY, 2016



Sumber : Susenas Maret 2016  
Source : National Socio-economic Survey on March 2016

Berdasarkan cara, mayoritas rumah tangga memperoleh atau mengakses air minum tanpa membeli. Proporsinya mencapai 63,8 persen. Proporsi rumah tangga yang memperoleh air minum dengan cara membeli secara eceran mencapai 21,6 persen dan membeli secara berlangganan sebesar 14,6 persen. Secara umum, tingkat kemudahan untuk mengakses air untuk kegiatan minum, memasak, dan MCK dari sumber yang bersih di daerah perkotaan relatif lebih mudah dibandingkan dengan daerah perdesaan. Bahkan, terdapat beberapa wilayah perdesaan di Kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo yang sering mengalami kesulitan untuk mengakses air bersih ketika musim kemarau. Ke depan upaya untuk mempermudah akses ini sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan penduduk secara umum.

Tabel 6.3. Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2016

Table 6.3. Percentage of Household by Source of Drinking Water in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2016

Sumber air minum/ Source of Drinking Water	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Air Kemasan/Packaging Water	17,99	21,29	22,31	22,87
Ledeng/Pipe	8,93	8,76	11,45	10,23
Pompa/Pump	6,68	7,42	8,55	11,37
Sumur/Mata Air Terlindung/ Protected well/spring	57,07	53,14	49,93	46,10
Sumur/Mata Air Tidak Terlindung/ Unprotected well/ spring	5,98	5,81	3,35	4,96
Lainnya/ Others	3,35	3,58	4,43	4,47
<b>Jumlah/Sum</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : Susenas 2013-2016  
Source : 2013-2016 National Socio Economic Survey

### Jenis Lantai

Derajat kesejahteraan dan kesehatan rumah tangga juga bisa diukur dari kondisi fisik bangunan tempat tinggal. Salah satu

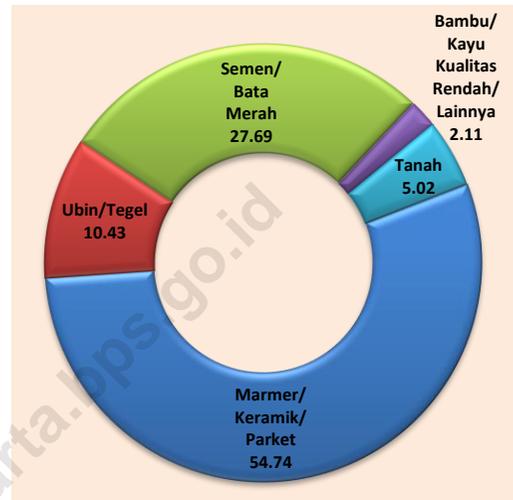
ukuran yang digunakan adalah jenis lantai tempat tinggal. Jenis lantai yang ditempati rumah tangga memiliki relasi dengan kondisi ekonomi rumah tangga, terutama tingkat pendapatan dan pengeluaran rumah tangga. Semakin baik kondisi ekonomi rumah tangga maka kondisi lantai rumah yang ditempati juga akan semakin berkualitas. Di samping itu, faktor budaya, kesadaran, dan tentang rumah yang sehat juga memiliki pengaruh terhadap preferensi rumah tangga dalam memilih jenis lantai tempat tinggal.

Jenis lantai terluas bangunan tempat tinggal dalam Susenas dikategorikan menjadi beberapa jenis. Tingkatan atau kualitas lantai yang paling baik adalah lantai yang terbuat dari marmer/granit, diikuti oleh keramik, ubin/tegel/teraso, papan berkualitas tinggi, dan semen/bata merah. Sementara, jenis yang lainnya seperti bambu, kayu/papan kualitas rendah, dan tanah merepresentasikan lantai dengan kualitas yang lebih rendah. Bahkan, rumah tangga yang menempati bangunan dengan lantai terluas dari tanah dianggap menempati rumah belum layak huni.

Berdasarkan hasil Susenas bulan Maret 2016, sebagian besar rumah tangga di DIY menempati tempat tinggal dengan jenis lantai terluas terbuat dari marmer/granit/keramik. Proporsi jenis tersebut mencapai 54,74 persen dengan rincian marmer/granit 0,64 persen dan keramik 54,03 persen. Komposisi terbesar berikutnya adalah rumah tangga yang menempati tempat tinggal dengan jenis lantai terluas dari semen/bata merah dan ubin/tegel dengan proporsi masing-masing sebesar 27,69 persen dan 10,43 persen. Data tersebut memberi gambaran bahwa mayoritas rumah tangga di DIY telah menempati tempat tinggal dengan jenis lantai yang layak. Sementara, rumah tangga yang menempati lantai yang belum layak yakni lantai dari tanah proporsinya tercatat sebesar 5,02 persen. Sebagian besar rumah tangga tersebut terdapat di kawasan perdesaan.

Gambar 6.2. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Lantai Terluas di DIY, 2016

Figure 6.2. Percentage of Household by The Widest Type of Flooring In DIY, 2016



Sumber : Susenas Maret 2016

Source : National Socio-economic Survey on March 2016

Perkembangan kondisi lantai bangunan tempat tinggal yang ditempati oleh rumah tangga di DIY selama empat tahun terakhir terlihat semakin membaik. Tabel 6.4 mengilustrasikan bahwa lebih dari 90 persen rumah tangga di DIY telah menempati bangunan tinggal dengan jenis lantai terluas bukan dari tanah. Proporsi ini terlihat semakin meningkat dari 93,67 persen pada tahun 2013 menjadi 94,98 persen pada tahun 2016. Sementara, rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal dengan jenis lantai terluas dari tanah proporsinya cenderung menurun dari waktu ke waktu. Pada tahun 2013, proporsinya tercatat sebanyak 6,33 persen dan menurun menjadi 5,02 persen di tahun 2016. Secara kasar, fenomena tersebut menggambarkan adanya peningkatan kualitas kesejahteraan penduduk dari sisi pendapatan sekaligus menggambarkan pengetahuan penduduk tentang tempat tinggal yang sehat, nyaman, dan berkualitas yang semakin membaik dari waktu ke waktu.

Tabel 6.4. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Lantai Terluas dari Tempat Tinggal di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2016

Table 6.4. Percentage of Household by primary construction material of the floor of living quarter in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2016

Tahun/ Year	Jenis Lantai/ Type of floor	
	Tanah/ Earth	Bukan Tanah/ Non Earth
(1)	(2)	(3)
2013	6,33	93,67
2014	7,00	93,00
2015	5,32	94,68
2016	5,02	94,98

Sumber : Susenas 2013-2015  
Source : 2013-2015 National Socio Economic Survey

Selain menggunakan variabel jenis lantai terluas, kualitas tempat tinggal juga bisa dikaji menggunakan variabel luas lantai perkapita. Berdasarkan hasil Susenas bulan Maret 2016, mayoritas rumah tangga di DIY memiliki luas lantai perkapita di atas 10 m<sup>2</sup>. Proporsinya mendekati 90 persen. Sementara, proporsi rumah tangga dengan luas lantai perkapita kurang dari 10 m<sup>2</sup> tercatat sebanyak 10,22 persen. Profil mereka pada umumnya merupakan rumah tangga tunggal, kaum urban, berstatus mahasiswa, dan tinggal secara indekost atau menyewa satu kamar dengan luas lantai kurang dari 10 m<sup>2</sup>.

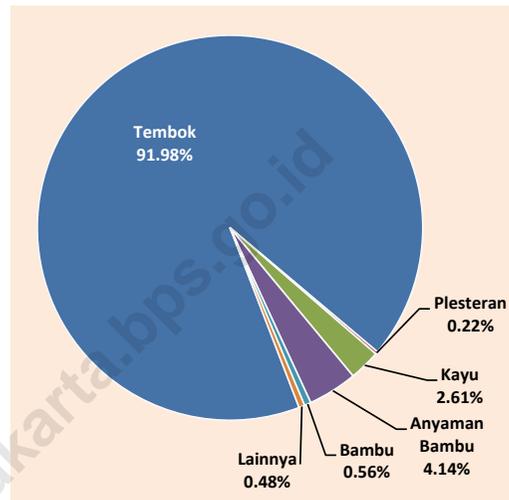
### Jenis Dinding

Jenis dinding terluas dari bangunan yang ditempati rumah tangga juga menggambarkan derajat kesejahteraan penduduk secara umum. Jenis dinding bangunan tempat tinggal bisa terbuat dari tembok, plesteran, kayu, anyaman bambu, batang kayu, bambu, dan lainnya. Kualitas dinding yang baik dari sisi kesehatan dan

kenyamanan adalah dinding yang terbuat dari tembok.

Gambar 6.3. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Dinding Terluas di DIY, 2016

Figure 6.3. Percentage of Household by The Widest Type of Wall In DIY, 2016



Sumber : Susenas Maret 2016  
Source : National Socio-economic Survey on March 2016

Hasil Susenas bulan Maret 2016 menggambarkan sebagian besar rumah tangga di DIY telah menempati bangunan dengan jenis dinding terluas terbuat dari tembok. Proporsinya mencapai 91,98 persen. Artinya, sebagian besar rumah tangga telah menempati bangunan yang layak dari sisi jenis dinding. Sementara, rumah tangga yang menempati bangunan dengan jenis dinding terluas selain tembok pada didominasi oleh anyaman bambu dan kayu dengan proporsi masing-masing sebesar 4,1 persen dan 2,6 persen. Sebagian besar rumah tangga ini terdapat di Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul.

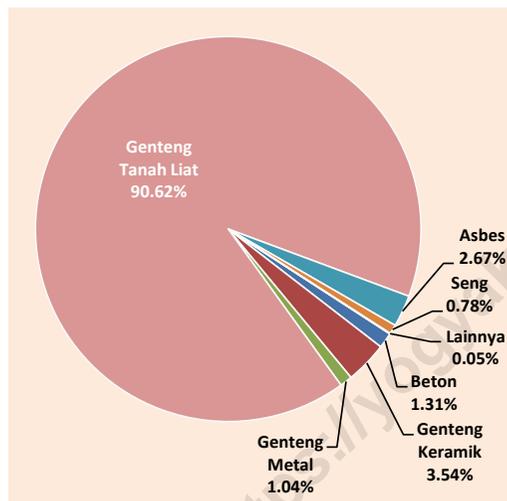
### Jenis Atap

Tingkat keehatan dan kenyamanan tempat tinggal juga sangat ditentukan oleh pemilihan jenis atap bangunan. Jenis atap bangunan tempat tinggal bisa merepresentasikan status sosial rumah tangga. Artinya, semakin baik kesejahteraan

rumah tangga akan dicerminkan oleh jenis atap yang semakin berkualitas. Jenis atap terluas dari bangunan secara berjenjang dikategorikan menjadi beton, genteng keramik, genteng metal, genteng tanah liat, asbes, seng, bambu, kayu/sirap, jerami/ijuk/rumbia, dan lainnya.

Gambar 6.4. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Atap Terluas di DIY, 2016

Figure 6.4. Percentage of Household by The Widest Type of Roof In DIY, 2016



Sumber : Susenas Maret 2016  
Source : National Socio-economic Survey on March 2016

Hasil Susenas bulan Maret 2016 menggambarkan sebagian besar rumah tangga di DIY telah menempati bangunan dengan jenis atap terluas dari genteng tanah liat. Proporsinya mencapai 90,62 persen. Artinya, sebagian besar rumah tangga telah menempati bangunan yang cukup layak dari sisi jenis atap. Sementara, proporsi rumah tangga dengan jenis dinding terluas yang lain terlihat bervariasi di bawah 4 persen. Proporsi rumah tangga dengan jenis atap terluas genteng keramik tercatat sebesar 3,54 persen, asbes 2,67 persen, beton 1,31 persen, dan genteng metal 1,04 persen.

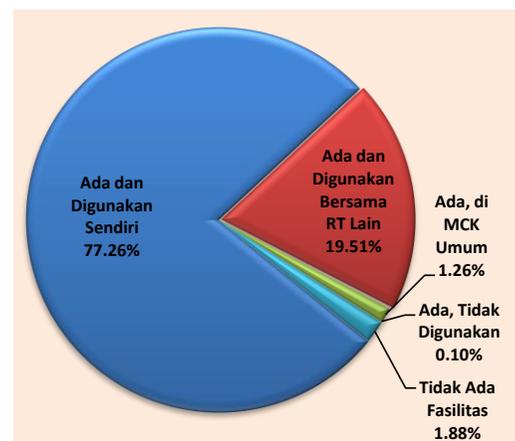
### Tempat Pembuangan Air Besar

Kualitas tempat tinggal juga ditentukan oleh fasilitas pendukung seperti

tempat pembuangan air besar. Ketersediaan fasilitas, cara penggunaan, jenis kloset, dan tempat akhir pembuangan tinja menjadi faktor yang memengaruhi taraf dan kualitas kesehatan penduduk. Ketersediaan pada level rumah tangga juga sangat diperlukan agar perilaku hidup sehat setiap anggota rumah tangga terjamin. Fasilitas tempat pembuangan air besar rumah tangga yang layak secara kesehatan atau memenuhi syarat sanitasi bisa dilihat dari aspek apakah tersedia fasilitas buang air besar milik sendiri, apakah jenis kloset yang digunakan, dan dimana tempat pembuangan akhir kotoran/tinja.

Gambar 6.5. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Fasilitas Buang Air Besar di DIY, 2016

Figure 6.5. Percentage of Household by The Type of Toilet Facilities In DIY, 2016



Sumber : Susenas Maret 2016  
Source : National Socio-economic Survey on March 2016

Sebaran rumah tangga berdasarkan fasilitas pembuangan air besar hasil Susenas 2016 di DIY disajikan dalam Gambar 6.4. Berdasarkan gambar, mayoritas rumah tangga telah memiliki fasilitas buang air besar. Rinciannya adalah fasilitas tersedia dan digunakan secara sendiri oleh ART dengan proporsi 77,26 persen. Proporsi terbesar berikutnya adalah fasilitas tersedia dan digunakan bersama dengan ART dari rumah tangga lain dengan

proporsi 19,51 persen. Proporsi rumah tangga yang menggunakan fasilitas milik umum tercatat sebesar 1,26 persen dan rumah tangga yang memiliki fasilitas tapi tidak menggunakan tercatat sebesar 0,1 persen. Sisanya, sebanyak 1,88 persen rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas buang air besar.

Jenis kloset yang digunakan oleh sebagian besar rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air besar di DIY sudah menggunakan kloset jenis leher angsa. Proporsi pada tahun 2016 mencapai 96,25 persen. Sisanya, sebanyak 0,47 persen rumah tangga masih menggunakan kloset jenis plengsengan dan 3,28 persen menggunakan kloset jenis cemplung/cubluk.

Tabel 6.5. Distribusi Rumah Tangga menurut Jenis Kloset di DIY, 2013-2016

Table 6.5. Distribution of Households by Closet Facility in DIY, 2013-2016

Tahun/ Year	Jenis Kloset Closet Facility			Jumlah/ Total
	Leher Angsa Swan Trine	Plengsengan Cemplung/ Cubluk Pit Privy	Tidak ada None	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2013	92,63	7,37	0,00	100
2014	92,47	7,47	0,06	100
2015	94,16	5,73	0,11	100
2016	96,25	3,75	0,00	100

Sumber : Susenas 2013-2015

Source : 2013-2015 National Socio Economic Survey

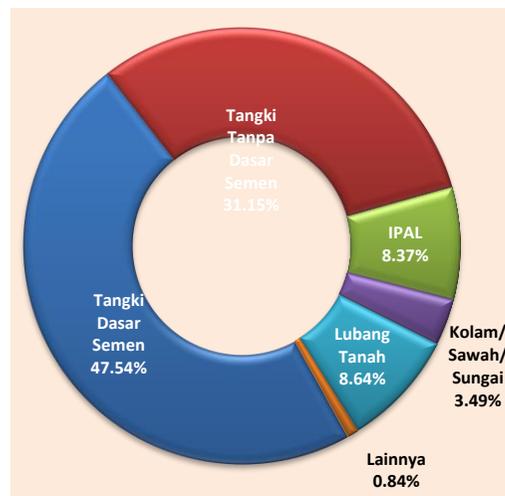
Semakin besar proporsi rumah tangga yang menggunakan fasilitas tempat pembuangan air besar jenis leher angsa mengindikasikan kesadaran masyarakat tentang sanitasi dan kesehatan yang semakin meningkat. Jenis leher angsa dianggap sebagai jenis pembuangan air besar yang paling sehat, karena di bawahnya terdapat saluran berbentuk huruf “U” untuk menampung air sehingga bau tinja

tidak bisa keluar. Perkembangan dalam empat tahun terakhir proporsi penggunaan kloset jenis leher angsa terlihat semakin meningkat.

Tempat pembuangan akhir tinja dari sebagian besar rumah tangga di DIY sampai tahun 2016 adalah tangki. Proporsinya adalah 47,94 persen untuk tangki dengan dasar semen dan 31,42 persen tangki untuk dengan dasar tanpa semen. Proporsi terbesar berikutnya adalah rumah tangga dengan tempat pembuangan akhir tinja jaringan IPAL sebesar 8,45 persen. Sisanya adalah rumah tangga dengan tempat pembuangan akhir tinja di sawah/kolam/sungai dengan proporsi 3,49 persen; lubang tanah 8,64 persen; serta lainnya 0,84 persen. Ketiga jenis tempat pembuangan akhir tinja ini belum memenuhi standar kesehatan dan sanitasi. Berdasarkan wilayah, sebagian besar rumah tangga dengan tempat pembuangan akhir tinja di bawah standar sanitasi terdapat di wilayah Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul.

Gambar 6.6. Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja di DIY, 2016

Figure 6.6. Percentage of Household by The Type of Septic Tank in DIY, 2016



Sumber : Susenas Maret 2016

Source : National Socio-economic Survey on March 2016

## Jarak Sumber Air Minum ke Tempat Penampungan Kotoran

Kualitas air yang digunakan untuk keperluan rumah tangga sangat tergantung pada jarak antara sumber air ke tempat penampungan kotoran. Jarak sumber air yang terlalu dekat dengan penampungan kotoran bisa menyebabkan perembesan kotoran ke dalam sumber air minum, sehingga akan mempengaruhi kualitas air bersih untuk keperluan rumah tangga. Jarak yang terlalu dekat akan memperbesar peluang tercemarnya air oleh bakteri dan sumber penyakit lain melalui perantara kotoran. Sumber air minum terutama pompa/sumur/ mata air dikatakan layak dan higienis jika memiliki jarak lebih dari 10 meter dari tempat penampungan kotoran.

Persentase rumah tangga dengan jarak sumber air minum ke tempat penampungan kotoran  $\geq 10$  m mencapai 75,64 persen.

Sementara, proporsi rumah tangga dengan jarak sumber air untuk memasak dan MCK ke tempat penampungan kotoran  $\geq 10$  m masing-masing sebesar 74,84 persen dan 73,56 persen.

Berdasarkan hasil Susenas selama beberapa tahun terakhir, proporsi rumah tangga yang memiliki jarak antara sumber air minum dengan penampungan kotoran 10 meter atau lebih mencapai level di atas 70 persen. Bahkan, pada tahun 2016 sudah berada pada level 75,64 persen. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, proporsi ini cenderung meningkat. Sebaliknya sumber air minum yang mempunyai jarak kurang dari 10 m sedikit menurun dari 24,33 persen pada tahun 2015 menjadi 22,34 persen pada tahun 2016. Perubahan proporsi pada dua kelompok tersebut secara kasar menggambarkan kualitas kesehatan air yang dikonsumsi penduduk semakin meningkat.

Tabel 6.6. Persentase Rumah Tangga menurut Jarak Sumber Air Minum ke Tempat Penampungan Kotoran di DIY, 2013-2016

*Table 6.6. Percentage of Household by Distance Between Source of Drinking Water to Septic Tank or other Toilet Discharge in DIY, 2013-2016*

Tahun/ Year	Jarak ke penampungan kotoran/ Distance to Septic Tank or Other Toilet Discharge (m)		
	< 10	$\geq 10$	Tidak Tahu
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	18,57	74,83	6,60
2014	21,18	71,90	6,92
2015	24,33	73,46	2,22
2016	22,34	75,64	2,01

Sumber : Susenas 2013-2016

Source : 2013-2016 National Socio Economic Survey

Pada tahun 2016, rumah tangga yang menjawab tidak tahu atau TT untuk pertanyaan jarak sumber air minum dengan penampungan dengan kotoran adalah sebesar 2,01 persen. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 yang tercatat sebesar 2,22 persen.

## Status Kepemilikan Rumah Tinggal

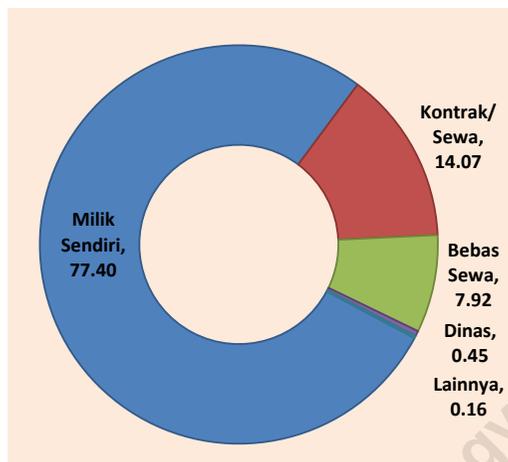
Indikator kesejahteraan penduduk juga bisa dilihat dari status kepemilikan bangunan tempat tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap status kepemilikan bangunan tempat tinggal. Rumah tangga yang berpenghasilan relatif tinggi memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memiliki bangunan tempat tinggal sendiri dibandingkan dengan rumah tangga yang berpenghasilan lebih rendah.

Dalam Susenas, status kepemilikan bangunan tempat tinggal dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu: milik sendiri, menyewa/mengontrak, bebas sewa, dinas, atau lainnya. Rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal milik

sendiri dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

Gambar 6.7. Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Tempat Tinggal di DIY, 2016

Figure 6.7. Percentage of Households by Housing Ownership Status in DIY, 2016



Sumber : Susenas Maret 2016

Source : National Socio-economic Survey on March 2016

Berdasarkan hasil Susenas 2016, presentase rumah tangga di DIY yang menempati bangunan tempat tinggal milik sendiri sebesar 77,40 persen, sedangkan sisanya (23,01 persen) menempati rumah bukan milik sendiri. Rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri terdiri atas 14,07 persen berstatus kontrak/sewa,

berstatus bebas sewa sebanyak 7,92 persen, menempati rumah dinas 0,45 persen, dan lainnya 0,16 persen.

Perkembangan selama empat tahun terakhir menunjukkan lebih dari 75 persen rumah tangga telah menempati rumah milik sendiri. Polanya terlihat cenderung meningkat secara berfluktuasi setiap tahun. Sementara presentase rumah tangga yang menempati status rumah lainnya, hanya berkisar antara 0,12 persen sampai 0,28 persen.

Tabel 6.7. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal di Daerah Istimewa Yogyakarta 2013-2016

Table 6.7. Percentage of Households by Housing Ownership Status in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2016

Status Kepemilikan Rumah Tinggal/ Tenure of Housing Unit	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
Milik Sendiri / Own	76,88	74,97	76,99	77,40
Kontrak, Sewa / Lease, Rent	13,90	15,48	13,58	14,07
Bebas Sewa / Rent free	7,52	9,00	8,88	7,92
Rumah Dinas/ Official	1,52	0,27	0,43	0,45
Lainnya / Other	0,19	0,28	0,12	0,16

Sumber : BPS, Susenas 2013-2016

Source: BPS, 2013-2016 National Socio Economic Survey

# Bab 7

## *Kemiskinan dan Ketimpangan*

### *Poverty and Inequality*

---

Tujuan utama proses pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Kesejahteraan yang dimaksud tidak semata-mata diukur dari aspek tingginya level pendapatan perkapita beserta tingkat pertumbuhannya, tetapi juga menyangkut aspek penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan antar penduduk. Tingkat kemiskinan menjadi tolok ukur utama kesejahteraan penduduk, semakin tinggi kemiskinan mencerminkan tingkat kesejahteraan yang semakin memburuk dan semakin rendah kemiskinan mencerminkan kesejahteraan yang semakin membaik. Penanggulangan kemiskinan dan kelaparan menjadi fokus pertama dari tujuan pembangunan millennium (MDG's) yang dilanjutkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's). Sasaran yang ingin dicapai adalah mengentaskan kemiskinan di semua tempat. Fakta ini menyiratkan bahwa kemiskinan merupakan masalah yang sangat mendesak untuk diatasi dan ditanggulangi.

Gambaran mengenai ukuran kemiskinan absolut, perkembangan, distribusi, dan kedalamannya dapat dikaji menggunakan beberapa indikator kemiskinan. Indikator kemiskinan yang lazim digunakan adalah ukuran Foster, Greer, Thorbecke (FGT) yang membagi ukuran kemiskinan menjadi tiga, yakni persentase penduduk miskin ( $P_0$ ), Indeks kedalaman kemiskinan ( $P_1$ ), dan indeks keparahan kemiskinan ( $P_2$ ).

#### **Pengukuran Kemiskinan Dan Perkembangan Garis Kemiskinan**

Dimensi kemiskinan tidak hanya menyangkut aspek ekonomi semata, tetapi juga menyangkut aspek sosial dan kultural atau dengan kata lain kemiskinan bersifat multidimensional. Meskipun demikian,

metode pengukuran kemiskinan yang digunakan di banyak negara termasuk Indonesia masih bertumpu pada pendekatan moneter atau ekonomi yang menggunakan basis pendapatan atau pengeluaran. Konsep kemiskinan yang digunakan di Indonesia adalah pendekatan pengeluaran yang dikenal dengan pendekatan kebutuhan dasar minimum (*basic needs approach*).

Kebutuhan dasar minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang yang mencakup kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kalori perkapita sehari ditambah dengan kebutuhan non makanan yang mendasar (pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya). Ukuran ini yang disebut dengan garis kemiskinan. Seseorang akan dikatakan miskin apabila memiliki pengeluaran sebulan lebih rendah dari garis kemiskinan. Garis kemiskinan dihitung dalam bentuk absolut berdasarkan survei pengeluaran rumah tangga (Susenas) modul konsumsi. Sementara, angka kemiskinan diestimasi menggunakan data Susenas kor secara berkala di bulan Maret dan September.

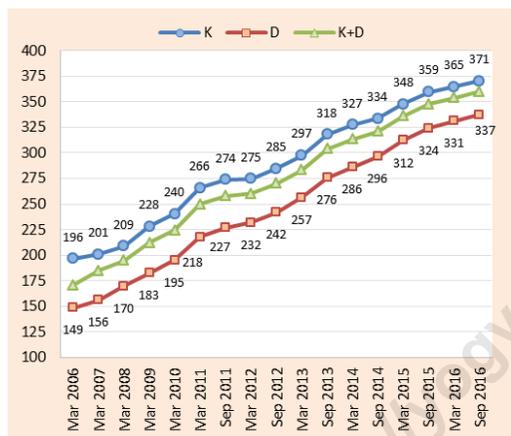
Perkembangan garis kemiskinan DIY selama periode 2006-2016 menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Peningkatan ini terjadi seiring dengan kenaikan harga barang dan jasa kebutuhan rumah tangga atau inflasi dan perubahan pola konsumsi penduduk. Nilai nominal garis kemiskinan pada kondisi Maret 2006 tercatat sebesar Rp170,- ribu per kapita sebulan. Nilai nominal ini terus meningkat menjadi Rp360,- ribu pada kondisi bulan September 2016.

Secara umum, garis kemiskinan DIY tercatat selalu lebih tinggi dibandingkan

dengan garis kemiskinan nasional. Faktor ini menjadi salah satu penyebab level kemiskinan DIY yang cenderung lebih tinggi dari angka nasional, karena ukuran kemiskinan sangat sensitif terhadap garis kemiskinan yang digunakan.

Gambar 7.1. Perkembangan Garis Kemiskinan menurut Wilayah di D.I. Yogyakarta, 2006-2016 (000Rp)

Figure 7.1. Trend of Poverty Line by Area in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2006-2016 (000Rp)



Sumber: Susenas, 2006-2016

Source: 2006-2016 National Socio Economic Survey

Secara umum, level garis kemiskinan daerah perkotaan tercatat selalu lebih tinggi dari daerah perdesaan. Perbedaan level garis kemiskinan tersebut terkait dengan pola konsumsi penduduk perkotaan yang cenderung lebih bervariasi. Di samping itu, persoalan kuantitas atau frekuensi konsumsi juga turut memberi pengaruh terhadap perbedaan level garis kemiskinan. Perbedaan tingkat pendapatan perkapita antar daerah yang cukup tinggi dan faktor budaya juga menjadi penyebab perbedaan pola konsumsi antar wilayah. Perkembangan nilai nominal garis kemiskinan di wilayah perkotaan dan perdesaan sama-sama menunjukkan pola yang semakin meningkat.

### Perkembangan Penduduk Miskin

Perkembangan jumlah penduduk miskin (*Head Count/HC*) di DIY selama

periode 2006-2016 menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun. Namun demikian, pola penurunannya terlihat cukup berfluktuasi. Pada tahun 2006, jumlah penduduk miskin di DIY tercatat sebanyak 648,7 ribu jiwa dengan persentase (HCI) sebesar 19,15 persen. Tingginya level kemiskinan pada saat itu dipengaruhi oleh dampak bencana alam gempa bumi dan kebijakan pemerintah mengurangi subsidi BBM yang berpengaruh terhadap tingginya laju inflasi selama periode tersebut. Secara bertahap, jumlah penduduk miskin maupun persentasenya semakin menurun hingga mencapai jumlah 488,8 ribu jiwa atau sebesar 13,10 persen di bulan September 2016.

Berdasarkan data *series* selama periode 2006-2016, jumlah penduduk miskin terlihat beberapa kali mengalami peningkatan pada kondisi Maret 2011, Maret 2014, dan Maret 2015. Hal ini terjadi akibat kenaikan harga yang cukup tinggi terutama berkaitan dengan kenaikan harga bahan makanan, bahan bakar, dan energi. Kenaikan harga ini berimplikasi pada kenaikan harga barang dan jasa kebutuhan rumah tangga lainnya, sehingga garis kemiskinan juga meningkat dan secara otomatis jumlah penduduk miskin (jiwa) juga meningkat.

Berdasarkan penyebarannya, tingkat kemiskinan di daerah perdesaan tercatat selalu lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan selama lebih dari satu dekade terakhir. Hal ini terlihat dari persentase penduduk miskin perdesaan yang selalu lebih tinggi dari perkotaan, meskipun dari sisi jumlah penduduk miskin (jiwa) di daerah perkotaan sudah melampaui daerah perdesaan sejak tahun 2005 akibat pengaruh klasifikasi status wilayah. Perkembangan kemiskinan di daerah perkotaan tercatat semakin menurun secara bertahap dari 17,85 persen atau 346,0 ribu jiwa di bulan Maret 2006 menjadi 11,68 persen atau 301,3 ribu jiwa di bulan September 2016.

Tabel 7.1 Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut Wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2006-2016

Table 7.1. Trend of Head Count and Head Count Index by Area in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2006-2016

Tahun	Perkotaan (K)		Perdesaan (D)		(K+D)	
	HC (000)	HCI (%)	HC (000)	HCI (%)	HC (000)	HCI (%)
Mar 2006	346,0	17,85	302,7	27,64	648,7	19,15
Mar 2007	335,3	15,63	298,2	25,03	633,5	18,99
Mar 2008	324,2	14,99	292,1	24,32	616,3	18,32
Mar 2009	311,5	14,25	274,3	22,60	585,8	17,23
Mar 2010	308,4	13,98	268,9	21,95	577,3	16,83
Mar 2011	304,3	13,16	256,6	21,82	560,9	16,08
Sep 2011	298,9	12,88	265,3	22,57	564,2	16,14
Mar 2012	305,9	13,13	259,4	21,76	565,3	16,05
Sep 2012	306,5	13,10	255,6	21,29	562,1	15,88
Mar 2013	315,5	13,43	234,7	19,29	550,2	15,43
Sep 2013	325,5	13,73	209,7	17,62	535,2	15,03
Mar 2014	333,0	13,81	211,8	17,36	544,9	15,00
Sep 2014	324,4	13,36	208,2	16,88	532,6	14,55
Mar 2015	329,7	13,43	220,6	17,85	550,2	14,91
Sep 2015	292,6	11,93	192,9	15,62	485,6	13,16
Mar 2016	297,7	11,79	197,2	16,63	494,9	13,34
Sep 2016	301,3	11,68	187,6	16,27	488,8	13,10

Sumber: Diolah dari data Susenas, 2006-2016  
Source: Based on National Socio Economic Survey, 2006-2016

Tingkat kemiskinan di daerah perdesaan juga tercatat semakin menurun secara bertahap dari 302,7 jiwa atau 27,64 persen di bulan Maret 2016 menjadi 187,6 ribu jiwa atau 16,27 persen di bulan September 2016. Dampak kenaikan harga BBM di tahun 2005 memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap level kemiskinan perdesaan maupun perkotaan.

### Perkembangan Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan tidak sekedar mencakup urusan jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi juga menyangkut dimensi kedalaman (*poverty gap index*) dan keparahan (*poverty severity index*) dari kemiskinan. Secara sederhana, indeks

kedalaman kemiskinan ( $P_1$ ) menggambarkan sejauh mana pendapatan kelompok penduduk miskin menyimpang dari garis kemiskinan. Sementara, indeks keparahan kemiskinan ( $P_2$ ) menyatakan ketimpangan pendapatan di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman dan keparahan menunjukkan persoalan kemiskinan yang semakin kronis.

Berdasarkan data series selama Maret 2008 sampai September 2016, terdapat kecenderungan penurunan indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan baik secara rata-rata maupun di daerah perkotaan dan perdesaan. Penurunan ini menjadi sinyal yang mengembirakan bagi pengentasan kemiskinan, meskipun dari sisi pola terlihat cukup berfluktuasi.

Tabel 7.2. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan menurut Wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2008-2016

Table 7.2. Poverty Gap Index and Poverty Severity Index by Area in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2008-2016

Indeks	Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ )			Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ )		
	K	D	K+D	K	D	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Mar 2008	2,72	4,49	3,35	0,71	1,29	0,92
Mar 2009	2,84	4,74	3,52	0,81	1,46	1,04
Mar 2010	2,27	3,89	2,85	0,56	1,02	0,73
Mar 2011	1,93	3,67	2,51	0,50	0,93	0,65
Sep 2011	1,93	3,54	2,48	0,48	0,81	0,59
Mar 2012	3,56	3,29	3,47	1,32	0,79	1,14
Sep 2012	2,29	4,07	2,89	0,58	1,09	0,75
Mar 2013	2,08	3,02	2,40	0,50	0,63	0,55
Sep 2013	2,18	2,03	2,13	0,52	0,34	0,46
Mar 2014	2,22	2,11	2,19	0,53	0,40	0,48
Sep 2014	2,03	2,98	2,35	0,52	0,79	0,61
Mar 2015	2,55	3,70	2,93	0,71	1,09	0,83
Sep 2015	2,19	2,57	2,32	0,60	0,68	0,63
Mar 2016	1,78	3,41	2,30	0,38	1,05	0,59
Sep 2016	1,26	2,83	1,75	0,22	0,67	0,36

Sumber: Susenas, 2008-2016  
Source: National Socio Economic Survey, 2008-2016

Selama periode 2008-2016, indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan di daerah perdesaan tercatat selalu lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan. Tetapi, pada bulan Maret 2012, September 2013 dan Maret 2014 nilai kedua indeks di daerah perdesaan justru lebih rendah. Pada kondisi September 2016 indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan daerah perkotaan tercatat sebesar 1,26 dan 0,22. Sementara, nilai kedua indeks di daerah perdesaan tercatat sebesar 2,83 dan 0,67. Secara umum, fenomena lebih tingginya nilai kedua indeks di daerah perdesaan menggambarkan persoalan kemiskinan di perdesaan yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan daerah perkotaan.

Nilai indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan DIY pada bulan kondisi September 2016 masing-masing mencapai 1,75 dan 0,36. Nilai ini sedikit menurun dibandingkan periode bulan yang sama di tahun 2015 maupun bulan Maret 2016. Artinya, rata-rata pengeluaran penduduk miskin pada kondisi bulan September 2016 semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin menyempit.

### Sebaran Penduduk Miskin menurut Kabupaten/ Kota

Distribusi penduduk miskin menurut wilayah kabupaten/kota di DIY menunjukkan pola yang tidak merata. Ketidakerataan ini ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin (HC) maupun persentasenya (HCI) yang sangat bervariasi antar wilayah. Berdasarkan jumlah, sebaran penduduk miskin tahun 2016 sebagian besar terdapat di Kabupaten Bantul dan Gunungkidul. Jumlah penduduk miskin di kedua kabupaten tercatat sebesar 142,76 ribu dan 139,15 ribu jiwa. Sementara populasi penduduk miskin yang terendah terdapat di Kota Yogyakarta sebesar 32,06 ribu jiwa.

Berdasarkan persentase, maka Kabupaten Kulonprogo dan Gunungkidul menjadi dua daerah yang memiliki level kemiskinan tertinggi di DIY. Persentase penduduk miskin di kedua kabupaten pada kondisi Maret 2016 tercatat sebesar 20,30 persen dan 19,34 persen. Sementara, Kota Yogyakarta dengan level kemiskinan 7,7 persen dan Kabupaten Sleman dengan level kemiskinan 8,21 persen menjadi dua daerah dengan persentase penduduk miskin terendah di DIY.

Tabel 7.3. Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2015-2016

*Table 7.3. Poverty Line, Head Count, and Head Count Index by Regency/City in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2015-2016*

Kabupaten/ Kota	2015			2016		
	GK (Rp 000)	HC (000 Jiwa)	HCI (%)	GK (Rp 000)	HC (000 Jiwa)	HCI (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kulonprogo	273,44	88,13	21,40	297,35	84,34	20,30
Bantul	312,51	160,15	16,33	332,06	142,76	14,55
Gunungkidul	250,63	155,00	21,73	264,64	139,15	19,34
Sleman	318,31	110,96	9,46	334,41	96,63	8,21
Yogyakarta	383,97	35,98	8,75	401,19	32,06	7,70
<b>DIY</b>	<b>335,89</b>	<b>550,23</b>	<b>14,91</b>	<b>354,08</b>	<b>494,94</b>	<b>13,34</b>

Sumber: Dihitung dari data Susenas, 2015-2016  
Source: Based on National Socio Economic Survey, 2015-2015

Secara umum, perbedaan tersebut merepresentasikan tingkat kesejahteraan penduduk antar wilayah yang cukup heterogen. Perbedaan kualitas infrastruktur fisik terutama sarana pendidikan, sarana kesehatan serta infrastruktur perekonomian seperti pasar, baik dari sisi ketersediaan maupun kemudahan dalam mengakses menjadi penjelasa perbedaan kualitas kesejahteraan masyarakat yang cukup mencolok tersebut. Perkembangan kemiskinan di kabupaten/kota selama lima tahun terakhir secara umum menunjukkan pola yang menurun. Penurunan dari sisi

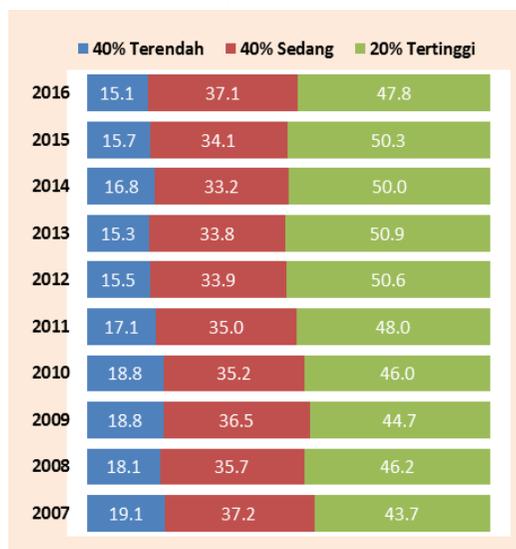
jumlah yang terbesar terjadi di Kabupaten Gunungkidul. Sementara, penurunan dari sisi persentase yang terbesar terjadi di Kabupaten Kulonprogo.

### Perkembangan Distribusi Pendapatan

Kebijakan untuk mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi di satu sisi berdampak baik bagi peningkatan kesejahteraan penduduk secara rata-rata. Namun, di sisi lain juga membawa persoalan berupa peningkatan ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan. Hal ini terjadi karena distribusi aset dan *skill* yang tidak tersebar secara merata antarpenduduk. Akibatnya, pendapatan yang diperoleh juga sangat bervariasi sesuai dengan kepemilikan aset dan keterampilan. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur ketimpangan dalam distribusi pendapatan antar penduduk (distribusi ukuran) adalah ukuran Bank Dunia, Gini Rasio, indeks Theil, Ukuran Desil, dan lainnya.

Gambar 7.2. Distribusi Pengeluaran menurut Kelompok Pengeluaran di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2007-2016

Figure 7.2. *Distribution of per Capita Expenditure by Group in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2007-2016*

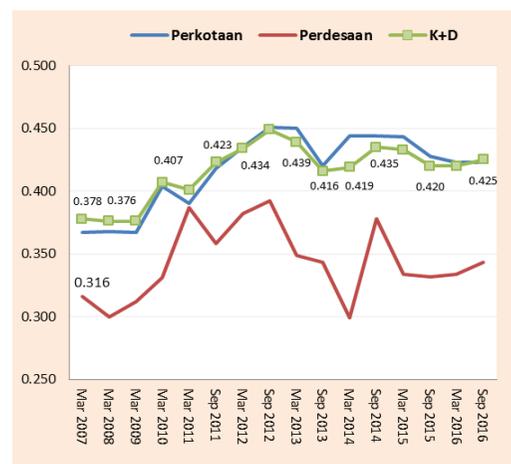


Sumber: Diolah dari data Susenas, 2005-2016  
 Source: Based on National Socio Economic Survey, 2007-2016

Berdasarkan data Susenas pada bulan Maret tahun 2007-2016, distribusi pendapatan yang diproksi dengan pendekatan pengeluaran per kapita penduduk menunjukkan pola yang semakin tidak merata atau semakin timpang. Pada tahun 2016, 40 persen penduduk yang berpendapatan terendah memiliki *share* pengeluaran sebesar 15,1 persen dari total pengeluaran penduduk. Angka ini terlihat semakin menurun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada kondisi Maret 2007, *share* pengeluaran kelompok 40 persen berpendapatan terendah tercatat sebesar 19,1 persen dari total pengeluaran penduduk. Sebaliknya, 20 persen penduduk pada golongan pendapatan tertinggi memiliki porsi pengeluaran sebesar 47,8 persen. Porsi ini jauh meningkat dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang mencapai 43,7 persen dari total pengeluaran penduduk. Jika dihitung dengan rasio Kuznets maka total pengeluaran 20% penduduk berpendapatan tertinggi besarnya 3 kali lipat pengeluaran 40% penduduk pada golongan berpendapatan terendah.

Gambar 7.3. Perkembangan Indeks Gini di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional, 2007-2016

Figure 7.3. *Trend of Gini Index in Daerah Istimewa Yogyakarta and National, 2007-2016*



Sumber: Diolah dari data Susenas bulan Maret, 2007-2016  
 Source: Based on March National Socio Economic Survey

Fenomena adanya ketimpangan pendapatan antar penduduk yang cukup lebar. juga diperjelas oleh nilai koefisien Gini pada bulan Maret 2016 yang mencapai 0,42 atau berada pada kategori yang moderat. Perkembangan indeks Gini selama periode 2007-2016 menunjukkan kecenderungan ketimpangan yang semakin meningkat, meskipun ada fluktuasi selama periode tersebut. Kecenderungan peningkatan nilai indeks Gini menggambarkan distribusi

pendapatan antar penduduk yang bergerak semakin tidak merata. Secara umum, kondisi distribusi pengeluaran di daerah perdesaan tercatat lebih merata dibandingkan dengan daerah perkotaan. Sementara, jika dibandingkan dengan level nasional, maka nilai indeks Gini DIY selalu terlihat lebih tinggi atau kondisi distribusinya lebih timpang.

<https://yogyakarta.bps.go.id>

# Bab 8 *Indikator Sosial Lainnya*

## Other Social Indicators

Tingkat kesejahteraan penduduk juga bisa dilihat dari aspek sosial yang lain. Beberapa diantaranya adalah kegiatan perjalanan dan pariwisata, akses terhadap media informasi dan komunikasi, tingkat keamanan, tingkat kejahatan, dan akses terhadap kehidupan spiritual.

Wisata yang merupakan kebutuhan tersier masyarakat dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan atau menjadi ukuran kesejahteraan. Semakin tinggi kesejahteraan seseorang, maka akan semakin tinggi pula peluang untuk memenuhi kebutuhan non primer, termasuk kebutuhan pariwisata. Di sisi yang lain, tingkat kesejahteraan masyarakat juga bisa dipengaruhi oleh tingkat kunjungan wisatawan. Makin tinggi tingkat kunjungan wisatawan dapat memberi dampak penambahan manfaat/kesejahteraan masyarakat melalui belanja yang dikeluarkan dari kunjungan para wisatawan.

Kemudahan akses terhadap media informasi merupakan basis perkembangan pengetahuan seseorang. Hal ini dapat mengubah pandangan dan cara hidup ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, kepemilikan beserta akses terhadap media informasi juga bisa menggambarkan tingkat kesejahteraan seseorang. Selain itu, ukuran kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari kegiatan non ekonomi yang menyangkut kebutuhan spiritual seperti keagamaan. Waktu yang dimiliki tidak semata-mata untuk kegiatan mencari nafkah, tetapi juga harus bisa meluangkan waktu untuk kegiatan keagamaan. Khususnya pada masyarakat muslim, tingkat kesejahteraan secara umum bisa dilihat dari peningkatan jumlah jamaah haji dari waktu ke waktu.

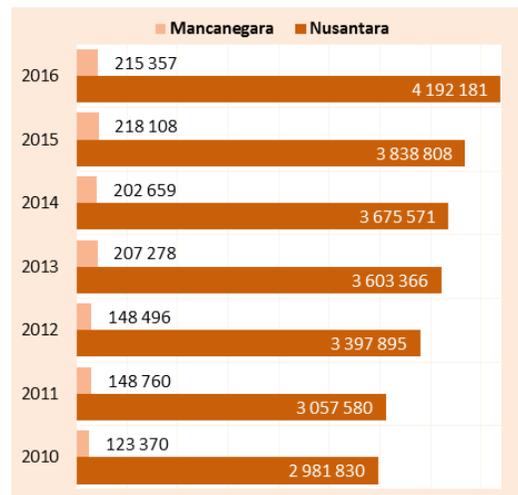
Kesejahteraan penduduk juga bisa diukur dari aspek kegiatan sosial dan budaya.

### Pariwisata

Pariwisata merupakan industri yang digerakkan oleh permintaan atau dihidupi oleh wisatawan dan suplainya disediakan oleh kegiatan sektoral terutama akomodasi, makan dan minum, transportasi, jasa, dan lainnya. DIY dikenal menjadi salah satu destinasi pariwisata di Indonesia yang banyak memiliki potensi baik wisata alam maupun budaya, baik wisata yang bersifat masal maupun minat khusus. Kegiatan pariwisata di DIY senantiasa dikembangkan dan ditingkatkan eksistensinya, dengan harapan dapat menggerakkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan.

Gambar 8.1. Jumlah Wisatawan yang Menginap di Losmen dan Hotel di DIY, 2010-2016 (000)

Figure 8.1. Number of Tourist who Spent The Night at Inn and Hotel in DIY, 2010-2016 (000)



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2010-2016  
Source: BPS-Statistics of DIY Province, 2010-2016

Salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan kegiatan pariwisata adalah jumlah kunjungan wisata baik domestik maupun mancanegara.

Jumlah wisatawan yang berkunjung bisa diukur dengan pendekatan jumlah wisatawan yang menginap di hotel dan akomodasi lain di wilayah DIY atau berdasarkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke setiap destinasi wisata di wilayah DIY.

Secara umum, perkembangan jumlah kunjungan wisatawan yang menginap di fasilitas penginapan seperti hotel maupun losmen terlihat semakin meningkat. Jumlah wisatawan yang menginap selama tahun 2016 tercatat sebanyak 4,4 juta. Komposisinya terdiri dari 4,2 juta wisatawan nusantara/domestik dan 215 ribu wisatawan asing/mancanegara. Artinya, wisatawan nusantara lebih mendominasi dengan pangsa 95 persen. Selama enam tahun terakhir, jumlah kunjungan wisatawan yang menginap di hotel dan akomodasi di DIY rata-rata tumbuh 6 persen per tahun. Pertumbuhan ini lebih dipengaruhi oleh kunjungan wisatawan nusantara yang polanya cenderung meningkat. Sementara, perkembangan kunjungan wisatawan mancanegara terlihat lebih berfluktuasi dan secara jumlah tidak dominan.

Tabel 8.1. Pertumbuhan Jumlah Wisatawan yang Menginap di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2011-2016 (Persen)

*Table 8.1. Growth of Tourist who Spent The Night in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2011-2016 (Percent)*

Tahun/ Year	Wisatawan Nusantara/ <i>Domestic Tourists</i>		Wisatawan Mancanegara/ <i>Foreign Tourist</i>		Pertum buhan Total/ Total Growth
	Pertum buhan/ Growth	Pangsa/ Share	Pertum buhan/ Growth	Pangsa/ Share	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2011	2,54	95,36	20,58	4,64	3,26
2012	11,13	95,81	-0,18	4,19	10,61
2013	6,05	94,56	39,58	5,44	7,45
2014	2,00	94,77	-2,23	5,23	1,77
2015	4,44	94,62	7,62	5,38	4,61
2016	9,21	95,11	-1,26	4,89	8,64

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2011-2016  
Source: BPS-Statistics of DIY Province, 2011-2016

Secara umum, banyaknya wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang menginap di DIY selama tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 8,64 persen. Angka ini lebih besar dibanding pertumbuhan pada tahun sebelumnya yang hanya mencapai angka 4,61 persen. Wisatawan nusantara tumbuh 9,21 persen, sementara wisatawan asing tumbuh minus 1,26 persen. Berdasarkan negara asalnya, jumlah wisatawan mancanegara yang menginap di hotel bintang dan non bintang pada tahun 2016 sebagian besar berasal dari negara Belanda, Jepang, dan Malaysia.

### Perjalanan

Konsep perjalanan yang digunakan BPS dalam Susenas adalah perjalanan yang dilakukan penduduk dalam wilayah geografis Indonesia secara sukarela kurang dari 6 bulan waktu referensi pencacahan dan bukan untuk tujuan memperoleh upah/gaji di tempat yang dikunjungi atau sekolah, serta bersifat bukan perjalanan rutin. Perjalanan yang dicakupa adalah bepergian ke obyek pariwisata atau menginap di akomodasi komersial atau menempuh jarak 100 km atau lebih secara pulang pergi.

Tabel 8.2 menyajikan perkembangan proporsi penduduk DIY yang melakukan kegiatan perjalanan selama hasil Susenas periode 2013-2016. Jumlah penduduk DIY yang melakukan kegiatan perjalanan pada tahun 2016 mencapai 30,03 persen. Proporsi ini lebih meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 26,03 persen. Secara umum, tidak ada perbedaan yang mencolok antara laki-laki dan perempuan dalam hal kegiatan perjalanan. Proporsi penduduk laki-laki yang melakukan perjalanan tercatat sebesar 30,52 persen, sementara penduduk perempuan sebesar 29,55 persen.

Berdasarkan tujuan, sebagian besar perjalanan terakhir yang dilakukan oleh penduduk DIY selama tahun 2016 bertujuan untuk kegiatan berlibur/rekreasi. Proporsinya

mencapai 52,56 persen dari total penduduk yang melakukan perjalanan. Tujuan terbesar berikutnya adalah mengunjungi teman/keluarga. Berdasarkan wilayah tujuan, 92,69 persen perjalanan memiliki tujuan ke provinsi-provinsi di Pulau Jawa, terutama DIY dan Jawa Tengah. Sementara, perjalanan ke luar Pulau Jawa didominasi oleh tujuan ke Bali dan Nusa Tenggara.

Tabel 8.2. Persentase Penduduk yang Melakukan Perjalanan Menurut Jenis Kelamin di Daerah Istimewa Yogyakarta 2013-2016

Table 8.2. Percentage of Population Who Traveled by Sex in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2016

Tahun/ Year	Laki-Laki/ Male	Perempuan/ Female	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
2013 *)	20,09	19,17	19,62
2014	18,15	17,51	17,82
2015	26,39	25,67	26,03
2016	30,52	29,55	30,03

Sumber: BPS, Susenas 2013-2016

Source : 2013-2016 National Socio-Economic Survey Ket./Note: \*)Data Tahun 2013 Backcast

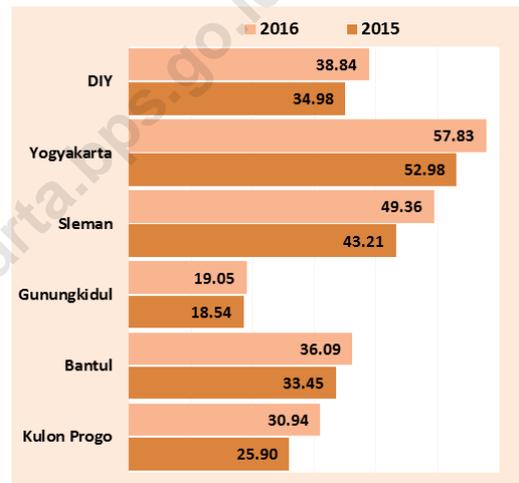
### Akses pada Teknologi Komunikasi dan Informasi

Kesejahteraan penduduk memiliki relasi dengan kemudahan dalam mengakses informasi dari berbagai sumber. Semakin sejahtera penduduk, maka akan semakin mudah akses penduduk terhadap sumber informasi. Hal ini akan direpresentasikan oleh semakin besarnya proporsi penduduk yang bisa memanfaatkan teknologi komunikasi dan mengakses informasi. Dalam era globalisasi, berbagai informasi yang ada di seluruh belahan dunia dapat diakses melalui berbagai media termasuk media elektronik. Seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi, maka rumahtangga sudah tidak hanya menggunakan PC (*personal Computer*) di rumah tangga untuk mengakses informasi.

Masyarakat sudah mulai beralih menggunakan media lain seperti telepon seluler, tablet, dan berbagai media lainnya untuk mengakses berbagai kebutuhan informasi dan pengetahuan.

Gambar 8.2 Persentase Penduduk yang Mengakses Internet Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2015-2016

Figure 8.2. Percentage of Population with Access to Internet by Regency in DIY, 2015-2016



Sumber: Susenas Maret 2015-2016, BPS Provinsi DIY  
Source: Susenas on March 2015-2016, BPS-Statistics of DIY Province

Berdasarkan hasil Susenas pada bulan Maret 2016, besarnya proporsi penduduk DIY berusia 5 tahun ke atas yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir referensi waktu pencacahan tercatat sebesar 38,84 persen. Dibandingkan dengan tahun 2015 proporsi ini meningkat 3,9 poin persen. Artinya, semakin populasi penduduk yang mengakses internet semakin bertambah. Secara kewilayahan, proporsi penduduk yang mengakses internet terbesar tercatat di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman masing-masing sebesar 57,83 persen dan 49,36 persen penduduk. Besarnya populasi pengakses internet ini memiliki relasi positif dengan tingkat kesejahteraan penduduk dan keduanya menjadi dua wilayah yang memiliki tingkat kesejahteraan tertinggi di DIY.

Media yang biasa digunakan untuk mengakses internet adalah desktop (PC), laptop, Handphone, maupun media lainnya. Pada tahun 2016, penduduk yang mengakses internet sebagian besar menggunakan media telepon seluler. Proporsinya mencapai 93,51 persen dari pengguna internet. Angka ini bertambah 4,74 poin persen dibandingkan dengan kondisi 2015 yang sebesar 88,77 persen. Sementara, penggunaan media PC, Laptop, dan lainnya cenderung menurun. Hal ini menggambarkan adanya perubahan pemanfaatan media untuk mengakses internet. Penggunaan handphone tidak lagi hanya untuk alat telepon atau SMS saja, namun sudah mulai berkembang untuk *browsing internet* dan media sosial.

pengakses internet. Penduduk yang menggunakan internet untuk hiburan, tugas sekolah, dan email proporsinya hampir sama pada kisaran 40 persen. Sementara, penduduk yang menggunakan internet untuk kegiatan perdagangan/jual beli barang dan jasa serta aktifitas *e-banking* masih relatif rendah. Proporsi masing-masing sebesar 15,24 persen dan 8,74 persen dari total pengguna internet. Dari sisi demografis penduduk, penguasaan media PC, seluler, laptop/notebook/tablet, dan media lainnya yang terbesar terdapat pada kelompok penduduk berusia muda (13-35 tahun). Demikian pula dari sisi akses internet, proporsi pengguna yang terbesar adalah kelompok penduduk muda berusia 13-35 tahun.

Tabel 8.3. Persentase Penduduk yang mengakses Internet Menurut Jenis Media yang digunakan di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2015-2016

Table 8.3. Percentage of Household with Access to Internet by Types of Information Tools in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2015-2016

Media / Information Tools	2015	2016
(1)	(2)	(3)
PC/Desktop/Computer	35,33	31,47
Laptop/Laptop	52,91	47,63
Telepon Seluler/ Handphone	88,77	93,51
Lainnya/Others	3,12	1,33

Sumber : BPS, Susenas 2015

Source : BPS, 2015 National Socio Economic Survey

Sebagian besar pengguna internet di DIY mengakses internet di rumah sendiri. Proporsinya mencapai 95,01 persen dari total pengguna internet. Lokasi berikutnya adalah tempat/fasilitas umum dengan proporsi 55,87 persen. Berdasarkan jenis konten internet yang diakses, sebagian besar penduduk mengakses internet untuk media/jejaring sosial dan mendapatkan berita/informasi dengan proporsi masing-masing sebesar 89,78 persen dan 86,91 persen dari total

### Tindak Kejahatan

Tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah juga bisa digambarkan oleh indikator tingkat keamanan maupun tindak kejahatan yang terjadi. Wilayah yang kurang aman dan rawan kejahatan akan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa tidak nyaman untuk tinggal di tempat tinggalnya sendiri. Hal ini berarti tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut menurun. Peran pemerintah dalam menjamin dan menjaga keamanan dan ketertiban wilayah sangat strategis. Namun, kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sendiri juga sangat dibutuhkan.

Tabel 8.4 menyajikan data proporsi penduduk di DIY yang menjadi korban kejahatan selama satu tahun terakhir dari referensi pencacahan. Jenis kejahatan yang dicatat adalah pencurian, pencurian dengan kekerasan, penganiayaan, pelecehan seksual, dan lainnya. Secara umum, proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan pada tahun 2016 tercatat sebesar 1,17 persen. Angka ini sedikit menurun

dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 1,39 persen.

Berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki lebih rentan menjadi korban kejahatan dibandingkan penduduk perempuan. Hal ini ditunjukkan oleh proporsi penduduk laki-laki yang menjadi korban kejahatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perempuan. Pada tahun 2016, proporsi penduduk laki-laki yang menjadi korban kejahatan tercatat sebesar 1,39 persen dan sedikit menurun dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 1,85 persen. Sementara, proporsi perempuan yang menjadi korban kejahatan tercatat sebesar 0,95 persen dan relatif sama dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 0,94 persen.

Tabel 8.4. Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Jenis Kelamin di DIY, 2013-2016

Table 8.4. Percentage of Population Who Ever Became the Victim of Criminal Acts by Sex in DIY, 2013-2016

Tahun/ Year	Laki-Laki/ Male	Perempuan/ Female	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
2013 <sup>1)</sup>	1,49	0,84	1,16
2014	1,49	0,94	1,21
2015	1,85	0,94	1,39
2016	1,39	0,95	1,17

Sumber : BPS, Susenas 2013-2016  
Source : BPS, 2013-2016 National Socio Economic Survey  
Ket./Note : <sup>1)</sup> Data Tahun 2013 Backcast

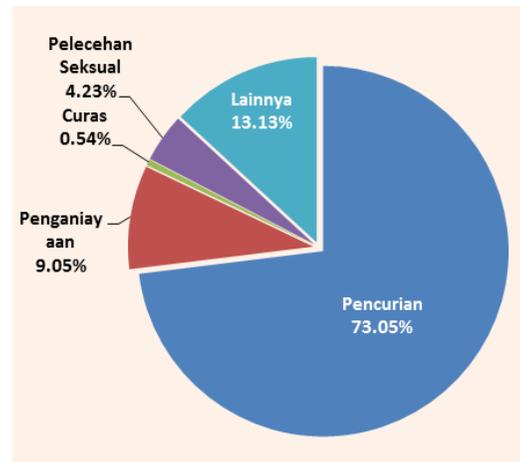
Jenis kejahatan yang paling banyak dialami oleh penduduk DIY selama satu tahun terakhir referensi pencacahan kondisi Maret 2016 adalah kejahatan pencurian. Proporsinya mencapai 73,05 persen. Berikutnya adalah penganiayaan dengan proporsi 9,05 persen, serta pelecehan seksual dengan proporsi 4,23 persen. Berdasarkan wilayah, kejadian kejahatan yang paling banyak terjadi di Kabupaten

Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta. Sebagian besar kejadian kejahatan terjadi di dalam rumah tempat tinggal, kecuali kejadian pelecehan seksual. Kejahatan pelecehan seksual lebih banyak terjadi di luar rumah tempat tinggal.

Salah satu tindakan yang diambil oleh korban kejahatan adalah melaporkan kejadian ke pihak kepolisian. Berdasarkan Susenas Maret 2016, banyaknya kejadian kejahatan di DIY yang dilaporkan ke kepolisian mencapai 23,4 persen. Dari seluruh kejadian kejahatan yang dilaporkan proporsi kejadian yang masih dalam penanganan pihak kepolisian mencapai 74,4 persen.

Gambar 8.3. Proporsi Penduduk yang pernah Menjadi Korban Kejahatan di DIY menurut Jenis Kejahatan, 2016

Figure 8.3. Proportion of Population Who Ever Became the Victim of Criminal Acts in DIY by Type of Victim, 2016



Sumber : BPS, Susenas Maret 2016  
Source : National Socio Economic Survey on March 2016

### Jemaah Haji

Pembangunan kehidupan beragama bertujuan untuk meningkatkan kualitas umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan, ketaqwaan, dan kerukunan. Salah satu upaya yang dilakukan antara lain melalui peningkatan pelayanan jemaah haji.

Tabel 8.5. Banyaknya Pemeluk Agama Islam, Jemaah Haji, dan Rasio Jemaah Haji per 100.000 Penduduk Pemeluk Agama Islam di DIY, 2013 - 2016

*Table 8.5. Number of Moslem, Pilgrim, and Ratio of Pilgrim per 100.000 Moslem in DIY, 2013- 2016*

Tahun/ Year	Banyaknya Total			Rasio per 100.000 pemeluk agama Islam/ Ratio
	Pemeluk agama Islam/ Moslem	Jemaah haji/ Haji Pilgrim		
		Laki-Laki/ Male	Perem- puan/ Female	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2013	3 355 990	1 188	1 289	73,81
2014	3 351 615	1 194	1 277	73,73
2015	3 304 508	1 151	1 317	74,69
2016	3 489 646	1 161	1 302	70,58

Sumber: Kanwil Kemenag. DIY

Source : *Regional Office of Religious Affairs Department of DIY*

Perkembangan jumlah jemaah haji dari DIY selama empat tahun terakhir tercatat semakin menurun. Jemaah haji pada tahun 2012 tercatat sebanyak 3.093 orang. Jumlah ini semakin menurun hingga 2.463 orang di tahun 2016 atau turun 5,5 persen setiap

tahun selama periode 2012-2016. Penurunan ini dipengaruhi oleh penyesuaian jumlah kuota haji akibat kebijakan perluasan area di Masjidil Haram. Meskipun dari sisi kuota mengalami sedikit penurunan selama empat tahun terakhir, kesejahteraan penduduk DIY secara umum semakin meningkat. Hal ini ditandai oleh fenomena meningkatnya daftar tunggu keberangkatan haji yang sudah melebihi 15 tahun. Artinya, minat penduduk untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ini cenderung meningkat.

Tabel 8.5 menunjukkan bahwa rasio jemaah haji per 100.000 penduduk pemeluk agama Islam pada 2016 sebesar 70,58. Ini berarti bahwa dari setiap 100 ribu penduduk muslim sekitar 70 penduduk menunaikan ibadah haji pada tahun 2016. Secara umum, jumlah jemaah haji perempuan tercatat masih lebih dominan dibandingkan jumlah jemaah haji laki-laki. Jemaah haji laki-laki tercatat sebanyak 1.161 orang, sedangkan jemaah haji perempuan mencapai 1.3302 orang.

**LAMPIRAN/APPENDIX**

<https://yogyakarta.bps.go.id>

**Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun  
menurut Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, 1980-2010**  
*Annual Growth Rate by Regency/City in Daerah Istimewa Yogyakarta, 1980-2010*

Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	Tahun/Year		
	1980-1990	1990-2000	2000-2010
(1)	(3)	(4)	(4)
Kulon Progo	- 0,22	-0,04	0,48
Bantul	0,94	1,19	1,57
Gunungkidul	- 0,13	0,30	0,07
Sleman	1,43	1,50	1,90
Kota Yogyakarta	0,34	-0,39	-0,21
<b>Daerah Istimewa Yogyakarta</b>	<b>0,58</b>	<b>0,72</b>	<b>1,04</b>

Sumber: Sensus Penduduk 1980, 1990, 2000, 2010  
Source : 1980, 1990, 2000, 2010 Population Census

**Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan  
Status Perkawinan di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016**

*Percentage of Population 10 Years Old and Over by Regency/City  
and Marital Status in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016*

Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	Status perkawinan/ <i>Marital Status</i>				
	Belum kawin/ <i>Single</i>	Kawin/ <i>Married</i>	Cerai hidup/ <i>Divorced</i>	Cerai mati/ <i>Widowed</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulon Progo	26,16	62,63	1,78	9,43	100,00
Bantul	29,54	60,91	1,79	7,76	100,00
Gunungkidul	22,32	67,52	1,25	8,91	100,00
Sleman	35,67	56,13	1,82	6,38	100,00
Kota Yogyakarta	40,99	50,54	2,20	6,27	100,00
<b>Daerah Istimewa Yogyakarta</b>	<b>31,00</b>	<b>59,70</b>	<b>1,74</b>	<b>7,57</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Susenas 2016  
Source : 2016, National Socio Economic Survey

**Persentase Wanita Pernah Kawin menurut Kabupaten/Kota  
dan Umur Perkawinan Pertama di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016**

*Percentage of Population Ever Marriage by Regency/City and Age  
at First Marriage in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016*

Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	Umur perkawinan pertama/ <i>Age of First Marriage</i>				Jumlah/ <i>Total</i>
	≤ 16	17 – 18	19 - 24	25 +	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulon Progo	8,32	14,59	52,70	24,40	100,00
Bantul	6,58	14,30	56,40	22,72	100,00
Gunungkidul	13,58	19,58	53,84	13,01	100,00
Sleman	3,80	11,59	53,97	30,64	100,00
Kota Yogyakarta	4,34	9,59	51,17	34,91	100,00
<b>Daerah Istimewa Yogyakarta</b>	<b>7,34</b>	<b>14,28</b>	<b>54,16</b>	<b>24,23</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Susenas 2016

Source : 2016, National Socio Economic Survey

**Persentase Penduduk menurut Kabupaten/Kota  
dan Kelompok Usia di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016**

*Percentage of Population by Regency/City and Age Groups  
in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016*

Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	Kelompok Usia/ <i>Age Groups</i>			Jumlah/ <i>Total</i>	Rasio Beban Ketergantungan/ <i>Dependency Ratio</i>
	<15	15-64	65+		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulon Progo	22,50	66,07	11,43	100	51,34
Bantul	22,16	69,12	8,71	100	44,67
Gunungkidul	21,34	65,45	13,21	100	52,80
Sleman	21,47	71,21	7,32	100	40,43
Kota Yogyakarta	19,14	74,45	6,41	100	34,32
<b>Daerah Istimewa Yogyakarta</b>	<b>21,48</b>	<b>69,33</b>	<b>9,19</b>	<b>100</b>	<b>44,24</b>

Sumber: Susenas 2016

Source : 2016, National Socio Economic Survey

**Persentase Balita menurut Kabupaten/Kota dan  
Penolong Terakhir Waktu Lahir di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016**  
*Percentage of Children Under Five by Regency/City and Last of Birth Attendant  
in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016*

Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	Penolong terakhir waktu lahir/ <i>Last of Birth Attendant</i>				
	Dokter/ <i>Doctor</i>	Bidan/ <i>Midwife</i>	Tenaga medis lain/ <i>Other Medical Personnel</i>	Dukun/ <i>Traditional Birth Attendant</i>	Lainnya/ <i>Others</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulon Progo	53,34	46,66	0,00	0,00	0,00
Bantul	40,06	57,72	2,21	0,00	0,00
Gunungkidul	48,85	51,15	0,00	0,00	0,00
Sleman	64,13	32,51	0,00	3,36	0,00
Kota Yogyakarta	53,81	41,40	1,17	3,63	0,00
<b>Daerah Istimewa Yogyakarta</b>	<b>52,98</b>	<b>44,78</b>	<b>0,67</b>	<b>1,57</b>	<b>0,00</b>

Sumber: Susenas 2016  
Source : 2016, National Socio Economic Survey

**Persentase Balita Usia 12-59 Bulan menurut Pemberian Imunisasi dan Kabupaten/Kota  
di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016**  
*Percentage of Children Aged 12-59 Months According to Vaccination and Regency/City  
in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016*

Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	Dimunisasi <i>Vaccinated</i>	Jenis Imunisasi/ <i>Type of Vaccination</i>		Tidak Diimunisasi <i>Not Vaccinated</i>	Tidak Tahu <i>Unknown</i>
		Imunisasi Dasar Lengkap <i>Complete Basic Vaccination</i>	Imunisasi Dasar Tidak Lengkap <i>Uncomplete Basic Vaccination</i>		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulon Progo	98,90	58,07	41,93	0,00	1,10
Bantul	99,76	80,24	19,76	0,00	0,24
Gunungkidul	98,73	80,99	19,01	1,27	0,00
Sleman	94,20	75,22	24,78	5,03	0,77
Yogyakarta	98,93	79,64	20,36	1,07	0,00
<b>DIY</b>	<b>97,55</b>	<b>76,23</b>	<b>23,77</b>	<b>2,00</b>	<b>0,45</b>

Sumber: Susenas 2016  
Source : 2016, National Socio Economic Survey

**Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan, Terganggu Aktivasnya, Lama Hari Terganggu, Gangguan Parah, Berobat Jalan, dan Rawat Inap Menurut Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016**

*Percentage of Population Who Had Health Complaint, Disturb Activities, Days of Disturb, Severe Health, Treated Outpatient, and Treated Inpatient by Regency/City in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016*

Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	Mengalami Keluhan Kesehatan <i>Health Complaint</i>	Mengganggu Aktivitas <i>Disturb Activities</i>	Lama Terganggu <i>Days of Disturb</i>	Gangguan Parah <i>Severe Health</i>	Berobat Jalan <i>Treated Outpatient</i>	Rawat Inap <i>Treated Inpatient</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)
Kulon Progo	42,09	43,45	5,28	15,63	59,00	6,54
Bantul	34,99	45,07	5,20	29,57	54,37	5,83
Gunungkidul	35,38	57,39	5,31	18,15	65,17	4,90
Sleman	35,55	47,73	5,69	21,24	47,29	5,99
Yogyakarta	34,45	42,53	5,78	26,91	50,51	6,10
<b>DIY</b>	<b>35,98</b>	<b>47,77</b>	<b>5,44</b>	<b>22,43</b>	<b>54,40</b>	<b>5,81</b>

Sumber: Susenas 2016

Source : 2016, National Socio Economic Survey

**Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Berobat di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016**

*Percentage of Population Treated Outpatient by Regency/City and Place of Medical in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016*

Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	Rumah Sakit <i>Hospital</i>	Dokter/ Bidan <i>Doctor/ Midwife</i>	Klinik/ <i>Clinic</i>	Puskesmas <i>Health center</i>	UKBM	Praktek Tradisional <i>Traditional Treatment</i>	Lainnya <i>Others</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kulon Progo	19,44	36,54	10,39	35,95	0,53	2,40	0,84
Bantul	19,96	41,91	13,50	29,48	0,71	0,75	0,56
Gunungkidul	19,80	44,95	9,63	34,98	0,00	0,62	0,63
Sleman	29,76	37,74	11,86	20,57	0,74	1,68	0,87
Kota Yogyakarta	29,67	18,68	9,89	44,71	0,35	0,69	0,35
<b>Daerah Istimewa Yogyakarta</b>	<b>23,49</b>	<b>38,39</b>	<b>11,37</b>	<b>30,75</b>	<b>0,50</b>	<b>1,20</b>	<b>0,68</b>

Sumber: Susenas 2016

Source : 2016, National Socio Economic Survey

**Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan  
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016**

*Percentage of Population 15 Years Old and Over by Regency/City and Level of  
Educational Attainment in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016*

Kabupaten/ Kota Regency/City	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan/Level of Educational Attainment								Jumlah Total
	Tdk/Blm Pernah Sekolah Never/Not Yet Attended School	Tdk/Blm Tamat SD Not Complete Primary School	SD Primary School	SLTP Junior High School	SLTA Senior High School	Diploma Diploma 1/2/3	D4/S1 Dipl.4/ Grad.	S2/S3 Post grad.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kulon Progo	4,38	11,18	29,53	12,04	33,29	2,34	6,95	0,29	100
Bantul	5,40	10,34	22,18	17,28	33,85	2,85	7,53	0,57	100
Gunungkidul	12,39	12,52	32,69	17,06	20,52	1,80	2,82	0,21	100
Sleman	3,55	4,84	13,10	15,15	45,35	5,38	10,72	1,92	100
Kota Yogyakarta	1,44	3,15	18,18	12,43	44,81	4,60	13,55	1,85	100
<b>DIY</b>	<b>5,60</b>	<b>8,28</b>	<b>21,69</b>	<b>15,42</b>	<b>36,11</b>	<b>3,59</b>	<b>8,26</b>	<b>1,05</b>	<b>100</b>

Sumber: Susenas 2016

Source : 2016, National Socio Economic Survey

**Persentase Penduduk 7-24 Tahun menurut Golongan Umur,  
Jenis Kelamin dan Jenjang Partisipasi Bersekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016**

*Percentage of Population 15 Years Old and Over by Regency/City and Level of Educational Attainment in  
Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016*

Jenis Kelamin/ Sex	Partisipasi Sekolah/ Educational Attainment	Kelompok Umur/ Age Groups				
		7 – 12	13 – 15	16 – 18	19 – 24	7 - 24
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laki-laki/ Male	Belum/Tidak Pernah Bersekolah Never/ Not Yet Attended School	0,00	0,22	0,28	0,00	0,07
	Masih Sekolah/ Attending School	100,00	99,78	86,04	51,66	79,54
	Tidak Bersekolah Lagi/ Not Attending School Anymore	0,00	0,00	13,68	48,34	20,39
Perempuan/ Female	Belum/Tidak Pernah Bersekolah Never/ Not Yet Attended School	0,34	0,00	0,00	0,43	0,27
	Masih Sekolah/ Attending School	99,66	99,46	88,40	48,22	77,45
	Tidak Bersekolah Lagi/ Not Attending School Anymore	0,00	0,54	11,60	51,35	22,27
Laki-laki + Perempuan/ Male+Female	Belum/Tidak Pernah Bersekolah Never/ Not Yet Attended School	0,16	0,11	0,14	0,21	0,17
	Masih Sekolah/ Attending School	99,84	99,62	87,20	49,95	78,53
	Tidak Bersekolah Lagi/ Not Attending School Anymore	0,00	0,27	12,66	49,84	21,30

Sumber: Susenas 2016

Source : 2016, National Socio Economic Survey

**Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kegiatan Utama  
Selama Seminggu yang Lalu dan Tipe Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016**  
*Population of 15 Years Old and Over by Main Activity During  
The Previous Weeks and Type of Place in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016*

Kegiatan Activity	Februari 2016			Agustus 2016		
	Kota (K) Urban	Desa (D) Rural	K+D	Kota (K) Urban	Desa (D) Rural	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Angkatan Kerja/ Labor Force</b>	1.412.135	684.730	2.096.865	1.451.255	648.181	2.099.436
Bekerja/Working	1.362.192	675.672	2.037.864	1.410.777	631.623	2.042.400
Pengangguran/Unemployment	49.943	9.058	59.001	40.478	16.558	57.036
<b>Bukan Angkatan Kerja</b>	647.796	159.640	807.436	618.401	199.815	818.216
Sekolah/Attending School	307.502	92.880	400.382	291.383	139.512	430.895
Mengurus Rumah Tangga/ House Keeping	226.468	38.390	264.858	235.469	37.817	273.286
Lainnya/Others	113.826	28.370	142.196	91.549	22.486	114.035
<b>Penduduk Berusia Kerja/Totals</b>	2.059.931	844.370	2.904.301	2.069.656	847.996	2.917.652
<b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)</b>	<b>68,55</b>	<b>81,09</b>	<b>72,20</b>	<b>70,12</b>	<b>76,44</b>	<b>71,96</b>
<b>Tingkat Pengangguran Terbuka (%)</b>	<b>3,54</b>	<b>1,32</b>	<b>2,81</b>	<b>2,79</b>	<b>2,55</b>	<b>2,72</b>

Sumber: Sakernas Februari dan Agustus 2016

Source: National Labour Force Surveys in February and August 2016

**Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan  
Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016**  
*Percentage of Population 15 Years Old and Over who Worked During the Previous  
Weeks by Main Industry and Sex in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016*

Lapangan Pekerjaan Utama Main Industry	Jenis Kelamin/Sex					
	Laki-laki/ Male		Perempuan/ Female		L+P/ Male+Female	
	Jumlah/ Sum	%	Jumlah/ Sum	%	Jumlah/ Sum	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian/ Agriculture	262.456	23,20	212.890	23,37	475.346	23,27
Industri/ Manufacturing Industry	134.572	11,89	127.536	14,00	262.108	12,83
Perdagangan/Trading	262.967	23,24	326.988	35,89	589.955	28,89
Jasa-jasa/ Services	205.869	18,20	217.896	23,92	423.765	20,75
Lainnya/ Others	265.536	23,47	25.690	2,82	291.226	14,26
<b>Jumlah/Total</b>	<b>1.131.400</b>	<b>100</b>	<b>911.000</b>	<b>100</b>	<b>2.042.400</b>	<b>100</b>

Sumber: Sakernas Agustus 2016

Source: National Labour Force Surveys in August 2016

## Lampiran 5.1

**Persentase Pengeluaran Perkapita Sebulan menurut Kabupaten/kota dan Wilayah di DIY, 2016**  
*Percentage of per Capita Expenditure per Month by Regency/Municipality and Area in DIY, 2016*

Kabupaten/kota Regency/City	Makanan/Food			Non Makanan/Non-Food		
	Kota/ Urban	Desa/ Rural	Kota+Desa/ Urban+Rural	Kota/ Urban	Desa/ Rural	Kota+Desa/ Urban+Rural
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kulon Progo	43,46	46,90	46,01	56,54	53,10	53,99
Bantul	40,61	47,99	41,56	59,39	52,01	58,44
Gunungkidul	47,09	53,57	52,71	52,91	46,43	47,29
Sleman	36,47	44,98	36,98	63,53	55,02	63,02
Kota Yogyakarta	36,00	-	36,00	64,00	-	64,00
<b>DIY</b>	<b>37,88</b>	<b>50,08</b>	<b>40,52</b>	<b>62,12</b>	<b>49,92</b>	<b>59,48</b>

Sumber: Susenas 2016

Source : 2016, National Socio Economic Survey

## Lampiran 5.2

**Konsumsi Energi (Kkal) dan Protein (Gram) Perkapita Sehari menurut Daerah Tempat Tinggal dan Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta, 2016**

*Energy and Protein Consumption per Capita per Day by Region/Municipality and Area in DIY, 2016*

Kabupaten/kota Regency/City	Energi (kkal)			Protein (gram)		
	Kota/ Urban	Desa/ Rural	Kota+Desa/ Urban+Rural	Kota/ Urban	Desa/ Rural	Kota+Desa/ Urban+Rural
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kulon Progo	1.960,11	1.889,79	1.906,55	54,62	50,85	51,75
Bantul	1.954,55	2.086,71	1.974,16	59,56	59,26	59,52
Gunungkidul	2.125,02	2.068,17	2.074,37	63,15	55,29	56,15
Sleman	2.192,14	2.454,66	2.210,61	68,31	70,82	68,48
Kota Yogyakarta	1.995,14		1.995,14	67,27		67,27
<b>DIY</b>	<b>2.069,77</b>	<b>2.049,84</b>	<b>2.063,40</b>	<b>64,54</b>	<b>55,68</b>	<b>61,71</b>

Sumber: Susenas 2016

Source : 2016, National Socio Economic Survey

**Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota  
dan Sumber Penerangan di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016**  
*Percentage of Households by Regency/City and Source of Lighting  
in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016*

Kabupaten/Kota <i>Regency/ City</i>	Sumber penerangan/ <i>Source of Lighting</i>			Jumlah/ <i>Sum</i>
	Listrik PLN/ <i>PLN Electricity</i>	Listrik non PLN/ <i>Non PLN Electricity</i>	Lainnya/ <i>Others</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kulon Progo	99,87	0,00	0,13	100
Bantul	99,17	0,83	0,00	100
Gunungkidul	99,49	0,51	0,00	100
Sleman	99,82	0,06	0,12	100
Kota Yogyakarta	99,89	0,00	0,11	100
<b>Daerah Istimewa Yogyakarta</b>	<b>99,61</b>	<b>0,32</b>	<b>0,07</b>	<b>100</b>

Sumber: Susenas 2016

Source : 2016, National Socio Economic Survey

**Banyaknya Pelanggan Listrik menurut Unit Pelayanan  
di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012-2016**  
*Number of Consumers of Electrical Power by Service Unit  
in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012-2016*

Unit Pelayanan <i>Service Unit</i>	Tahun/ <i>Year</i>			
	2012	2013	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kulon Progo	97 736	101 882	107 485	112 120
Bantul	160 038	163 667	175 652	183 994
Gunungkidul	156 963	165 638	176 064	184 349
Yogyakarta Kota Selatan	197 060	204 185	215 325	225 282
Sleman	123 352	128 309	136 942	143 689
Sedayu	108 221	112 662	119 889	125 845
Kalasan	92 451	95 984	102 609	107 795
<b>Daerah Istimewa Yogyakarta</b>	<b>935 821</b>	<b>972 327</b>	<b>1 033 966</b>	<b>1 083 074</b>

Sumber: PLN Wilayah XIII Cabang Yogyakarta

Source : Government Electricity Company for Area XIII Distribution of Yogyakarta Sub Division

**Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum dan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016**

*Percentage of Households by Source of Drinking Water and Regency/City in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016*

Kabupaten/Kota Regency/ City	Sumber air minum/Source of Drinking Water					
	Air Kemasan/ Packaging Water	Ledeng/ Pipe	Pompa/ Pump	Sumur/ Mata Air Terlindung/ Protected Well/Spring	Sumur/ Mata Air Tidak Terlindung/ Unprotected Well/Spring	Air Hujan, Lainnya/ Rain Water, Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kulon Progo	12,42	12,33	4,85	53,27	15,55	1,58
Bantul	18,04	8,57	13,16	56,81	3,42	0,00
Gunungkidul	4,28	24,44	8,79	33,27	5,87	23,35
Sleman	30,41	3,94	10,79	50,55	4,09	0,22
Kota Yogyakarta	46,86	7,97	18,05	26,66	0,46	0,00
<b>Daerah Istimewa Yogyakarta</b>	<b>22,87</b>	<b>10,23</b>	<b>11,37</b>	<b>46,10</b>	<b>4,96</b>	<b>4,47</b>

Sumber: Susenas 2016

Source : 2016, National Socio Economic Survey

**Persentase Rumah Tangga menurut Jarak Sumber Air Minum ke Tempat Penampungan Kotoran/Tinja Terdekat dan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016**

*Percentage of Households by Distance Between Source of Drinking Water to Nearest Septic Tank or Other Sanitary Facilities and Regency/City in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016*

Kabupaten/kota Regency/City	Jarak penampungan/ Distance (m)		
	≤ 10 meter	> 10 meter	Tidak tahu Unknown
(1)	(2)	(3)	(4)
Kulon Progo	16,94	82,89	0,16
Bantul	31,42	67,29	1,29
Gunungkidul	11,53	87,37	1,10
Sleman	18,42	79,26	2,32
Kota Yogyakarta	31,12	62,05	6,82
<b>Daerah Istimewa Yogyakarta</b>	<b>22,34</b>	<b>75,64</b>	<b>2,01</b>

Sumber: Susenas 2016

Source : 2016, National Socio Economic Survey

**Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal dan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016**

*Percentage of Households by Housing Ownership Status and Regency/Municipality in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016*

Kabupaten/Kota Regency/ City	Status Kepemilikan Rumah Tinggal/ <i>Housing Ownership Status</i>				
	Milik Sendiri/ Own	Kontrak/Sewa Lease/Rent	Bebas Sewa/ Free Rent	Dinas/ Official	Lainnya/ Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulon Progo	90,22	0,93	8,48	0,37	0,00
Bantul	85,02	7,63	7,05	0,07	0,22
Gunungkidul	97,44	0,31	2,02	0,23	0,00
Sleman	71,24	20,67	7,85	0,07	0,16
Kota Yogyakarta	40,89	38,95	17,33	2,44	0,39
<b>Daerah Istimewa Yogyakarta</b>	<b>77,40</b>	<b>14,07</b>	<b>7,92</b>	<b>0,45</b>	<b>0,16</b>

Sumber: Susenas 2016

Source : 2016, National Socio Economic Survey

**Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai Perkapita dan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016**

*Percentage of Households by per Capita Floor Area and Regency/City in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016*

Kabupaten/Kota Regency/ City	Luas Lantai Perkapita/ <i>Per Capita Floor Area (m<sup>2</sup>)</i>					
	< 10	10 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	≥ 50
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kulon Progo	0,76	20,86	27,78	17,27	10,08	23,26
Bantul	9,19	30,23	23,76	13,99	8,20	14,63
Gunungkidul	2,62	21,99	25,41	17,73	11,19	21,07
Sleman	11,23	30,61	20,45	13,81	6,97	16,93
Kota Yogyakarta	27,05	33,72	12,52	7,88	3,10	15,74
<b>Daerah Istimewa Yogyakarta</b>	<b>10,22</b>	<b>28,38</b>	<b>21,86</b>	<b>14,12</b>	<b>7,84</b>	<b>17,59</b>

Sumber: Susenas 2016

Source : 2016, National Socio Economic Survey

**Banyaknya Jemaah Haji menurut Kabupaten/Kota  
di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2011 – 2015**

*Number of Pilgrim by Regency/City in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2011-2016*

<b>Kabupaten/kota Regency/City</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
Kulon Progo	257	265	214	244	220
Bantul	812	647	647	615	668
Gunungkidul	229	262	285	294	214
Sleman	1 173	912	922	914	992
Kota Yogyakarta	618	391	403	401	369
<b>Daerah Istimewa Yogyakarta</b>	<b>3 093</b>	<b>2 477</b>	<b>2.471</b>	<b>2.468</b>	<b>2.463</b>

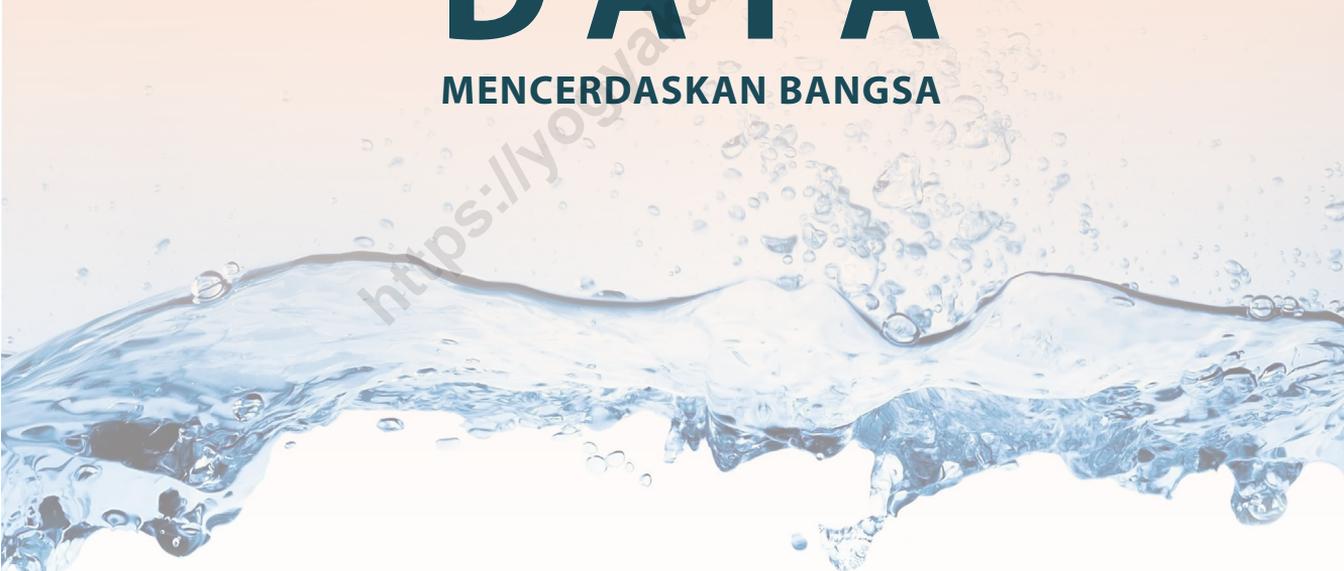
Sumber : Kanwil Depag, Daerah Istimewa Yogyakarta

Source : *Regional Office of Religious Affairs Department of Daerah Istimewa Yogyakarta*

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://yogyakarta.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK**  
**Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**  
*BPS-Statistics of Daerah Istimewa Yogyakarta Province*  
Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul  
Telp. (0274) 4342234 (Hunting) Fax. (0274) 4342230  
Homepage: <http://yogyakarta.bps.go.id> E-mail: [bps3400@bps.go.id](mailto:bps3400@bps.go.id)

